

**PROSES IDEOLOGISASI KADER PARTAI
(Studi Kasus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

MUHAMMAD RIFQI DAFFA SUWANDI

I01219020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

2023

**PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim..

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIFQI DAFFA SUWANDI

NIM : I01219020

Program Studi : ILMU POLITIK

Judul Skripsi : "PROSES IDEOLOGISASI KADER PARTAI (Studi Kasus DPC
PDI Perjuangan Kota Surabaya"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapat gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung atas segala konsekuensinya.

Surabaya, 6 Juli 2023

Muhammad Rifqi Daffa Suwandi

NIM I01219020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis Oleh :

Nama : Muhammad Rifqi Daffa Suwandi

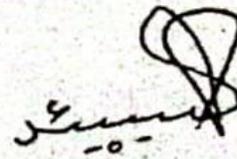
NIM : 101219020

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : **“PROSES IDEOLOGISASI KADER PARTAI (Studi Kasus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya)”** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam Bidang Ilmu Politik

Surabaya, 13 Juni 2023

Pembimbing



Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag., M.Si.

NIP : 197411102003121004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

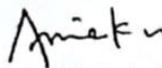
Skripsi yang disusun oleh Muhammad Rifqi Daffa Suwandi dengan judul "PROSES IDEOLOGISASI KADER PARTAI (Studi Kasus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya)" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 6 Juli 2023

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I


Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag., M.Si.
NIP. 197411102003121004

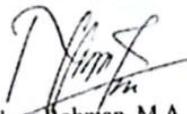
Penguji II


Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si.
NIP. 196909071994032001

Penguji III


Laili Bariroh, M.Si.
NIP. 197711032009122002

Penguji IV


Noor Rohman, M.A.
NIP. 198510192015031001

Surabaya, 18 Juli 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,




Abdul Chalik, M.Ag.

NIP. 197306272000031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rifai Daffa Suwandi
 NIM : 101219020
 Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU POLITIK
 E-mail address : qqdaffa271@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PROSES IDEOLOGISASI KADER PARTAI (Studi Kasus DPC PDI Perjuangan
Kota Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 September 2023

Penulis



(M. RIFAI DAFFA SUWANDI)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

Muhammad Rifqi Daffa Suwandi, 2023. *THE IDEOLOGIZATION PROCESS OF PARTY CADRES: A Case Study of the PDI Perjuangan DPC in Surabaya City.* Thesis for Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: Ideology, Cadres, Political Parties, Regeneration, PDI Perjuangan

This research originated from the political dynamics in Surabaya which had been controlled by the PDI Perjuangan for several decades, so curiosity arose about the cadre system owned by this political party. The ideological process through the cadre system is the main focus of this research, as well as the factors that support or hinder the ideological process.

The research method uses a qualitative approach with interview and documentation data collection techniques. The informants selected were special staff from the PDI Perjuangan faction, administrators in the field of ideology and cadre formation, and cadres who had attended primary cadre training. The theory used in this study is the cadre theory according to Veithzal Rivai and the typology of political parties according to Ramlan Surbakti.

The results of this study indicate that the ideological process through the cadre system carried out by the PDI Perjuangan is tiered and open. Formal cadre formation and informal cadre formation are the two systems implemented by the PDI Perjuangan to carry out the ideological process. In accordance with the AD/ART, the PDI Perjuangan DPC has an obligation to organize Primary Cadre Training as an ideological process with a formal cadre system. Whereas in informal cadres there are several ideological processes with several assignments, namely the assignment of cadres in each activity, the assignment of cadres in the management structure, and the assignment of cadres as public officials.

There are several supporting and inhibiting factors for the ideological process. The internal factors that support the ideological process are the cadres' self-motivation in participating in the activities and the role of Badiklat as the designer and supervisor of the cadre process. Meanwhile, the selection of qualified speakers to become facilitators in shaping the behavior of these cadres is an external factor in supporting the ideological process. Internal factors hindered the cadre process, namely the ability of cadres to receive various materials and the use of regional languages when expressing opinions, while the most important external factor was the selection process that was so strict to avoid espionage and a pandemic which had stopped the cadre process.

ABSTRAK

Muhammad Rifqi Daffa Suwandi, 2023. PROSES IDEOLOGISASI KADER PARTAI: Studi Kasus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Skripsi Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *Ideologi, Kader, Partai Politik, Kaderisasi, PDI Perjuangan*

Penelitian ini berawal dari dinamika politik di Surabaya yang beberapa dekade dikuasai oleh PDI Perjuangan, sehingga muncul keingintahuan terhadap sistem kaderisasi yang dimiliki oleh partai politik tersebut. Proses ideologisasi melalui sistem kaderisasi menjadi fokus utama dari penelitian ini, juga faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses ideologisasi tersebut.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara dan dokumentasi. Informan yang dipilih yaitu Staf khusus Fraksi PDI Perjuangan, pengurus bidang ideologi dan kaderisasi, dan kader yang telah mengikuti pelatihan kader pratama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kaderisasi menurut Veithzal Rivai dan tipologi partai politik menurut Ramlan Surbakti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses ideologisasi melalui sistem kaderisasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan berjalan berjenjang dan terbuka. Kaderisasi formal dan kaderisasi informal menjadi dua sistem yang dijalankan oleh PDI Perjuangan untuk melakukan proses ideologisasi. Sesuai dengan AD/ART, DPC PDI Perjuangan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Pelatihan Kader Pratama sebagai proses ideologisasi dengan sistem kaderisasi formal. Sedangkan dalam kaderisasi informal terdapat beberapa proses ideologisasi dengan beberapa penugasan, yaitu penugasan kader dalam setiap kegiatan, penugasan kader dalam struktur kepengurusan, dan penugasan kader sebagai pejabat publik.

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terjadinya proses ideologisasi. Faktor internal yang mendukung proses ideologisasi adalah motivasi diri kader dalam mengikuti kegiatan dan peran Badiklat sebagai perancang dan pengawas proses kaderisasi tersebut. Sedangkan pemilihan pemateri yang berkualitas untuk menjadi fasilitator dalam membentuk perilaku kader tersebut menjadi faktor eksternal dalam mendukung proses ideologisasi. Faktor internal yang menghambat proses kaderisasi yaitu daya tangkap kader dalam menerima materi sangat beragam dan penggunaan bahasa daerah ketika menyampaikan pendapat, Sedangkan faktor eksternal yang paling utama merupakan proses seleksi yang begitu ketat untuk menghindari spionase dan pandemi yang sempat menghentikan proses kaderisasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Konseptual.....	11
1. Ideologi.....	11
2. Kaderisasi	12
3. Partai Politik	13
4. Politik Lokal.....	14
BAB II : KAJIAN TEORITIK.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	31
1. Kaderisasi.....	31
1.1 Pengertian Kaderisasi.....	31
1.2 Konsep Kaderisasi.....	34
1.3 Ideologisasi	37
2. Partai Politik.....	39
2.1 Pengertian Partai Politik.....	39
2.2 Tipologi dan Sistem Partai Politik	45
BAB III : METODE PENELITIAN.....	52
A. Pendekatan Penelitian.....	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
C. Informan Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Teknik Analisis Data	57
F. Teknik Pemeriksaan Pengabsahan Data.....	58
G. Sistematika Pembahasan	59

DAFTAR TABEL

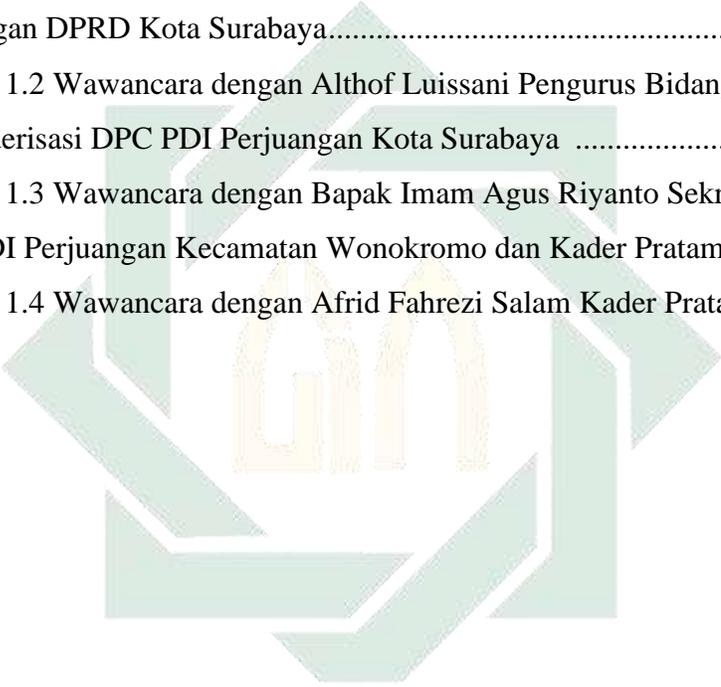
Tabel 4.1 Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya 2019-2024.....	82
Tabel 4.2 Data Perolehan Kursi DPRD Kota Surabaya 1999-2019.....	84
Tabel 4.3 Data Perolehan Suara Pilkada Surabaya 2005-2020.....	86
Tabel 4.4 Susunan Acara Pelatihan Kader Pratama.....	102
Tabel 4.5 Indeks Pembangunan Manusia 2010-2020	116



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wawancara dengan Achmad Hidayat Wakil Sekretaris Bidang Eksternal DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya dan Staf Khusus Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya.....	148
Gambar 1.2 Wawancara dengan Althof Luissani Pengurus Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya	148
Gambar 1.3 Wawancara dengan Bapak Imam Agus Riyanto Sekretaris PAC PDI Perjuangan Kecamatan Wonokromo dan Kader Pratama.....	148
Gambar 1.4 Wawancara dengan Afrid Fahrezi Salam Kader Pratama	149



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah partai di Indonesia tak lepas dari adanya ideologi sebagai aspek yang paling mendasar dalam menguatkan sistem kelembagaan dalam partai, tetapi seiring berjalannya waktu ideologi justru terabaikan karena makin hari partai politik justru cenderung terhadap personalisasi politik juga penyempitan fungsi partai sebagai kendaraan politik saja.¹ Hal tersebut yang mengabaikan konsep dari ideologi yang kebanyakan mewakili kepentingan masyarakat. Dari sekian banyak partai pada dewasa ini hanya tersisa dua partai yang masih menggunakan ideologi sebagai daya tarik dalam menggalang dukungan masyarakat yaitu PKS dan PDIP dan keduanya memiliki pendukung yang fanatik.

Fenomena krisis identitas dan luntarnya ideologi partai-partai di Indonesia terjadi pasca pemilu 2009 yang mana hal tersebut membuat masyarakat semakin sulit untuk membedakan antara partai satu dengan yang lain, karena semua partai cenderung lebih pragmatis dalam berpolitik dan hanya fokus terhadap bagaimana cara meraih kekuasaan. Menurut Macridis, dalam kondisi tersebut partai lebih terlihat pragmatis karena tidak melibatkan masalah ideologis.² Fenomena tersebut yang menimbulkan sikap apatis dari masyarakat terhadap partai politik, bahkan

¹ Laila Kholid Alfirdaus, Dari Identitas Ke Ideologi: Penguatan Arah Kebijakan Programatik Partai Politik, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2018, 100.

² Yeby Ma'asan Mayrudin, Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi: Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-partai Politik Peserta Pemilu 2014, *Journal of Governance*, Vol. 2, No. 2, 2017, 164.

politik identik dengan segala sesuatu yang bersifat negatif dalam stigma masyarakat.

Politik pragmatis nantinya akan berbenturan terhadap salah satu prinsip demokrasi dicontohkan dengan kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Sebagai negara demokrasi, tentunya Indonesia juga mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi.³ Lanskap demokrasi di Indonesia menjadikan partai politik sebagai alat politik yang sangat strategis sehingga kita harus berinvestasi dalam pentingnya ideologi politik di tingkat makro untuk memajukan arah tujuan politik berbangsa dan bernegara. Partai politik memiliki peran dalam mengambil suatu kebijakan apabila anggota mereka terpilih dalam suatu pemilihan umum.

PDI Perjuangan menjadi salah satu partai besar yang mengikuti pemilu di Indonesia. Peristiwa pada 27 Juli 1996 menjadi penanda kebangkitan Megawati dan PDI Perjuangan dalam peta politik di Indonesia pada saat itu, yang mana Megawati sebagai penerus trah Soekarno sukses menduduki kursi ketua umum dan mengalahkan pesaingnya yang menjadi kaki tangan rezim orde baru. PDI Perjuangan sendiri sebenarnya bukan partai yang baru lahir, tetapi baru bangkit karena PDI Perjuangan merupakan penerus dari Partai Nasional Indonesia.⁴ Fakta tersebut membuat PDI Perjuangan memiliki sejarah panjang dalam kontestasi politik di Indonesia sehingga memiliki basis pendukung dengan cakupan yang

³ Rendy Prihata, Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Mewujudkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2019-2024, *Indonesian Journal of Social and Political Science*, Vol. 1 No. 1, 2020, 17.

⁴ Afri Andi dan Al Sukri, Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu Legislatif 2019 di Pekanbaru, *Journal Of Politican Communication and Media*, Vol. 1 No. 1, 2022, 38.

cukup luas.

Khususnya di Kota Surabaya, PDI Perjuangan konsisten menguasai kontestasi politik di kota ini selama bertahun-tahun baik dari lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Banyak tokoh yang dipromosikan oleh PDI Perjuangan DPC Surabaya, seperti Armuji, Bambang D.H., Whisnu Sakti Buana dan menjadi tokoh nasional seperti Tri Rismaharini. Bahkan pada pemilu terakhir yakni 2019, PDI Perjuangan memperoleh seperempat kursi dari total jumlah kursi yang ada di DPRD Kota Surabaya.⁵ Peran partai dalam hal ini sangat krusial, bahkan ketika mendapat penolakan dari pengurus dengan struktur terbawah, partai tetap pada pendiriannya dalam mengusung kader atau non kader yang dijadikan pejabat publik mewakili PDI Perjuangan.

Namun PDI Perjuangan mungkin terbilang kurang mulus ketika menguasai lembaga legislatif di Kota Surabaya, karena ketika Armuji turun dari ketua DPRD pada 2003-2004 untuk menggantikan rekannya yang terkena kasus korupsi, berturut-turut PDI Perjuangan gagal mempertahankan posisi tersebut.⁶ Pada pemilu 2004 politisi PKB Musyafak Rouf terpilih menjadi Ketua DPRD Kota Surabaya menggantikan Armuji, tetapi PKB juga tidak bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada pemilu 2009 giliran Partai Demokrat yang menjadi pemenang dengan memperoleh 16 kursi dan menjadikan Wisnu Wardhana sebagai Ketua DPRD, namun Partai Demokrat mengalami

⁵ KPU “*Hasil Pemilu Legislatif Kota Surabaya*”, diakses dari <https://bit.ly/3WXnTto> , pada tanggal 9 Januari 2023, pukul 23.11.

⁶ Sholihin Nur, “*Mengenal Lebih Dekat Pasangan Eri Cahyadi-Armuji, Paslon Nomor Urut 1 Pilwali Surabaya*”, diakses dari <https://bit.ly/3HjOnyx> , pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 1.02

penurunan drastis pada pemilu 2014 dengan memperoleh 6 kursi sedangkan PDI Perjuangan sebaliknya.

Pada pemilu 2009 PDI Perjuangan hanya memperoleh 8 kursi yang menjadikannya peringkat kedua di DPRD Kota Surabaya, namun mengalami peningkatan pada pemilu 2014 yang memperoleh hingga 15 kursi dan menjadikan Armuji sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019.⁷ Hal tersebut juga terjadi pada pemilu 2019, PDI Perjuangan mengalami konsistensi dalam perolehan kursi dan menjadikannya menguasai lembaga legislatif di Kota Surabaya selama dua periode dan pada periode kedua diketuai oleh Adi Sutawidjono.⁸

Tetapi berbeda dengan dinamika politik yang dialami oleh PDI Perjuangan pada kontestasi legislatif, hal tersebut berbanding terbalik dengan konsistensi PDI Perjuangan dalam memenangkan pilkada di Kota Surabaya. PDI Perjuangan konsisten memenangkan pilkada sejak pemilihan pada 2005, tetapi sebelum itu kader PDI Perjuangan yakni Bambang Dwi Hartono sudah menjadi Wali Kota Surabaya sejak 2002 menggantikan Soenarto yang mengalami gangguan kesehatan. Pada pemilihan Wali Kota Surabaya tahun 2005 Bambang Dwi Hartono sebagai kader PDI Perjuangan terpilih kembali hingga 2010.

Pada 2010 giliran era Tri Rismaharini yang terkenal sebagai *emak e arek suroboyo* terpilih dua periode berturut-turut, era kejayaan Surabaya ada pada

⁷ Mohammad Ridwan, "Ini dia 50 anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019", diakses dari <https://bit.ly/3wGy2iH>, pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 1.05

⁸ DPRD Kota Surabaya, "Pimpinan", diakses dari <https://dprd.surabaya.go.id/pimpinan>, pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 1.07

periode Risma karena mengalami pembangunan yang masif.⁹ Dan pada pemilihan Wali Kota Surabaya terakhir PDI Perjuangan kembali memenangkan kontestasi dengan mengusung birokrat seperti Eri Cahyadi melawan koalisi dari berbagai partai yang mengusung purnawirawan jenderal polisi yakni Machfud Arifin.¹⁰ Dengan kemenangan Eri Cahyadi, PDI Perjuangan kembali menjadikan Surabaya sebagai basis kadernya yang terkenal dengan solid dan militan.

Adanya tokoh-tokoh berkualitas di daerah membuat masyarakat memiliki preferensi dan kepentingannya dalam menentukan tokoh yang sesuai dengannya.¹¹ Alasan tersebut bisa menjadi pondasi mengapa PDI Perjuangan sangat kuat di Kota Surabaya, apalagi banyak pos-pos ronda di sudut-sudut kota yang dicat dengan warna merah dan logo banteng khas partai tersebut.

Adanya perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan sosial-politik adalah tuntutan dari reformasi yang mana menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dengan reformasi maka sistem juga diubah dari yang sebelumnya pemilihan tidak langsung menjadi demokrasi langsung. Seperti di tingkat lokal yakni pemilihan walikota maupun DPR Daerah dipilih langsung oleh rakyat, mekanisme tersebut diharapkan dapat mengembalikan kedaulatan rakyat.¹² Dinamika politik

⁹ Esti Widiyana, "Karier Risma: Dari Wali Kota Surabaya hingga Jadi Mensos", diakses dari <https://bit.ly/3HmcqNp>, pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 1.10

¹⁰ Bobby Constantine Koloway, "Menang di Rekap KPU, Eri Cahyadi: Terimakasih Warga Surabaya, Mari Bekerjasama Bangun Kota Pahlawan!", diakses dari <https://bit.ly/3Y9xRYW>, pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 1.13

¹¹ Nur Agustina, La Ode Monto Bauto, Ambo Upe, Pengaruh Visi-Misi, Nilai Ideologi Partai, dan Figur Terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2017 (Studi di Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, *Jurnal Neo Societal*, Vol. 3, No. 3, 2018 527.

¹² Syah Firdaus, Dinamika Politik Lokal Menjelang Pemilukada Kota Tasikmalaya, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2012, 97-98.

lokal di Kota Surabaya sendiri tergolong kondusif hanya ada beberapa konflik internal PDI Perjuangan seperti menolak Eri Cahyadi menjadi walikota karena bukan kader murni PDI Perjuangan, selebihnya tidak ada konflik politik identitas seperti di Jakarta pada tahun 2018.

Oleh sebab itu adanya partai politik sendiri memiliki dampak bagi para masyarakat, khususnya penggemar partai itu sendiri. Dalam hal ini penggemar partai biasanya ada yang membela suatu partai secara terang-terangan dan juga mengorbankan banyak hal demi partai tersebut agar dapat memenangkan suatu pemilu, ada pula penggemar yang pasif.

Namun, seiring dengan berkembangnya suatu partai dan ideologi, partai politik tidak lebih dari kendaraan politik untuk sekelompok elit penguasa atau berniat untuk memuaskan "nafsu". Partai politik menyimpang dari tujuan utamanya untuk mengangkat derajat hidup masyarakat dan lebih memilih untuk fokus terhadap kekuasaan dan memobilisasi suara rakyat. Dalam hal ini memanipulasi masyarakat untuk memaksakan kebijakan publik tertentu dengan mengorbankan kehendak umum yang biasanya dilakukan oleh partai tersebut.¹³ Penyimpangan tersebut yang membuat masyarakat semakin gerah terhadap partai politik, terlebih ketika baik dan membantu masyarakat ketika menjelang pemilu saja.

Dalam hal ini PDI Perjuangan di tingkat politik nasional menemukan momentumnya pada 1998 ketika orde baru lengser. Partai yang memiliki sejarah terkait politik nasionalis dan personifikasi Soekarno tersebut terlibat dalam pemilu

¹³ Dian Aulia, Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, No. 1, 2016, 115.

sejak 1999 hingga saat ini yang kemudian mampu menciptakan dasar dan sistem kekuasaan politik,¹⁴ setelah itu PDI Perjuangan yang sebelumnya dianggap sebagai partai *wong cilik* kini dianggap sebagai partai yang orang kaya karena memiliki investor dan mapan dari segi apapun.

PDI Perjuangan biasanya melakukan strategi pendekatan untuk menarik pemilih mereka supaya mendukung partai tersebut. Strategi yang digunakan oleh partai tersebut berdampak signifikan bagi pemilih yang memiliki jiwa nasionalis dan mampu menysasar semua kelompok yang ada di masyarakat. Strategi yang fokus terhadap identitas dan kandidat lebih digencarkan oleh PDI Perjuangan sehingga partai pemilih mempunyai keterikatan terhadap tokoh yang dipilih tanpa memandang visi dan misi dari tokoh tersebut.¹⁵ Hal tersebut terjadi karena simpatisan PDI Perjuangan sangat mudah untuk dijadikan relawan oleh suatu tokoh, sehingga memudahkan tokoh tersebut untuk menjalankan kegiatan politik yang telah direncanakan.

Partai sebesar PDI Perjuangan tentunya pernah mengalami beberapa kegagalan dalam mengikuti kontestasi pemilu, pada pemilu 2004 dan 2009 partai tersebut kalah dalam menjuarai kontestasi pemilu padahal PDIP adalah pemenang pemilu pada tahun 1999, yang mana dalam hal tersebut partai ini tidak bisa mempertahankan kekuasaan yang ia miliki. Walaupun di tingkat nasional partai

¹⁴ Galang Gerald, Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS, *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1 No. 2, 2019, 135.

¹⁵ Udin Hamim, Strategi Kemenangan PDIP Dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Gorontalo Utara Pada Pemilihan Umum 2019, *JAMBURA Journal Civic Education*, Vol. 2, No. 2, 2022, 170.

tersebut kalah, tetapi di Kota Surabaya selalu menjadi pemenang bahkan pada pemilu 2019 PDI Perjuangan mendapatkan posisinya di Jawa Timur yang sebelumnya dipegang oleh PKB.

Ada beberapa faktor dalam kegagalan partai tersebut, seperti persaingan yang semakin kompetitif, kampanye yang monoton dan kurang mengikuti perkembangan zaman seperti semakin masifnya penggunaan sosial media. Padahal zaman selalu berkembang semakin cepat, cara lama pasti kalah saing dengan metode baru yang lebih kreatif dengan penggunaan teknologi digital, maupun memanfaatkan akses-akses yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.¹⁶ Serta daya tarik terhadap personal tokoh partai menjadi kekuatan PDI Perjuangan karena memiliki kader terbaik seperti Presiden Joko Widodo. Hal tersebut yang membuat citra suatu partai naik, karena pada dasarnya tokoh lebih besar dibanding partai itu sendiri.¹⁷ Bahkan dalam pemilu 2024, Presiden Joko Widodo masih memiliki pengaruh terhadap kontestasi politik di tingkat nasional. Terbukti dengan semua capres yang seakan-akan menjadikan program kerja yang telah dijalankan oleh Joko Widodo sebagai suatu kewajiban untuk diteruskan ke depannya.

Satu hal yang paling menarik adalah solidnya pendukung PDI Perjuangan pada pemilu tahun 2019 yang mempunyai hasrat untuk memenangkan Jokowi kedua kalinya, para pendukung tersebut dibangun loyalitasnya dengan cara kerja

¹⁶ Agus Sutisna, Perspektif Marketing Politik: Kegagalan PDIP dan Partai Demokrat Dalam Mempertahankan Posisi Sebagai Partai Pemenang Pemilu 1999 dan Pemilu 2009, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1, 2016, 113.

¹⁷ Debora Sanur, Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014, *Jurnal Politica*, Vol. 4, No. 2, 2013, 296.

nyata yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Faktor tersebut yang membuat para pendukung solid dan loyal terhadap partai. Apalagi menurut Sekjen PDI Perjuangan bahwa partai tersebut selalu konsisten melakukan konsolidasi organisasi, kaderisasi, pengembangan sekolah partai, juga rekrutmen terhadap tokoh-tokoh pemuda dan mahasiswa.¹⁸ Seperti halnya organisasi sayap PDI Perjuangan di Surabaya memiliki kader berkualitas seperti Seno Bagaskoro di Taruna Merah Putih dan Fuad Bernardi di Banteng Muda Indonesia.

Fanatisme yang dimiliki oleh pendukung PDI Perjuangan sangat tinggi karena memahami nilai-nilai yang diajarkan oleh Soekarno dan solid terhadap titah dari Megawati selaku ketua umum partai tersebut. PDI Perjuangan memiliki hubungan emosional dengan pendukungnya sehingga dimensi rasionalnya lemah namun tetap solid hingga ke akar rumput. Dukungan tersebut akan tetap mengalir terhadap partai meskipun partai tidak memiliki peran terhadap kepentingan pemilihnya.¹⁹ Faktor tersebut yang menjadikan kualitas pemilu sedikit menurun, karena pemilih tidak menyalurkan suaranya dengan rasional.

Pendukung PDI Perjuangan bahkan sudah teruji loyalitasnya selama belasan tahun, hanya PKS rival yang bisa menyamai militansi dan loyalitas pendukung PDIP. Meskipun pada beberapa pemilu belakangan PKS sudah sedikit menurun, dikarenakan konflik internal yang berkepanjangan, juga tidak adanya tokoh yang populer dari partai tersebut. Pendukung PDI Perjuangan juga tipe pendukung yang

¹⁸ Rakhmatulloh, “Prabowo-Sandi ‘Gerilya’ di Jateng, PDIP: Pendukung Jokowi Makin Solid”, diakses dari <https://bit.ly/3G8a0mc>, pada tanggal 22 Desember 2022, pukul 1.09.

¹⁹ Jaenuri, Analisis Loyalitas dan Volatilitas Pemilih Partai di Kota Malang. *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 2, 2011.

tunduk terhadap keputusan partai, mereka akan tetap mendukung penuh seseorang yang dikehendaki oleh partai meskipun mereka tidak suka.²⁰ Hal tersebut yang menjadikan PDI Perjuangan sangat solid dan sulit untuk dipecah, sehingga siapapun tokoh yang dipilih oleh partai maka suka tidak suka harus didukung.

Meskipun ideologi sulit berubah, bukan berarti tidak dapat mengalami perubahan seiring dengan perjalanan waktu. Secara umum, masyarakat masih berpegang terhadap ideologi namun seiring berjalannya waktu semakin berkurang dikarenakan adanya asumsi terhadap partai hanyalah kendaraan politik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses ideologisasi terhadap kader DPC PDI Perjuangan Surabaya?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses ideologisasi terhadap kader DPC PDI Perjuangan Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami mengenai proses ideologisasi terhadap kader DPC PDI Perjuangan Surabaya.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses ideologisasi terhadap kader DPC PDI Perjuangan Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis penelitian ini adalah untuk menguji teori yang ada dalam proses ideologisasi kader terhadap kader DPC PDI Perjuangan Surabaya.
2. Manfaat Praktis penelitian ini adalah dapat menjadi acuan partai lain dalam

²⁰ Indra Akuntoto, *Fanatisme Versus Rasionalitas Pemilih PDIP*, diakses dari <https://bit.ly/3HQJz5B>, pada tanggal 22 Desember 2022, pukul 1.26

menganalisa faktor yang menghambat maupun mendukung proses kaderisasi.

E. Definisi Konseptual

1. Ideologi

Ideologi dapat diartikan sebagai gagasan yang mewakili aspirasi maupun kebutuhan sosial dari individu, kelompok, dan budaya. Ideologi juga merupakan doktrin dan prinsip yang dipercaya oleh suatu kelompok. Raymond Williams memberikan definisi ideologi sebagai bentuk yang relatif normal dan formal yang juga berkaitan dengan sistem makna, nilai-nilai dan kepercayaan, yang diabstraksikan sebagai sebuah pandangan dunia.²¹

Dalam sejarah partai di Indonesia pada awalnya setiap partai memiliki ideologinya masing-masing, seperti PPP dan Partai NU menggunakan Islam Nasionalis sebagai ideologinya, Masyumi dengan Islamnya serta dan PDI Perjuangan sendiri memiliki Marhaenisme sebagai jatidiri dan ide yang digagas oleh Soekarno.

Ideologi merupakan suatu nilai yang dipunyai oleh suatu masyarakat yang mengatur bagaimana tingkah laku mereka dalam bermasyarakat. Maka menurut Alfian, ideologi harus memiliki dimensi realitas, dimensi idealism, dan dimensi fleksibilitas jika tidak ingin ditinggalkan oleh para pengikutnya. Dimensi realitas mengharuskan ideologi mempunyai nilai-nilai yang bermakna dalam kehidupan masyarakat, sedangkan dimensi idealisme mengatur tentang ke arah mana mereka ingin membangun kehidupan dan dimensi fleksibilitas

²¹ Felix Tawaang dan Hasyim Ali Imran, Ideologi dan Wacana Media (Studi Ideologi Media Pemilik Akun Medsos), *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 21, No. 1, 2017, 60-61.

mengharuskan ideologi dapat mempengaruhi dan menyesuaikan perkembangan masyarakat.²²

2. Kaderisasi

Partai politik tentu tidak bisa dipisahkan dengan sistem kaderisasi karena partai harus membentuk kader dengan pendidikan politik secara menyeluruh juga meregenerasi sumber daya manusia partai. Kaderisasi sendiri mempunyai tiga unsur seleksi, penempatan, dan orientasi yang menjadi poros dari tujuan kaderisasi itu sendiri.²³ Lalu Mangkubumi dalam Qodir dan Sarbiran, menjelaskan mengenai unsur seleksi merupakan aspek pemberian pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kader. Penempatan yang dilakukan oleh kader berupa penugasan kader seperti melibatkan kader dalam kegiatan organisasi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan secara langsung.²⁴

Dan unsur yang terakhir adalah kewajiban partai untuk mengarahkan karir kader dengan memberikan tanggung jawab seperti menjadikan kader sebagai calon kepala daerah maupun calon legislatif, bisa juga mendistribusikan kader terhadap posisi-posisi strategis di pemerintahan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh kader.

PDI Perjuangan sebagai partai besar tentu memiliki sistem kaderisasi yang

²² Afriadi S. Hasibuan dan Djoko Sulistyono, Peranan Ideologi dalam Integrasi Nasional, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2018, 3-4.

²³ M. Saiful Haq Al Faruqy, Ahmad Sarbini, dan Asep Iwan Setiawan, Model Kaderisasi Anggota Partai Politik Islam dalam Membentuk Pemimpin Islami, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 2, No. 2, 2017, 105.

²⁴ Titi Fitrianita dan Zulia Antan Ambarsari, Menakar Kaderisasi KAMMI Komisariat Universitas Brawijaya Malang. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 3, No. 1, 2018, 19.

sistematis dengan mengandalkan organisasi sayap seperti Banteng Muda Indonesia untuk merekrut kader baru. PDI Perjuangan juga menjadi partai yang percaya terhadap kualitas kadernya sendiri, terbukti dengan banyaknya kepala daerah dan juga posisi strategis pada pemerintahan era Jokowi yang dihuni oleh kader PDI Perjuangan.

3. Partai Politik

Menurut Sigmund Neuman, partai politik merupakan wadah dari aktivitas politik yang memiliki upaya terhadap perubahan kekuasaan serta merebut dukungan dari masyarakat dengan melakukan persaingan terhadap suatu golongan lain yang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda.²⁵

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau biasa disebut PDI-P adalah salah satu partai politik di Indonesia yang memiliki basis massa dan kader yang menyebar hamper di seluruh pelosok negeri. PDI Perjuangan menjadi partai penerus dari Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh presiden pertama dan sang revolusioner yakni Soekarno pada 4 Juli 1927.²⁶

Pemikiran dan sikap politik Soekarno disebut sebagai Marhaenisme dan dijadikan sebagai dasar ideologi yang dianut oleh PDI Perjuangan. Garis ideologi yang tegas dimiliki oleh PDI Perjuangan, Marhaenisme sebagai prinsip politik Soekarno menjadi ajaran yang wajib dianut oleh kader PDI Perjuangan sehingga meniru dan menerapkan apa yang diajarkan dan ideologi

²⁵ Harold Y. Pattiasina. Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah Pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 19, No. 1, 2015, 19.

²⁶ PDIP, "Sejarah PDI Perjuangan", diakses dari <https://bit.ly/3Vp40Kk> , pada 22 Desember 2022, pukul 2.04

Pancasila sebagai dasar ideologi dalam bermasyarakat dan bernegara.

4. Politik Lokal

Politik lokal merupakan bagian dari sistem politik yang dijalankan oleh negara, politik lokal secara umum tidak dapat dipisahkan dengan konteks politik nasional karena adanya sistem desentralisasi. Sedangkan menurut CSIS (2001) politik lokal adalah dinamika yang dialami oleh institusi politik di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat serta berperan maksimal terhadap fungsi yang dijalankan oleh masing-masing institusi.²⁷

Pemerintah daerah dan DPRD masuk ke dalam kategori supra struktur politik, yang mana di Surabaya tentu PDI Perjuangan sudah lama menguasai kedua institusi politik tersebut. Pilkada 2020 tentu menjadi ajang pembuktian PDI Perjuangan sebagai penguasa Kota Surabaya, dengan Eri Cahyadi yang baru menjadi kader serta mendapatkan penolakan dari internal partai di tingkat cabang mampu memenangkan kontestasi politik melawan Mahfud yang didukung oleh beberapa partai koalisi.²⁸

²⁷ BAPPENAS, “*Politik Lokal Terhadap Efektivitas Pemerintahan Daerah*” diakses dari <https://bit.ly/3ZnhY2r>, pada 10 Januari 2023, pukul 21.25

²⁸ Sholihatus Ulfa, Warsono, Strategi Calon Walikota Surabaya 2020 Eri Cahyadi dan Armuji dalam Memenangkan Pilwali Di Surabaya, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 3, 2022, 493.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tahap untuk menentukan judul skripsi, dengan adanya pra riset sebelum melakukan penelitian. Pra riset yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu yaitu mengumpulkan dokumen, jurnal, maupun penelitian serupa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. PDI Perjuangan Surabaya sebagai obyek yang akan diteliti mempunyai sesuatu yang unik untuk diteliti, PDI Perjuangan menjadi partai yang paling berkuasa di Surabaya. Beberapa pemilu terakhir mereka mampu menguasai lembaga legislatif dan eksekutif yang ada di Surabaya, yang mana hal tersebut menarik rasa ingin tahu peneliti untuk menjabarkan proses kaderisasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Surabaya untuk memenangkan pemilu yang ada di kota tersebut.

Penelitian terdahulu akan diulas dan dijelaskan dengan menjabarkan penulis, judul, rumusan masalah, teori yang digunakan, metode penelitian, hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut, serta tanggapan peneliti terkait persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti.

Pada topik penelitian ini telah dilakukan juga beberapa penelitian dengan topik serupa yakni terkait ideologisasi dan kaderisasi partai, yang pertama yakni penelitian dari Fandi Ahmad Sintani, Wahab Tuanaya, Marno Wance yang berjudul *“Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif Pada Partai Politik (Studi DPD Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019)”*. Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah mengenai sistem kaderisasi dan pertimbangan

penetapan calon anggota legislatif yang diselenggarakan oleh DPD Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan informan dari pimpinan partai serta data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur maupun observasi langsung. Penelitian tersebut menggunakan teori kaderisasi politik yang mana menurut Miriam Budiardjo partai yang memiliki kader dengan pengetahuan yang baik dan mempunyai kualitas akan memberikan inovasi terhadap kemajuan partai. Sedangkan sistem kaderisasi dengan pendidikan politik sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menghasilkan para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi terhadap masyarakat luas. Adapun beberapa tahapan kaderisasi yang harus diikuti oleh kader yaitu tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Dan yang terakhir adalah adanya beberapa pertimbangan untuk menentukan calon legislatif, juga menjelaskan mengenai strategi partai dalam menjaga kader agar tidak pindah ke partai lain.²⁹

Setelah beberapa pemaparan ditemukan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai kaderisasi partai. Namun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut membahas mengenai mekanisme kaderisasi baik secara tahapan maupun dampak dari kaderisasi tersebut terhadap Partai Nasional Demokrat, sedangkan penulis akan membahas terkait internalisasi ideologi yang dilakukan PDI Perjuangan terhadap kader sehingga menimbulkan

²⁹ Fandi Ahmad Sintani, Wahab Tuanaya, Marno Wance, Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif Pada Partai Politik (Studi DPD Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 19, No. 1, 2020, 76-88

kader-kader yang mempunyai jiwa militan.

Pada topik penelitian kedua dari Gili Argenti yang berjudul “*Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia*”. Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah mengenai pergeseran ideologi partai dari formalis ke substansi, internalisasi ideologi Masyumi di Indonesia, juga melihat pengaruh Masyumi terhadap gerakan politik Islam. Penelitian tersebut menggunakan metode studi literatur dengan cara menelaah buku, catatan, manuskrip dan diuji serta dianalisa secara kritis agar mendapatkan validitas sumber data. Penggunaan tiga konsep teori politik seperti partai politik Islam, ideologi politik, dan relasi Islam dengan negara sebagai teori untuk mengupas ideologi serta praksis politik dari Masyumi. Masyumi memiliki tujuan besar untuk melaksanakan cita-cita Islam dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Tetapi keyakinan ideologis Partai Masyumi bukan anti toleransi namun mereka memiliki batas yang jelas dengan saling menghargai tanpa mengorbankan akidahnya. Pertarungan ideologi Islam melawan ideologi nasionalis menimbulkan pergeseran orientasi ideologi Partai Masyumi dari formalis bergeser ke arah substansi. Pergeseran ini merupakan pilihan pragmatis karena kelompok nasionalis tidak bisa menerima Islam sebagai dasar negara, sehingga Masyumi menerima Pancasila untuk menghindari kebuntuan di Konstituante. Konsensus yang terjadi terhadap partai politik Islam akibat dari berakhirnya sistem parlementer, termasuk Masyumi di dalamnya. Masyumi juga mendirikan Lembaga Dakwah Kampus (LDK), para aktivis lembaga tersebut yang mendirikan Partai

Keadilan Sejahtera.³⁰

Setelah beberapa pemaparan ditemukan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai ideologisasi partai. Namun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut ideologisasi Masyumi bukan kepada kader melainkan kepada negara, dan sistem yang ada di dalamnya sedangkan pada penelitian penulis ideologisasi hanya terhadap kader partai.

Pada topik penelitian ketiga dari Retor Kaligis yang berjudul "*Nasionalisme dan Kelas Sosial: Ideologi dan Praktik Partai Nasionalis di Indonesia*". Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah mengenai dinamika kekuasaan serta peran partai politik nasionalis terhadap kepentingan rakyat kecil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara terbuka terhadap sejumlah tokoh, juga melalui telaah pustaka, berupa dokumen, artikel, jurnal, berita, buku, dan sumber tertulis lainnya. Teori Marxisme pada penelitian tersebut berguna sebagai inspirasi atas Marhaenisme yang digaungkan oleh Soekarno, namun sedikit berbeda dengan konsep Marx. Peran partai nasionalisme tidak begitu banyak terhadap kepentingan rakyat kecil pada era orde baru, namun ada sedikit perubahan pasca reformasi yang mana partai nasionalis seperti PDI Perjuangan berperan membangun struktur politik yang demokratis. Adanya kebebasan buruh untuk berorganisasi juga produk dari kader PDI Perjuangan Jacob Nuwa ketika menjabat sebagai Menteri. Pasca reformasi, petani dan nelayan juga terbantu oleh PDI Perjuangan karena mampu mengontrol harga pupuk, serta membatasi impor beras

³⁰ Gili Argenti, Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 5, No. 1, 2020, 43-55.

dan membangun stasiun bahan bakar untuk nelayan.³¹

Setelah beberapa pemaparan ditemukan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai partai nasionalis seperti PDI Perjuangan. Namun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut mempunyai topik pembahasan mengenai peran partai nasionalis terhadap kepentingan rakyat kecil sedangkan penulis mempunyai topik mengenai internalisasi ideologi.

Pada topik penelitian keempat dari Else Suhaimi yang berjudul "*Pola Rekrutmen Politik Berdasarkan Ideologi Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*". Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah mengenai pola rekrutmen partai politik dengan berbagai ideologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah studi literatur dengan cara menelaah buku, catatan, dan manuskrip. Penggunaan teori pemikiran politik Islam dan nasionalisme sebagai konsep pertimbangan rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik. Kaderisasi yang menggunakan Islam sebagai konsep dilakukan secara sistematis dan bertahap yang ditujukan untuk membentuk kader partai yang gigih dan mampu mensyiarkan dakwah partai. Sedangkan kaderisasi partai nasionalis membentuk kadernya untuk mencintai negara dan mendahulukan kepentingan masyarakat, tetapi seringkali dalam prakteknya justru jauh dari sifat nasionalis yang lebih mendahulukan kepentingan kelompok sendiri.³²

Setelah beberapa pemaparan ditemukan persamaan penelitian tersebut

³¹ Retor Kaligis, Nasionalisme dan Kelas Sosial: Ideologi dan Praktik Partai Nasionalis di Indonesia, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 27, No. 2, 2014, 81-83.

³² Else Suhaimi, Pola Rekrutmen Politik Berdasarkan Ideologi Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 1, 2018, 114-117.

dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai ideologi dalam sistem kepartaian. Namun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut mempunyai topik pembahasan mengenai pola rekrutmen dan kaderisasi yang diselenggarakan oleh partai dengan ideologi Islam dan partai dengan ideologi selain Islam (Nasionalis) sedangkan penulis mempunyai topik mengenai internalisasi ideologi oleh partai nasionalis.

Pada topik penelitian kelima dari Ghiffary Asy Syaukani dan Fitriyah yang berjudul “*Pragmatisme Kaderisasi Internal DPP Partai Golkar Era Reformasi (Studi Kasus di DPP Partai Golkar)*”. Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pragmatisme dalam kaderisasi internal di DPP Partai Golkar era reformasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu berusaha menjelaskan secara detail apa yang terjadi. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kaderisasi, rekrutmen, dan partai politik. Pragmatism kaderisasi yang dilaksanakan Partai Golkar ditimbulkan oleh internal partai yang hanya peduli terhadap eksistensi partai sehingga tidak memperhatikan kualitas kader. Fungsi partai sebagai sarana pendidikan politik juga terabaikan, padahal fungsi tersebut akan melahirkan kader terbaik yang ke depannya bisa memperbaiki citra partai.³³

Setelah beberapa pemaparan ditemukan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai kaderisasi partai. Namun

³³ Ghiffary Asy Syaukani dan Fitriyah, Pragmatisme Kaderisasi Internal DPP Partai Golkar Era Reformasi (Studi Kasus di DPP Partai Golkar), *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 9, No. 3, 2020.

perbedaannya adalah pada penelitian tersebut mempunyai topik pembahasan mengenai pragmatism kaderisasi dan dampak buruknya terhadap Partai Golkar sedangkan penulis mempunyai topik mengenai proses ideologisasi terhadap kader PDI Perjuangan.

Pada topik penelitian keenam dari Miman Nurdiaman, Sartibi Bin Hasyim, R. Ade Purnawan dan Kalamullah yang berjudul “*Analisis Proses Kaderisasi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Garut*”. Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah mengenai proses kaderisasi yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Garut dan menganalisa faktor yang menghambat proses kaderisasi tersebut. Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif menjadi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kaderisasi, karena proses kaderisasi bertujuan untuk membentuk kader yang memahami nilai-nilai dalam sistem politik. Faktor yang menghambat pelaksanaan kaderisasi adalah terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana teknis. Keterbatasan tersebut terjadi karena tidak adanya rencana tindak lanjut pasca kaderisasi untuk membentuk tim pelaksana kaderisasi selanjutnya.³⁴

Setelah beberapa pemaparan ditemukan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai kaderisasi PDI Perjuangan. Namun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut mempunyai topik

³⁴ Miman Nurdiaman, Sartibi Bin Hasyim, R. Ade Purnawan dan Kalamullah, Analisis Proses Kaderisasi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Garut, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2019, 27-31.

pembahasan mengenai mekanisme proses kaderisasi dan faktor yang menghambat kaderisasi di Kabupaten Garut sedangkan penulis mempunyai topik mengenai proses ideologisasi di Kota Surabaya.

Pada topik penelitian ketujuh dari Iswandi yang berjudul “*Studi Gerakan Ideologi Partai Politik Pada Pemilu 2019*”. Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah mengenai polemik klasik yakni pertarungan ideologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah studi literatur dengan cara menelaah buku, catatan, dan manuskrip. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik dan ideologi, teori politik itu sendiri sebagai metode dalam mengatasi problematika yang ada di masyarakat. Kontestasi politik pada pemilu 2019 dilabeli dengan politik agama, karena pemilih telah terhegemoni oleh isu sehingga menimbulkan sikap fanatik dan saling membenci. Terjadinya krisis moral seperti saling menuduh dengan label PKI dan Islam radikal pada kontestasi politik tersebut terjadi karena terlalu fanatik dan minimnya pendidikan politik. Fungsi ideologi partai politik harus diteliti agar isu agama tidak terulang kembali.³⁵

Setelah beberapa pemaparan ditemukan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai ideologi partai. Namun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut mempunyai topik pembahasan mengenai pertarungan ideologi dengan isu agama yang terjadi pada pemilu 2019, sedangkan penulis mempunyai topik mengenai proses ideologisasi di Kota

³⁵ Iswandi, Studi Gerakan Ideologi Partai Politik Pada Pemilu 2019, *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 7, No. 1, 2020, 4-19.

Surabaya.

Pada topik penelitian kedelapan dari Hasnu dan Firdaus Syam yang berjudul “*Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme PDIP dan Islam Moderat PKB*”. Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah mengenai analisa terhadap ideologi politik Marhaenisme PDI Perjuangan dan Islam moderat PKB dalam setiap kebijakan dan perilaku politik yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif-kualitatif yang merupakan penafsiran sebuah realitas dari konstruksi sosial. PDI Perjuangan memiliki sejarah politik dengan ideologi marhaenisme sebagai manifestasi ajaran Soekarno dan PKB dengan Islam Moderat ajaran Gus Dur. Namun kedua ajaran tersebut tidak sejalan dengan keputusan politiknya yang seringkali tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat kecil. Adanya kesenjangan harapan antara ideologi politik dengan kebijakan politik, karena besarnya perilaku politik yang cenderung tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat kecil. Faktor tersebut terjadi karena partai politik gagal melakukan sosialisasi politik terhadap kadernya seperti kebijakan politik pro rakyat dan anti korupsi.³⁶

Setelah beberapa pemaparan ditemukan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai ideologisasi partai. Namun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut memiliki dua objek analisa yaitu ideologi Marhaenisme PDIP dan Islam Moderat PKB yang keduanya tidak berjalan dengan mulus karena masih banyak kader partai yang tidak berpihak terhadap

³⁶ Hasnu dan Firdaus Syam, *Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme PDIP dan Islam Moderat PKB*, *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 3, No. 7, 2021.

kepentingan rakyat sedangkan penulis mempunyai topik mengenai proses ideologisasi dengan satu objek di Kota Surabaya.

Pada topik penelitian kesembilan dari Salie dan Dwi Winurti yang berjudul “*Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik*”. Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah mengenai analisa terhadap pergeseran peran ideologi pada partai politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah studi literatur dengan cara menelaah buku, catatan, dan manuskrip. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai politik dan ideologi. Kemunculan partai politik adalah salah satu unsur perubahan yang dialami Indonesia pada masa reformasi, perubahan juga terjadi pada asas tunggal partai politik yang menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologi. Adanya pemilihan langsung terhadap kepala daerah memeriahkan kontestasi politik di Indonesia, namun hal tersebut berdampak pada tersingkirnya ideologi karena peran ketokohan yang menjadi pertimbangan masyarakat. Pergeseran peran ideologi yang seharusnya dijadikan landasan oleh kader justru dijadikan konten pencitraan, ideologi kemudian hanya menjadi alat pelengkap dari partai politik karena kalah oleh kepentingan pribadi elit partai.³⁷

Setelah beberapa pemaparan ditemukan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai ideologisasi partai. Namun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut memiliki topik mengenai pergeseran peran ideologi terhadap partai yang semakin terkikis oleh kepentingan elit partai, sedangkan penulis menjadikan ideologi sebagai landasan kader dalam melakukan

³⁷ Salie dan Dwi Winurti, *Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. VIII, No. 2, 2020, 141-151.

perilaku politiknya.

Pada topik penelitian kesepuluh dari Wiwin Kurniasih dan Turtiantoro yang berjudul “*Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Provinsi Jawa Tengah*”. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah mengenai adanya kebijakan yang masih bersifat normatif karena tidak menjadikan ideologi sebagai pedoman dalam setiap pengambilan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif dengan instrumen wawancara dan telaah dokumen dalam pengumpulan data. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai politik dan ideologi. Ideologi Marhaenisme terbukti sebagai dasar perjuangan dalam konsep kerja organisasi, namun realitas di lapangan adalah pemahaman Marhaenisme hanya dijadikan sebagai dasar perjuangan yang terbatas dengan tataran informatif tanpa melibatkan perasaan dan nilai dalam setiap tindakannya. Hal tersebut berimbas kepada kurangnya memahami secara konseptual mengenai Marhaenisme sehingga nilai ideologis yang ada di dalamnya tidak berjalan dengan baik.³⁸

Setelah beberapa pemaparan ditemukan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai ideologi PDI Perjuangan. Namun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut memiliki memiliki studi kasus di Jawa Tengah sedangkan penulis di Surabaya, topik pembahasan juga

³⁸ Wiwin Kurniasih dan Turtiantoro, Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Provinsi Jawa Tengah, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 8, No. 1, 2019.

berbeda karena penelitian tersebut menganalisa terkait kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai ideologis Marhaenisme.

Pada topik penelitian kesebelas dari Erfina Nurussa'adah dan Suwandi Sumartias yang berjudul "*Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Keterbukaan Ideologi*". Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah mengenai komunikasi politik PKS dalam keterbukaan ideologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif dengan studi etnografi komunikasi. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori interaksi simbolik milik George Herbert Mead. Adanya komunikator politik baik dari internal maupun eksternal PKS adalah jenis komunikasi politik dalam keterbukaan ideologi yang dimiliki oleh PKS. Komunikasi juga melibatkan kader, simpatisan, serta masyarakat Jawa Barat sebagai komunikan sedangkan komunikator menyampaikan komunikasi politiknya melalui pesan verbal dan non verbal. Pola komunikasi organisasi adalah bentuk komunikasi politik yang digunakan dalam keterbukaan ideologi oleh DPW PKS Jawa Barat, hal tersebut dapat berupa pidato serta arahan yang mana hal tersebut merupakan bentuk dari retorika, propaganda serta kampanye politik.³⁹

Setelah beberapa pemaparan ditemukan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai kepartaian. Namun perbedaan partai menjadi pembeda karena peneliti tersebut menggunakan PKS sebagai studi kasus, juga mempunyai topik mengenai keterbukaan ideologi yang menjadikan pola

³⁹ Erfina Nurussa'adah dan Suwandi Sumartias, Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Keterbukaan Ideologi, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 5, No. 1, 2017, 44-45.

komunikasi harus menjadi lebih baik sedangkan penulis mempunyai topik mengenai ideologisasi oleh PDI Perjuangan terhadap kadernya.

Pada topik penelitian keduabelas dari Doni Andhika Kusuma dan Supriyanto yang berjudul “*Pengaruh Ideologi Partai Politik Dan Nilai-Nilai Kepribadian Anggota Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pendidikan Di DPRD Kota Surabaya*”. Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah mengenai peran ideologi partai politik dan nilai kepribadian terhadap proses pengambilan kebijakan pendidikan di DPRD Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis data regresi ganda, analisis uji T dan uji F. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori partai politik dan nilai kepribadian. Ideologi partai politik dan nilai kepribadian memiliki pengaruh sebesar 54,1% terhadap proses pengambilan kebijakan pendidikan di DPRD Kota Surabaya. Artinya aktor politik di DPRD Surabaya akan tetap memandang ideologi partai politik yang dianut selama hal tersebut tidak bertentangan terhadap kepentingan rakyat.⁴⁰

Setelah beberapa pemaparan ditemukan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai ideologi partai. Namun perbedaannya adalah metode penelitian menggunakan kuantitatif karena menganalisa mengenai peran ideologi terhadap pengambilan kebijakan, sedangkan penulis mempunyai topik mengenai proses ideologisasi dan menggunakan metode

⁴⁰ Doni Andhika Kusuma dan Supriyanto, *Pengaruh Ideologi Partai Politik Dan Nilai-Nilai Kepribadian Anggota Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pendidikan Di DPRD Kota Surabaya*, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, 2020, 1-5.

kualitatif.

Pada topik penelitian ketigabelas dari Ach. Basyir yang berjudul *“Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Antara Gerakan Tarbiyan dan Pragmatisme”*. Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah mengenai pragmatisme yang dialami oleh partai politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah studi literatur dengan cara menelaah buku, catatan, dan manuskrip. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori partai politik dan ideologi. Partai politik yang memiliki ideologi Islam seperti PKS lebih memilih mengangkat isu populis dibanding mempertarungkan nilai ideologinya. Adanya kepentingan politik praktis dan memiliki orientasi hanya kepada upaya mendapatkan kekuasaan menjadi penyebab mengapa partai-partai Islam semakin mendekati diri dan terbuka dengan partai yang berideologi sekuler maupun nasionalis.⁴¹

Setelah beberapa pemaparan ditemukan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai ideologi partai. Namun perbedaannya adalah penelitian menggunakan PKS sebagai studi kasus dari topik lunturnya ideologi partai politik, sedangkan penulis mempunyai topik mengenai proses ideologisasi terhadap kader partai PDI Perjuangan.

Pada topik penelitian keempatbelas dari I Kadek Dede Junaedy dan I Nyoman Wiratmaja yang berjudul *“Peran Kaderisasi DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Bangli”*. Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah

⁴¹ Ach. Basyir, *Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Antara Gerakan Tarbiyan dan Pragmatisme*, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 2, 2014, 239-256.

mengenai peran kaderisasi DPD Golkar di Kabupaten Bangli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis data kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan teori partai politik dan kaderisasi. Rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Golongan Karya di Kabupaten Bangli diadakan setiap 6 bulan sekali, untuk mendapatkan anggota baru sebelum menjadi kader partai. Meskipun proses kaderisasi tidak selalu berjalan dengan lancar karena kurangnya pemahaman kader terhadap Ideologi yang dianut oleh partai. Banyaknya tingkatan kaderisasi menjadi hambatan dalam mengikuti pendidikan politik yang mana hal tersebut membuat kader partai bosan dan berdampak pada partai kesulitan merekrut calon kader dari internal partai. Dengan adanya beberapa permasalahan maka sangat diperlukan evaluasi untuk memperbaiki citra partai ke depannya.⁴²

Setelah beberapa pemaparan ditemukan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai kaderisasi partai. Namun perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan Partai Golkar sebagai studi kasus, sedangkan penulis menggunakan studi kasus PDI Perjuangan.

Pada topik penelitian kelimabelas dari Septi Nur Wijayanti¹ dan Kelik Iswandi yang berjudul "*Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia*". Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah mengenai peran organisasi sayap partai politik dalam kaderisasi. Metode penelitian

⁴² I Kadek Dede Junaedy dan I Nyoman Wiratmaja, Peran Kaderisasi DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Bangli, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 1, 2019, 8-11.

yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode normatif yuridis dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan teori partai politik dan kaderisasi. Sistem kaderisasi yang belum jelas menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik sehingga rekrutmen politik menjadi lebih transparan dan sistematis. Pilar utama partai dalam menyeleksi pimpinan nasional tidak berfungsi karena partai tidak mampu menjalankan sistem kaderisasi dengan baik, sehingga banyak partai kekurangan kader berkualitas. Merawat organisasi sayap partai dengan baik menjadi solusi atas permasalahan tersebut, karena akan mempermudah penanaman ideologi partai dan menjadi wadah kader sebelum terjun ke partai.⁴³

Setelah beberapa pemaparan ditemukan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai kaderisasi partai. Namun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas peran dari organisasi sayap sebagai sarana penanaman ideologi, sedangkan penulis membahas ideologisasi terhadap kader partai.

Secara umum, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana proses kaderisasi yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya untuk menghasilkan kader yang solid dan militan terhadap partai. Persamaan pada penelitian terdahulu secara umum memiliki topik yang sama yakni mengenai ideologisasi maupun proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai, penggunaan teori politik dan kaderisasi secara umum juga menjadi persamaan di dalam penelitian

⁴³ Septi Nur Wijayanti¹ dan Kelik Iswandi, Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia, *Jurnal SASI*, Vol. 27, No. 4, 475-483.

terdahulu. Namun beberapa perbedaan tentu menyertai, perbedaan yang mencolok adalah perbedaan partai yang berimbang terhadap budaya partai yang berbeda dalam proses kaderisasi, juga lokasi penelitian yang berbeda pula menjadi perbedaan di dalam penelitian terdahulu.

B. Kerangka Teori

1. Kaderisasi

1.1 Pengertian Kaderisasi

Kehidupan sosial perlu dikelola untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Di dalam sebuah organisasi maupun partai, perlu adanya proses kaderisasi untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Kaderisasi sendiri juga mempunyai fungsi untuk mencetak calon pemimpin yang siap melanjutkan perjuangan dari sebuah partai maupun organisasi yang diikutinya, sehingga proses kaderisasi menjadi nyawa dari suatu partai itu sendiri.

Istilah kaderisasi berasal dari kata *carde* (sebuah istilah militer) sebagai pembinaan terhadap pasukan inti. Menurut Bung Hatta, kaderisasi merupakan kerangka dari suatu bangsa karena kaderisasi sendiri berarti menanam nilai-nilai terhadap kader yang hal tersebut membentuk dan menjadikan kader sebagai pemimpin bangsa di masa depan.⁴⁴ Secara umum, kader adalah seseorang yang dipersiapkan untuk memegang peran penting dalam sebuah

⁴⁴ Insan Harapan Harahap, Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional, *Jurnal Politik LIPI*, 2017, 2.

organisasi maupun partai dengan berbagai pengalaman yang ia miliki dari sebuah proses kaderisasi.

Unsur terpenting dalam suatu partai adalah sumber daya manusia yang mana di dalam suatu partai terdapat sekelompok manusia yang memahami nilai-nilai dan memiliki tujuan bersama. Adanya tujuan tentu mengharuskan suatu kelompok untuk membentuk struktural agar semua berjalan dengan peran dan fungsinya masing-masing, dalam hal ini partai memerlukan pemimpin untuk menentukan mana yang terbaik untuk partai mereka. Sedangkan kaderisasi sendiri sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan karena untuk membentuk seorang pemimpin yang baik perlu adanya peningkatan sumber daya yang berkualitas, proses tersebut yang dinamakan sebagai kaderisasi.⁴⁵ Dalam proses kaderisasi, sifat dan sikap akan terbentuk seiring dengan berjalannya waktu sehingga kader diharapkan menjadi pribadi yang sesuai dengan tujuan partai.

Sejalan dengan hal tersebut, kader partai perlu dilatih dengan berbagai keterampilan agar memiliki kemampuan di atas masyarakat pada umumnya dan sebagai langkah untuk menyiapkan sumber daya manusia agar kelak memiliki kemampuan untuk membangun peran dan fungsi partai menjadi lebih baik. Kaderisasi juga memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai yang dimiliki oleh kader dan meningkatkan pengetahuan kader terhadap sistem politik yang ada di partai.

⁴⁵ Andri Prayogi, Saeful Anwar, dan Moch. Fakhruroji, Peran Kepemimpinan Yayasan Pembina Masjid dalam Proses Kaderisasi Mahasiswa, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1 No. 3, 2016, 287.

PDI Perjuangan sebagai obyek penelitian memiliki slogan khusus yakni “*partai ne wong cilik*”. Slogan tersebut mengharuskan PDI Perjuangan untuk memiliki kader yang pro terhadap kepentingan rakyat kecil, dan untuk membentuk kader yang sesuai dengan keinginan partai tentu perlu diadakannya sebuah kaderisasi politik untuk mencapai hal tersebut. Kaderisasi selain sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kader, juga mempunyai peran sebagai proses regenerasi dan penanaman ideologi.⁴⁶ Proses regenerasi menjadi penting karena semakin tua usia maka semakin menurun kualitas berpikirnya sehingga partai membutuhkan pemuda dengan pemikiran yang masih sesuai dengan perubahan zaman.

Perlu adanya pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik untuk menjamin keberlangsungan partai, dalam hal ini proses kaderisasi merupakan persiapan untuk menjadi penerus yang harus mengikuti tahapan yang ditentukan mulai dari seleksi, pemantuan, kaderisasi dan penempatan. Suatu partai akan terasa sulit untuk bergerak dan melakukan tugas dengan baik tanpa adanya kaderisasi. Sehingga kaderisasi menjadi sebuah proses yang sangat diperlukan dan harus dilakukan oleh setiap partai untuk membentuk kader dalam upaya mencapai apa yang menjadi tujuan partai.⁴⁷ Perkembangan zaman yang sangat masif juga menjadikan proses kaderisasi harus mengalir dan mengikuti segala perkembangan yang mengharuskan

⁴⁶ Hasan Ismail dan Indah Murti, Implementasi Kaderisasi DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 2, 2018, 1064.

⁴⁷ Farid Noviard, Kaderisasi kepemimpinan Pambakal (Kepala Desa) di Desa Hamalau Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Jurnal Politik dan Pemerintahan Lokal*, Vol. II, Edisi. 2, 2013, 267.

kader untuk lebih aktif dan berwawasan luas.

1.2 Konsep Kaderisasi

Proses kaderisasi akan menjadi penghubung antara masa kini dan masa depan, yang berarti jika pemimpin tua tidak melaksanakan proses kaderisasi maka akan terputus generasinya. Hal tersebut terjadi karena pemimpin tua tidak mau mewariskan ilmu terhadap generasi selanjutnya, sehingga kesuksesan yang diraih hanya akan menjadi cerita dan tidak bisa lagi diraih di masa depan.⁴⁸ Teori kaderisasi Menurut Veithzal Rivai dalam melaksanakan proses kaderisasi terdiri dari dua macam, yaitu kaderisasi informal dan kaderisasi formal.⁴⁹ Teori tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi pada PDI Perjuangan, menurut AD/ART juga demikian yakni proses ideologisasi terbagi menjadi dua sesuai dengan teori kaderisasi tersebut.

Kaderisasi informal adalah proses kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia di lingkungan masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat terhadap lingkungan ketika masa kecil, remaja, bahkan hingga dewasa sebagai proses membentuk sifat dan sikap yang ada di dalam diri sehingga memiliki kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mengembangkan kepribadian positif perlu adanya didikan dari orang tua dan guru yang mendidik dengan sisi intelektual yang dimilikinya. Sehingga generasi yang berbeda tersebut sama-sama aktif dalam menjalankan

⁴⁸ Saiful Falah, Pendidikan Kepemimpinan M. Natsir dan Implementasinya di Lembaga Pendidikan, *Jurnal Edukasi Islam*, Vol. 4, No. 8, 2015.

⁴⁹ Rahmat Santosa, Skripsi: *Pola Kaderisasi dalam Rangka Peningkatan Daya Saing PDI Perjuangan di DPC PDI Perjuangan Sleman*. (Yogyakarta: UNY, 2017), 70.

proses kaderisasi yang membentuk akhlak dan kepribadian menjadi lebih baik karena kaderisasi informal sangat berpengaruh terhadap hal tersebut.

Kaderisasi informal memiliki beberapa ciri khusus dalam memperlihatkan hasil dari proses tersebut seperti memiliki kepribadian yang positif, memiliki sifat yang loyal, berdedikasi tinggi terhadap apa yang ia ikuti, dan pasrah terhadap Tuhan.

Kaderisasi informal pada dasarnya adalah lanjutan dari kaderisasi formal yang mana hal tersebut adalah implementasi dari apa yang didapat pada kaderisasi formal dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kaderisasi informal menjadikan masyarakat awam sebagai objek karena pengetahuan politiknya yang masih rendah sehingga kader yang sudah terdidik pada tahap kaderisasi formal diwajibkan untuk meneruskan ideologi partai hingga sampai kepada masyarakat.⁵⁰ Sosialisasi politik yang dilakukan oleh kader untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai untuk membantu permasalahan di tingkat daerah.

Kaderisasi Informal bisa juga sebagai gerakan untuk memenangkan suatu partai dalam perebutan kekuasaan, dengan demikian jika kader mampu melakukan sosialisasi politik dengan baik maka tugas yang diemban akan berhasil. Pada proses ini kader membentuk citra agar mampu menarik simpati masyarakat.

⁵⁰ DPD PDIP Jawa Timur, “ ‘Sambung Roso’, Cara Anas Karno Serap Aspirasi ‘Wong Cilik’ “, diakses dari <https://bit.ly/3l9rPsM> , pada tanggal 3 Februari 2023, pukul 0.35.

Berbeda dengan kaderisasi informal, kaderisasi formal mempersiapkan seorang kader untuk menjadi pemimpin dengan terencana, teratur dan sistematis. Kaderisasi formal dapat dilakukan oleh lembaga yang menjadikan sifat formal terasa kental pada sistem kaderisasi tersebut. Proses kaderisasi formal mengikuti kurikulum yang berisi pendidikan teoritis serta praktek tentang kepemimpinan yang sudah ditentukan sebelumnya dan dilaksanakan dengan jangka waktu yang ditentukan oleh panitia.

Ada tiga jenjang pengkaderan formal sesuai AD/ART yang dimiliki oleh PDI Perjuangan dan hal tersebut wajib dijalankan oleh seluruh pengurus dari DPP, DPD, DPC, hingga ke ranting. Pengkaderan formal PDI Perjuangan yang paling dasar adalah Pelatihan Kader Pratama yang diselenggarakan oleh DPC atau tingkat kabupaten/kota, lalu Pelatihan Kader Madya yang diselenggarakan oleh DPD atau tingkat provinsi, dan tahapan yang tertinggi adalah Pelatihan Kader Utama yang diselenggarakan oleh DPP atau pusat.⁵¹

Kaderisasi formal yang diselenggarakan memiliki konsep dengan bentuk pendidikan kader melalui materi dengan waktu dan tahapan yang berbeda di setiap jenjangnya. Pendidikan kelas juga diselenggarakan sampai tingkat paling bawah seperti pengkaderan yang dilaksanakan di desa-desa, hal tersebut sebagai upaya untuk mempercepat proses kaderisasi sehingga membentuk kader yang efisien. Adanya kader di tingkat desa juga semakin mempercepat penyebaran informasi dari pusat, baik itu dari DPP maupun dari

⁵¹ Lentera, “*DPD PDI Perjuangan Gelar Kaderisasi Partai Secara Online*”, diakses dari <https://bit.ly/3HmWNoM>, pada tanggal 3 Februari 2023, pukul 0.39.

pemerintah. Pengurus partai berharap terhadap hasil dari pendidikan kader berjenjang yang telah ditempuh oleh kader agar diaktualisasikan untuk kesejahteraan masyarakat.⁵² Pendidikan kader juga diharapkan mampu membentengi kader dari perbuatan menyimpang yang merugikan individu maupun kelompok.

1.3 Ideologisasi

Setiap partai politik tentu memiliki ideologi dan upaya penanamannya pada proses kaderisasi secara sistematis, karena partai tentu memiliki tujuan pada setiap ideologi yang ditanamkan terhadap kader. Peran ideologi yang dimiliki oleh partai politik sangat penting karena mengandung nilai-nilai dan makna dalam hidup bernegara. Ideologi juga memiliki peran dalam diri seorang penguasa sehingga mempengaruhi gaya kepemimpinan yang diterapkan ketika memimpin suatu pemerintahan. Singkatnya ideologi merupakan pemikiran yang didapatkan atas pengaruh dari individu atau kelompok dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁵³

Ideologi memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangannya, istilah ideologi pertama kali dicetuskan oleh Destutt de Tracy pada tahun

⁵² DPD PDIP Jawa Timur, “Jalankan Tugas Akhir Kaderisasi Pratama, Husen Bantu Warga Isoman, Panti Asuhan hingga Pedagang Nasi Boran”, diakses dari <https://bit.ly/3Hu5Og6> , pada tanggal 3 Februari 2023, pukul 0.41.

⁵³ Vhiasyah Raeinady dan Jagad Aditya Dewantara, Pemikiran Soekarno dalam Ajaran Marhaenisme, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2, 2021, 457.

1796.⁵⁴ Konsep ideologi yang dicetuskan oleh Karl Mannheim relevan dengan partai politik dan proses kaderisasi yang menjadi topik penelitian. Menurut Karl Mannheim ideologi merupakan ramalan terhadap masa depan, yang berarti bahwa ideologi berpacu terhadap suatu kondisi yang belum terjadi. Mannheim juga membagi ideologi menjadi dua macam, yaitu ideologi partikular dan ideologi total. Ideologi partikular merupakan ideologi yang dipahami oleh individu, sedangkan ideologi total adalah ideologi yang dimiliki oleh suatu kelompok.⁵⁵

PDI Perjuangan mengadopsi Ideologi Marhaenisme yang diajarkan oleh Soekarno pada masa perjuangannya melawan penjajah. Menurut Soekarno marhaen merupakan masyarakat yang terasingkan secara ekonomi, baik memiliki alat produksi atau tidak. Kemiskinan yang terjadi akibat dari eksploitasi masyarakat dengan upah murah, sehingga Soekarno membuat pemikiran tentang marhaenisme untuk melawan kapitalisme secara ekonomi dan imperialisme dalam bernegara.⁵⁶ PDI Perjuangan menjadikan ideologi tersebut untuk memasarkan citra partai dengan pasar dari ideologi yang kebanyakan dari masyarakat menengah ke bawah sehingga PDI Perjuangan mampu menguasai suatu pemerintahan karena banyaknya masyarakat kecil yang ada di Indonesia dan PDI Perjuangan mampu meraup suara darinya.

⁵⁴ Bayu Panji Bangsawan, Pengaruh Komunikasi Sosial dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Terhadap Perkembangan Ideologi Komunis di Wilayah Kodim 0418/Palembang, *Jurnal Prodi Strategi Kampanye Militer*, Vol. 3, No. 3, 2017, 44.

⁵⁵ Reno Wikandaru dan Shely Cathrin, Ideologi Sebagai Ramalan Masa Depan: Hakikat Ideologi Menurut Karl Mannheim, *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 7, No. 2, 2021, 283.

⁵⁶ Padma Cahyaningtyas, Djono dan Tri Yuniyanto. Ideologi Marhaenisme Masa Pemerintahan Soekarno Tahun 1950-1965. *Jurnal Candi*, Vol. 20, No. 2, 2020, 59.

Konsep ideologi yang dicetuskan oleh Mannheim sesuai dengan proses kaderisasi partai politik yang mana hal tersebut tidak secara langsung membentuk kader menjadi sesuai dengan ideologi yang dianut, tetapi hal tersebut membutuhkan waktu. Sesuai dengan yang dikatakan Mannheim bahwa ideologi merupakan ramalan terhadap masa depan, hal tersebut relevan karena pada proses penanaman ideologi partai memiliki harapan agar kader nantinya menjadi pemimpin yang berkualitas di masa yang akan mendatang dengan ideologi dan nilai-nilai yang dianut oleh partai namun tidak ada jaminan bahwa kader sesuai dengan nilai-nilai ideologis yang telah ditanamkan.

2. Partai Politik

2.1 Pengertian Partai Politik

Kedudukan partai politik di negara demokrasi dipandang sebagai wadah oleh sebagian masyarakat, hal tersebut senada dengan pengertian dari Sahid yang menganggap partai politik sebagai kelompok terorganisir yang setiap anggotanya memiliki nilai-nilai yang dianut dan persamaan tujuan yang salah satunya adalah memperoleh kekuasaan. Partai politik dalam sisi historisnya lahir di Benua Eropa sebagai representasi dari aspirasi rakyat dalam proses politik, hal serupa terjadi di Indonesia yang sebenarnya sudah lama menjadikan partai politik sebagai wadah masyarakat untuk melakukan

perlawanan terhadap penjajah.⁵⁷

Setiap lembaga tentu memiliki tujuan dalam pembentukannya begitu juga partai politik. Partai politik memiliki tujuan secara umum yakni memperjuangkan cita-cita partai politik yang sesuai dengan ideologi yang dianut dan berorientasi terhadap kepentingan masyarakat. Membentuk etika politik dalam kehidupan bermasyarakat juga menjadi tujuan partai politik secara umum. Idealisnya partai politik tentu memiliki tujuan yang mulia terhadap kemajuan bangsa, namun terkadang dinodai oleh perbuatan oknum yang mencoreng tujuan mulia tersebut.⁵⁸ Perbuatan oknum tersebut tentu sangat merugikan citra partai, terlebih jika partai tersebut sedang mengalami kejayaan.

Maka untuk menghindari perbuatan oknum kader yang mencoreng tujuan mulia partai perlu adanya sistem kaderisasi yang baik untuk membentuk kader yang memiliki jiwa kepemimpinan dan patuh terhadap ideologi serta tidak melanggar sesuatu yang dilarang oleh partai. Masih banyak partai yang mengusung calon kepala daerah non kader sehingga setiap partai pada akhirnya akan membutuhkan kader yang berkualitas, karena dengan adanya kader yang berkualitas hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas lingkungan yang dimiliki oleh partai dan partai tidak akan bingung

⁵⁷ Agus Nurulsyam Suparman dan Gilang Yuniar Rahman, Partai Politik dan Kaderisasi (Membentuk Partai Politik yang Berkualitas Sesuai dengan Tuntutan Demokrasi), *Jurnal Ilmiah MODERAT*, Vol. 3, No. 4, 2017, 201.

⁵⁸ Sirajuddin, Eksistensi Partai Politik dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV, No. 1, 2016, 78.

untuk menentukan pemimpin yang diajukan di setiap pemilihan kepala daerah.⁵⁹ Seperti halnya pada kontestasi politik di Surabaya, PDI Perjuangan lebih memilih non kader untuk menjadi kepala daerah meskipun pada akhirnya menjadi kader.

Partai memiliki peran yang sangat penting terhadap posisi yang ia miliki terhadap sistem demokrasi. Partai politik adalah penghubung antara pemerintah dengan masyarakat sehingga partai politik memiliki peran penting untuk menentukan proses demokrasi. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, partai memiliki beberapa fungsi yakni sosialisasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik.⁶⁰ Pemilih pemula banyak yang masih awam terhadap manuver politik atau belum memahami betul apa itu politik sehingga sosialisasi politik menjadi fungsi yang sangat penting bagi partai untuk menjangkau pemilih pemula tersebut. Sedangkan Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell Jr mendefinisikan sosialisasi politik sebagai *the process by which political cultures are formed, maintained, and changed*.⁶¹

Definisi yang disampaikan tersebut menganggap bahwa sosialisasi politik ditujukan untuk membentuk budaya masyarakat yang disertai dengan nilai-nilai politik. Sosialisasi politik dijalankan oleh beberapa pihak yang

⁵⁹ Eki Syahrudin dan Akhmad Marjuki, Kaderisasi Partai Islam dan Pemilihan Kepala Daerah: Studi DPD PAN Serang Banten, *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 9, No. 1, 2018.

⁶⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 114.

⁶¹ Cherlinda Hestiane Cahyani, Skripsi: *Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik: Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 18.

disebut sebagai agen sosialisasi politik yang secara langsung maupun tidak memberikan nilai-nilai politik sehingga muncul sikap dan orientasi terhadap partai politik tertentu. Agen sosialisasi politik sendiri terdiri dari beberapa individu maupun kelompok juga politik maupun non politik seperti keluarga, sekolah, kelompok teman, media massa, dan kontak politik langsung seperti pemerintah dan partai politik.⁶² Peran agen tentu untuk menjadikan masyarakat lebih memahami dinamika politik yang sedang terjadi saat ini.

Rekrutmen politik merupakan penempatan sebuah peran tertentu untuk melaksanakan urusan negara, sedangkan dalam sistem kepartaian rekrutmen politik sebagai unsur untuk merekrut kader baru sebagai anggota partai dan hal tersebut didukung oleh undang-undang yang dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan rekrutmen secara demokratis dan terbuka sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun partai politik memiliki sistem dan mekanisme yang berbeda-beda namun diharapkan agar proses rekrutmen politik mempunyai makna dalam setiap prosesnya.⁶³ Sedangkan menurut Miftah Thoha, rekrutmen politik memiliki tiga sistem yang sering digunakan. Pertama, sistem patronik yang didasarkan atas ikatan yang dimiliki seperti teman, keluarga, dan didasarkan atas persamaan pemikiran terhadap perjuangan politik. Kedua, sistem merit yang didasarkan atas kelebihan yang

⁶² Steydy Rundengan, Max Reinhart Rembang dan Maxi Egeten. Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. V No. 086, 2019, 61.

⁶³ Undang-Undang Partai Politik No. 2 tahun 2011 pada Pasal 29 Ayat (2) Bab XI tentang *Rekrutmen Politik*, diakses dari <https://bit.ly/3Hyh7nh> , pada tanggal 5 Februari 2023, pukul 2.56

dimiliki oleh seseorang yang sesuai dengan peran yang tersedia sehingga rekrutmen politik pada sistem ini bersifat objektif. Dan yang terakhir adalah sistem karir yang didasarkan atas karir seseorang pada jabatan sebelumnya sebagai pertimbangan rekrutmen.⁶⁴

Perbedaan pola rekrutmen yang dimiliki oleh partai politik akan berbeda pula terhadap orientasi yang dihasilkan oleh calon kader sehingga persentase untuk meraih keberhasilan yang sesuai dengan target partai menjadi kurang rasional, namun jika partai sangat objektif terhadap rekrutmen politik maka akan sesuai dengan target yang dimiliki partai.

Perubahan komunikasi yang dialami oleh masyarakat baik lokal maupun global juga mempengaruhi komunikasi politik. Perubahan yang terjadi adalah semakin terbukanya ruang kebebasan dalam menyampaikan ekspresi juga semakin transparannya pemberitaan yang ada di media sehingga partai politik diharuskan untuk semakin informatif terhadap masyarakat. Kebebasan berekspresi menjadi salah satu ciri masyarakat di zaman ini sehingga pendekatan komunikasi politik tidak dapat lagi menggunakan cara lama karena informasi semakin mudah untuk didapatkan.⁶⁵

Fungsi komunikasi politik bagi partai politik sendiri mengharuskan partai politik berperan sebagai komunikator untuk menyampaikan informasi dari pemerintah dan menyampaikannya kepada masyarakat. Seperti yang

⁶⁴ Alissa Januar Ramadanty, Skripsi: *Partai Politik dan Sosialisasi Politik (Strategi Politik Rian Ernest pada Pemilu Legislatif 2019 di Daerah Pemilihan Jakarta Timur)*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 27-29.

⁶⁵ Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Obor Indonesia, 2007), 98.

disampaikan di atas bahwa informasi semakin cepat menyebar sehingga partai politik diharapkan tidak menutupi kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.

Sedangkan komunikasi politik sendiri menurut McNair memiliki beberapa fungsi dasar yakni memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi di pemerintahan, mendidik masyarakat untuk mengetahui fakta yang ada, menyediakan diri untuk menampung masalah yang ada di masyarakat maupun opini publik, dan yang terakhir adalah masyarakat dapat memberi kritik terhadap pemerintah melalui lembaga legislatif/partai politik.⁶⁶

Fungsi partisipasi politik salah satunya memberikan kesempatan terhadap masyarakat yang ingin menjadikan partai politik sebagai proses kegiatan politik dan menyampaikan aspirasi publik. Pengertian partisipasi politik sendiri adalah proses kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk memengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan publik.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Bolgherini yang berpendapat bahwa partisipasi politik adalah aktivitas yang berkaitan dengan politik dan ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁷ Dan yang terpenting dari fungsi partai politik

⁶⁶ Ridho Syofian, Strategi Komunikasi Politik Partai Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kuantan Singingi, *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, Vol. 7, Edisi I, 2020, 6.

⁶⁷ Itok Wicaksono, Peran Partai Politik dalam Partisipasi dan Aspirasi Politik di Tingkat Pemerintahan Desa, *Jurnal Politico*, Vol. 17, No. 2, 2017, 317.

terhadap partisipasi politik adalah bagaimana partai politik untuk terus menyuarkan aspirasi yang dimiliki oleh publik karena di setiap aspirasi yang disampaikan oleh rakyat terdapat satu harapan untuk kebaikan bangsa ke depannya.

2.2 Tipologi dan Sistem Partai Politik

Partai politik tentu memiliki perbedaan satu sama lain sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui perbedaan tersebut dan memilih partai yang sesuai dengan kriteria yang dimiliki oleh masyarakat. Perlu adanya analisa untuk meneliti perilaku partai sebagai suatu sistem yang menjadikan partai politik untuk berinteraksi satu sama lain. Menurut Maurice Duverger dalam bukunya *Political Parties* teori analisa untuk menentukan perilaku tersebut dinamakan sebagai teori sistem kepartaian, dan Duverger membaginya menjadi tiga kategori yakni sistem partai-tunggal, sistem dwi-partai, dan sistem multi-partai.⁶⁸ Sistem yang digunakan di Indonesia saat ini adalah sistem multi partai, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya sistem multi-partai seperti keanekaragaman budaya politik yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang berbeda dalam ras, suku bangsa, maupun agama memiliki wadah untuk menyalurkan aspirasinya.

Sistem multi-partai jika dihubungkan pada sistem parlementer akan memberikan dominasi penuh kepada lembaga legislatif sehingga peran lembaga eksekutif sangat lemah karena tidak ada partai yang mampu untuk

⁶⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 415.

membentuk pemerintahan sendiri.⁶⁹ Sedangkan partai oposisi kurang memiliki peran karena adanya negosiasi untuk duduk di pemerintahan baru, hal tersebut yang menjadikan partai politik terlihat lebih pragmatis karena orientasinya sebatas untuk memperoleh kekuasaan.

Sisi positif dalam situasi tersebut adalah stabilitas politik yang lebih terjamin karena tidak ada oposisi yang terus bersuara lantang karena dibekap oleh jabatan, namun dampak negatifnya adalah iklim demokrasi yang kian menurun sehingga pemerintah hanya dikuasai oleh elite politik tanpa adanya pengecam kebijakan.

Beberapa negara yang menggunakan sistem multi-partai adalah Indonesia, Malaysia, Nederland, Australia, Prancis, Swedia, dan Federasi Rusia. Indonesia sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang terhadap penerapan berbagai jenis sistem multi-partai yang diterapkan secara bertahap untuk menghindari segala unsur negatif yang ada di masa lampau.⁷⁰ Perkembangan demokrasi masyarakat dalam berpolitik mempengaruhi tipologi partai politik, perkembangan tersebut terlihat dari segi ideologi, anggota, dan beberapa aturan yang mengikat.

Menurut Hans Jurgen Puhle, beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan tipologi partai politik adalah dimensi elektoral, kepentingan partai, sistem partai, proses pembentukan kebijakan, dan implementasi

⁶⁹ Ibid., 418.

⁷⁰ Ibid., 419.

kebijakan.⁷¹ Lalu tipologi partai politik sendiri memiliki perbedaan dasar yang diklasifikasikan menjadi berdasarkan asas dan orientasinya dan berdasarkan fungsi anggotanya. Menurut Ramlan Surbakti partai politik berdasarkan asas dan orientasinya dibedakan menjadi tiga yakni partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan.⁷²

2.2.1 Partai Politik Pragmatis

Partai yang memiliki program kegiatan yang tidak terikat pada ideologi tertentu disebut sebagai partai politik pragmatis. Orientasi yang berubah-ubah karena tidak memiliki ideologi tetap menjadi ciri khas dari partai tersebut, karena orientasinya menyesuaikan perubahan sosial politik yang sering berubah-ubah.

Partai pragmatis seringkali dimiliki oleh negara yang memiliki sistem dwi-partai, karena partai yang berjuang pada sistem tersebut memiliki orientasi hanya pada kekuasaan sehingga kerja partai hanya menjelang pemilu. Contohnya Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat.

2.2.2 Partai Politik Doktriner

Partai yang memiliki kegiatan tetap dan terikat pada ideologi tertentu disebut sebagai partai doktriner. Poros pada partai ini bukan pada pemimpinnya, tetapi kepada ideologi partai yang sudah lama

⁷¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 26.

⁷² *Ibid.*, 27.

dianut oleh kader partai tersebut. Sehingga siapa pun yang menjadi pemimpin tidak akan mengubah sikap dan perilaku yang dimiliki oleh kader partai, hal tersebut terjadi karena partai doktriner memiliki aturan yang ketat.

Contoh partai doktriner di Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia dan Masyumi. Kedua partai tersebut sempat berjaya pada zaman orde lama, namun tidak bertahan lama dan bubar karena tidak cocok untuk diterapkan terhadap negara yang memiliki keanekaragaman dalam suku, budaya, agama, maupun ras.

2.2.3 Partai Politik Kepentingan

Partai yang dibentuk atas dasar kepentingan kelompok tertentu yang berdasarkan persamaan etnis, pekerjaan, maupun sesuatu yang dikehendaki secara bersama. Contoh partai politik kepentingan di tingkat global adalah Partai Hijau di Jerman dan Partai Petani di Swiss.

Di Indonesia terdapat beberapa partai yang mewakili golongan tertentu seperti Partai Damai Sejahtera yang menjadi perwakilan dari Umat Kristiani, serta Partai Buruh yang menjadi perwakilan dari status pekerjaan.

Lalu berdasarkan fungsi anggota, partai politik dibedakan menjadi dua yaitu partai massa dan partai kader.

2.2.4 Partai Massa

Partai massa adalah partai yang sering mengandalkan jumlah

anggotanya, partai jenis tersebut mampu memobilisasi massa dalam berbagai kelompok untuk meningkatkan elektabilitas partai dalam proses pemilu. Partai massa memiliki basis sosial pada kelas sosial dan agama tertentu. Adanya kesamaan identitas yang menjadikan simpatisan partai bergabung, alih-alih karena ideologi maupun kebijakan.⁷³

Partai massa mudah diterima oleh masyarakat kecil karena bersifat merakyat, walaupun untuk urusan kepedulian belum tentu partai massa lebih peduli terhadap rakyat dibanding partai kader karena banyaknya basis massa yang berlindung pada partai ini sehingga banyak kepentingan yang seharusnya dipertimbangkan untuk masyarakat menjadi sedikit melenceng untuk kepentingan pribadi.

Partai massa memiliki banyak basis disebabkan oleh gabungan dari beberapa aliran politik yang memperjuangkan program yang bersifat umum. Partai massa memiliki beberapa kelemahan yakni kurangnya keterikatan antar anggota yang menyebabkan ideologisasi partai menjadi lemah, sulitnya pembagian jabatan karena kepentingan setiap kelompok yang berbeda-beda.

Partai massa biasanya terdapat di negara berkembang, seperti PDI Perjuangan, PKB, dan PAN. PDI Perjuangan sendiri pada era

⁷³ Ibid., 28.

Megawati menjadi presiden hanya sebatas partai massa karena belum bisa menempatkan beberapa kadernya pada pos-pos strategis yang terdapat di pemerintahan, namun seiring berjalannya waktu PDI Perjuangan menjadi partai kader yang luar biasa karena menempatkan beberapa kadernya pada pos-pos penting di pemerintahan, bahkan banyak yang menjadi kepala pemerintahan di beberapa daerah.⁷⁴

2.2.5 Partai Kader

Partai kader memiliki fokus untuk membentuk loyalitas dan disiplin terhadap anggotanya melalui proses kaderisasi yang sistematis sehingga menciptakan lingkungan partai yang solid, hal tersebut dikonfirmasi dengan tidak terlalu peduli terhadap jumlah anggota yang dimiliki.

Menurut Pramono Anung, Indonesia hanya memiliki dua partai yang masuk ke tahap partai kader karena memiliki latar belakang ideologis yang tetap terjaga hingga saat ini yaitu PDI Perjuangan dan PKS.⁷⁵ PDI Perjuangan yang sebelumnya menjadi partai massa karena belum mampu menempatkan kadernya pada posisi strategis sekarang menjadi partai kader karena pada proses kaderisasinya, kader diharapkan untuk menjadi pemimpin yang

⁷⁴ Sri Utami, “PDIP Partai Kader Atau Partai Massa?”, diakses dari <https://bit.ly/3Rz0IsN> , pada tanggal 6 Februari, pukul 4.30

⁷⁵ Febriana Firdaus, “Hanya PKS dan PDIP yang Murni Partai Kader”, diakses dari <https://bit.ly/3IOEwPZ> , pada tanggal 6 Februari 2023, pukul 4.48

berintegritas pada bidangnya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh banyaknya kader PDI Perjuangan yang menjadi tokoh nasional seperti Menteri, Ketua DPR, Presiden, bahkan beberapa Gubernur dan juga Wali Kota.

Partai kader memiliki asumsi bahwa dengan jumlah kader yang sedikit namun berkualitas masih bisa mencapai tujuan yang dimiliki oleh partai. Adanya proses kaderisasi yang ketat dan berjenjang berdampak pada sikap dan perilaku kader yang memiliki loyalitas serta tingkat disiplin yang tinggi. Selain itu, partai juga konsisten untuk menegakkan hukum terhadap kader yang melanggar aturan partai. Seperti PDI Perjuangan yang memberikan sanksi kepada FX Hadi Rudyatmo karena mendukung Ganjar sebagai calon presiden yang bertentangan dengan titah Ketua Umum Megawati.⁷⁶

Namun berbeda dengan PKS yang pada beberapa tahun terakhir terpecah karena beberapa petingginya memisahkan diri dari partai tersebut dan membentuk partai baru bernama Gelora, yang berimbas terhadap berpindahannya beberapa kader militan PKS ke partai baru tersebut.⁷⁷

⁷⁶ Agil Trisetiawan Putra, "Disanksi Peringatan Keras dan Terakhir, FX Rudy Bisa Dipecat PDIP?", diakses dari <https://bit.ly/3JNBGiB>, pada tanggal 6 Februari 2023, pukul 5.20

⁷⁷ Haryanti Puspa Sari, "Fahri Hamzah Sebut Banyak Kader PKS Pindah ke Partai Gelora", diakses dari <https://bit.ly/3Ht8xqQ>, pada tanggal 6 Februari 2023, pukul 5.25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mana penelitian kualitatif sendiri ialah penelitian yang melihat objek secara langsung dan terjun ke lapangan untuk mengamati dan menggali informasi mengenai objek tersebut.

Penelitian ini bersifat alami atau *natural setting* yang mengutamakan penghayatan dan berusaha memaknai sesuatu menurut perspektif peneliti sendiri.⁷⁸ Penelitian kualitatif mempunyai tujuan untuk memperoleh data tertulis, lisan, maupun perilaku yang didapatkan dari orang lain yang kemudian dideskripsikan secara deskriptif. Deskriptif sendiri berarti membuat penyandaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi.

Metode kualitatif memiliki beberapa ciri utama seperti sumber data yang wajar dan tidak dimanipulasi oleh kelompok tertentu, memiliki laporan yang bersifat deskriptif, menjadikan peneliti sebagai instrument penelitian, mementingkan data secara langsung dan mengutamakan wawancara maupun dokumentasi, dan yang terakhir adalah analisa data yang dilakukan oleh peneliti dimulai sejak awal hingga akhir penelitian.⁷⁹ Mekanisme yang telah disebutkan diharapkan menjadi suatu instrumen dengan hasil yang baik.

⁷⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cetakan Keempat, 81-90.

⁷⁹ Ibid,

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Menentukan lokasi penelitian merupakan hal yang paling penting dalam mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dan menghasilkan data-data yang akurat. Untuk menentukan lokasi penelitian yang benar adalah mempertimbangkan teori substantif dan mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.⁸⁰

Dengan metode pertimbangan dalam menentukan tempat penelitian tersebut maka penelitian akan bertempat di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya karena hal tersebut sesuai dengan topik penelitian karena PDI Perjuangan mampu menguasai Kota Surabaya selama beberapa dekade yang mengundang keingintahuan terkait proses kaderisasi terhadap kader PDI Perjuangan. Munculnya kader-kader potensial yang dimiliki oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya juga menjadi alasan tertentu mengapa penelitian tersebut memilih DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya untuk ditelisik lebih jauh mengenai proses kaderisasi yang dilaksanakan. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Februari sampai awal April.

C. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif menggunakan nama narasumber atau informan bukan responden. Maka peneliti menggunakan informan sebagai subyek penelitian, karena dalam penelitian ini informan sebagai sumber informasi

⁸⁰ Eka Lukita Sari, Skripsi: *Perempuan dan Politik Elektoral (Strategi Kampanye Calon Legislatif Petahana PKB Terpilih Di Daerah Pemilihan Jawa Timur II Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur 2019)*. (Surabaya: UINSA, 2019), 49.

untuk mengetahui situasi dan kondisi terhadap obyek penelitian.⁸¹ Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana pada teknik tersebut mampu menentukan identitas yang cocok dengan tujuan penelitian.

Menurut Arikunto teknik ini tidak mewakili populasi tertentu namun peneliti difokuskan terhadap desain yang dimiliki oleh suatu kelompok sehingga sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif. *Teknik purposive sampling* memiliki beberapa kelebihan yakni mudah dilakukan, informan terpilih sesuai dengan topik penelitian, dan informan merupakan personal yang mudah untuk ditemui.⁸² Analogi yang digunakan dalam teknik *purposive sampling* seperti penelitian mengenai makanan maka orang yang memasak yang akan dipilih sebagai informan, dan hal tersebut sesuai dengan topik penelitian mengenai proses kaderisasi yang dipilih oleh peneliti yang mana informan juga harus memahami betul terkait seluk-beluk proses kaderisasi yang ada di DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

Penelitian kualitatif memiliki dua jenis informan yakni informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah seseorang yang profesional pada bidangnya dan memiliki informasi yang jelas serta terpercaya, informan kunci dalam penelitian ini adalah Wakil Sekretaris Bidang Eksternal DPC PDI Perjuangan yang juga Staf Khusus Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya Achmad Hidayat

⁸¹ Khosiah, Hajrah, dan Syafril. Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, 2017, 143.

⁸² Ika Lenaini, Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling, *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1, 2021, 34.

dan Anggota Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Althof Luissani. Sedangkan informan biasa adalah seseorang yang memberikan informasi dengan batasan pengetahuan maupun pengalaman yang telah ia lewati, informan biasa dalam penelitian ini adalah Imam Agus Riyanto dan Afrid Fahrezi Salam sebagai kader pratama DPC PDI Perjuangan yang telah melaksanakan proses kaderisasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau biasa disebut dengan metode interview adalah mencoba untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang narasumber dengan percakapan secara langsung. Wawancara sendiri mempunyai dua macam metode, yang pertama adalah mendapatkan data untuk kepentingan informasi dan yang kedua adalah wawancara untuk mendapatkan data pribadi maupun pandangan dari narasumber.⁸³ Penyebutan untuk kedua macam metode pun berbeda, yang pertama adalah informan dan yang kedua responden. Penelitian ini memilih Anggota Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya yakni Althof Luissani, Achmad Hidayat selaku Wakil Sekretaris Bidang Eksternal DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, dan Imam Agus Riyanto beserta Afrid Fahreza Salam sebagai kader partai yang terlibat

⁸³ Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial), *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, 2016, 35.

langsung dalam proses kaderisasi guna mendapatkan informasi secara langsung untuk memenuhi pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin dengan pertanyaan yang terarah dan sistematis akan menghasilkan data yang relevan untuk digunakan. Alat bantu yang digunakan dalam tahap wawancara adalah tape recorder untuk merekam hasil dari wawancara.⁸⁴ Juga catatan sebagai salah satu instrumen pengumpul data yang telah diperoleh.

2. Dokumentasi

Menurut Fuad & Sapto dokumentasi masuk ke dalam data skunder yang diperlukan dalam penelitian, dokumentasi disiapkan oleh peneliti juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data tertulis yang diterbitkan oleh beberapa lembaga tertentu.⁸⁵ Peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada pengumpulan data karena lebih mudah didapat dan informasi ketika wawancara lebih valid dengan adanya dokumen.

Alat bantu yang digunakan dalam dokumentasi berupa kamera dan tape recorder sehingga ketika wawancara terdapat beberapa momen yang diabadikan untuk meningkatkan validitas penelitian, juga rekaman-rekaman sebagai bukti penelitian tersebut dilakukan.

⁸⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 59.

⁸⁵ Zhahara Yusra, Ruffran Zulkarnain, dan Sofino. Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, Vol. 4, No. 1, 2021,

E. Teknik Analisis Data

Setelah semua data telah didapatkan dan dijadikan menjadi satu maka tahap berikutnya adalah menganalisa data tersebut, tahap ini menjadi tahap yang penting dan menentukan penelitian. Karena pada tahap analisa data penelitian akan memiliki kesimpulan untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

1. Reduksi Data

Reduksi data digunakan untuk menyederhanakan informasi dan juga data yang telah didapatkan dalam observasi dan juga wawancara di DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Reduksi data juga diperlukan untuk membuang data-data yang sekiranya tidak diperlukan oleh peneliti. Data yang telah direduksi akan memberikan kemudahan peneliti ketika mencari jika data tersebut diperlukan juga menggambarkan dengan jelas tentang hasil pengamatan yang telah dilakukan.

2. Display Data

Display data dilakukan setelah reduksi data dengan menyajikan data secara deskripsi berupa teks uraian. Pada tahap ini penyajian data akan dilakukan dalam bentuk teks naratif, lalu teks tersebut akan diurai secara sederhana yang mana bisa menggambarkan alur temuan penelitian yang terjadi.

3. Conclusions

Setelah data direduksi, kemudian disajikan berupa deskripsi, lalu data disimpulkan. Tahap ini adalah puncak dari penelitian karena pada tahap ini peneliti memperoleh kesimpulan dari data-data yang telah disederhanakan dan juga dinarasikan. Maka fokus peneliti pada tahap ini untuk mengklasifikasikan

dengan memvalidasi ulang melalui informan yang ada di lapangan.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Uji Kredibilitas

Kredibilitas merupakan kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan. Ada beberapa upaya untuk memenuhi kredibilitas untuk membuktikan keabsahan data yakni:

- a. Memiliki waktu yang cukup lama untuk melakukan penelitian
- b. Melakukan pengamatan dengan intensitas yang cukup tinggi
- c. Memeriksa ulang kebenaran data yang diperoleh terhadap pihak lain yang dipercaya
- d. Menggunakan alat bantu pengumpulan data seperti rekaman, video, maupun dokumentasi lainnya
- e. Dan yang terakhir menggunakan member check, yaitu memeriksa kembali informasi yang didapatkan dari informan dengan mengadakan pertanyaan ulang.⁸⁶

2. Uji Konfirmabilitas

Untuk memenuhi konfirmabilitas maka ada audit trail yang dilakukan oleh dosen pembimbing yang memiliki hak untuk memeriksa kebenaran data serta penafsirannya. Untuk mempermudah dosen pembimbing dalam memeriksa data maka peneliti harus menyiapkan data mentah, hasil analisis data, dan hasil sintesis data yang berupa kesimpulan, tempa, hubungan kepustakaan dan

⁸⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 88-89.

laporan akhir.⁸⁷

Dan yang terakhir adalah peneliti bersedia untuk memaparkan data-datanya kepada publik dan memberikan kepada pihak lain hak untuk menilai.

G. Sistematika Pembahasan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi konseptual, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini penulis menggambarkan secara singkat mengenai inti dari mengapa permasalahan tersebut diangkat dalam penelitian ini, sehingga memudahkan pembaca mendapatkan informasi singkat terhadap penelitian ini.

2. BAB II KAJIAN TEORITIK

Pada bab ini berisi mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti dan berisikan kerangka teori. Hal tersebut bertujuan untuk menyajikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya guna untuk menyajikan keaslian dari penelitian ini. Pada bab ini peneliti juga menyajikan teori apa yang akan digunakan untuk menganalisis temuan-temuan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang dibagi menjadi beberapa sub-bab yaitu: a) Jenis Penelitian, b) Lokasi dan Waktu Penelitian, c)

⁸⁷ Ibid,

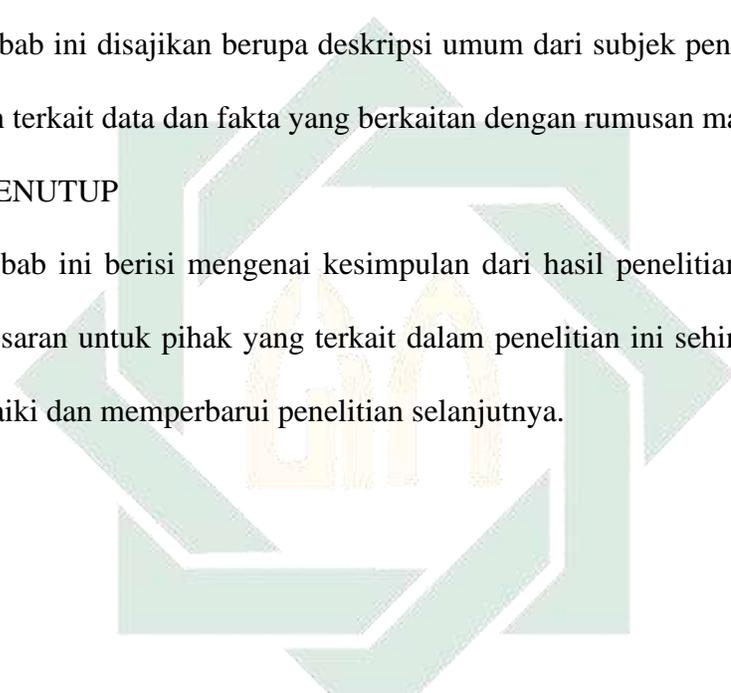
Informan Penelitian, d) Teknik Pengumpulan data, e) Teknik Analisa data, dan f) Teknik Keabsahan data.

4. BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

Pada bab ini disajikan berupa deskripsi umum dari subjek penelitian dan penjelasan terkait data dan fakta yang berkaitan dengan rumusan masalah.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga diberikan saran untuk pihak yang terkait dalam penelitian ini sehingga dapat memperbaiki dan memperbarui penelitian selanjutnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Deskripsi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

1. Sejarah DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

Histori berdirinya DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya tentunya bersamaan dengan berdirinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Rekam jejak histori PDI Perjuangan diawali dari Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dibentuk oleh Ir Sukarno pada 4 Juli 1927. PNI juga berasosiasi dengan beberapa partai diantaranya yakni Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), serta Partai Katolik. Beberapa partai gabungan tersebut lalu didirikan dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.⁸⁸

Setelah asosiasi partai tersebut diatas, PDI mengadakan pertemuan pertama yaitu Musyawarah Nasional atau Munas. Munas sendiri digelar pada tanggal 20 sampai 24 September 1973 bertempat di Jakarta. Tetapi, tidak ada hasil yang memuaskan dari adanya pertemuan Munas ini. Justru adanya cita-cita untuk menyelenggarakan Kongres PDI yang pertama tidak dapat terselenggara dikarenakan adanya problema internal partai yang tidak kunjung selesai menyebabkan tertundanya keinginan tersebut. Akhirnya, Kongres PDI

⁸⁸ DPD PDI Perjuangan Lampung “Sejarah PDI Perjuangan” diakses dari <https://pdiperjuanganlampung.id/sejarahpdiperjuangan/> pada tanggal 6 Mei 2023, pukul 4.37

dapat terlaksana pada 12 sampai 13 April 1976. Adanya campur tangan pemerintah pada Kongres I ini sangat kuat, pemerintah menjadikan Sanusi Hardjadinata sebagai Ketua Umum DPP PDI.

Struktur dari DPP pada hasil Kongres I pun disempurnakan melalui kesepakatan yang dilakukan oleh MH Isnaeni dan Sunawar. Lalu, pelaksanaan Kongres II PDI Perjuangan diselenggarakan pada 13 sampai 17 Januari 1981 yang terletak di Jakarta, kongres tersebut terjadi diatas penolakan dari Usep, Abdul Madjid, Walandauw, serta Zakaria Raib.

Intervensi pemerintah semakin lekat tatkala diselenggarakannya Kongres II yang dibuka oleh Presiden Soeharto. Megawati Soekarniputri dipilih menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan tepat pada Kongres Nasional 1993, PDI Perjuangan adalah satu dari 3 partai politik yang dilegalkan oleh pemerintahan pada masa Orde Baru Presiden Soeharto. Tetapi hasil tersebut tidak diakui oleh pemerintah, yang mana pemerintah terus menganjurkan Budi Harjono sebagai calon ketua umum yang dipilih pemerintah, untuk dipilih oleh PDI Perjuangan. Dalam hal ini Kongres Khusus diselenggarakan karena pemerintah menginginkan Harjono terpilih sebagai Ketua Umum Partai, tetapi nyatanya sekali lagi nama Megawati muncul sebagai pemimpin terpilih. Kedudukannya semakin terintegrasi ketika Majelis Nasional PDI mengesahkan hasil dari kongres tersebut.

Lalu, Kongres Nasional kembali diadakan pada bulan Juni 1996 di Kota Medan, tetapi Megawati tidak diundang sedangkan anggota anti-Megawati menghadiri Kongres tersebut. Berkat dukungan dari pemerintah, Suryadi

selaku mantan ketua umum terpilih kembali menjadi Ketua Umum PDI. Megawati menolak membenarkan adanya hasil kongres tersebut dan dalam perspektif Megawati, dirinyalah pemimpin sah PDI Perjuangan.

Alhasil, pendukung Megawati mengadakan Mimbar Demokrasi pada 27 Juli 1996 di Halaman kantor DPP PDI, tepat di Jalan Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat. Lalu, datang segerombol orang berkaus merah yaitu kubu Soerjadi dan hal tersebut menyebabkan bentrok tak terhelakan dengan kubu Megawati. Insiden tersebut akhirnya dikenal dengan sebutan Kudatuli atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli.⁸⁹

Selepas adanya insiden tersebut, PDI dibawah naungan pimpinan Soerjadi hanya mendapatkan kursi DPR sejumlah 11. Adanya dukungan PDI untuk Megawati kembali menguat selepas Presiden Soeharto menerangkan berhenti dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Dengan berhentinya era rezim orde baru tersebut, Megawati dipastikan sebagai Ketua Umum PDI periode 1998-2003. Megawati ditetapkan menjadi Ketua Umum PDI pada saat diselenggarakannya Kongres ke-V PDI yang bertempat di Denpasar, Bali. Hingga pada akhirnya, Megawati mengganti nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999. Megawati bermaksud mengubah nama tersebut agar dapat mengikuti kontestasi. Nama PDI Perjuangan kemudian diumumkan beserta lambang dari PDI Perjuangan pada 14 Februari 1999 yang bertempat di Istora Senayan,

⁸⁹ Maria Arimbi Haryas Prabawanti “*Menyusuri Jejak Sejarah PDIP dari Era Orde Baru hingga Kini*”, diakses dari <https://bit.ly/3AZLHDG> pada tanggal 6 Mei 2023, pukul 4.50

Jakarta.⁹⁰

Sedangkan di Surabaya, Saleh Ismail Mukadar menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya pada periode 2005-2010 dengan berbagai dinamika yang dialami ketika menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus menjadi Ketum Persebaya pada masa itu yang diterpa dualisme. Kemudian Saleh digantikan oleh Whisnu Sakti Buana yang menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya hingga tahun 2019. Pada konfercab tahun 2019, Adi Sutarwijono ditunjuk menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya periode 2019-2024, namun keputusan tersebut ditentang oleh simpatisan Whisnu Sakti Buana sehingga konfercab diundur beberapa hari kemudian dan ketika dilanjutkan tidak ada perubahan yang signifikan sehingga Adi Sutarwijono tetap ditunjuk sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya yang baru.

2. Visi dan Misi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

Berdasarkan AD/ART DPP PDI Perjuangan, Visi PDI Perjuangan adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai.

Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah:

⁹⁰ Dandy Bayu Bramasta “*Sejarah PDI-P yang Hari Ini Berusia 50 Tahun*”, diakses dari <https://bit.ly/3nsr2oF> pada tanggal 6 Mei 2023, pukul 4.47

Partai adalah:

1. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
2. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
3. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
4. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
5. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;⁹¹

Sedangkan misi PDI Perjuangan adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu :

⁹¹ AD/ART PDI Perjuangan, diakses dari <https://bit.ly/3J9eVEw> , pada tanggal 6 Mei 2023, pukul 2.04

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:

1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
2. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:

1. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
2. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
3. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
4. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan

5. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasar Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:

1. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
2. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
3. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
5. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan

6. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10 Partai mempunyai tugas:

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
3. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
5. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
6. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan
8. UUD Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;

9. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.⁹²

3. Program Perjuangan PDI Perjuangan

Program Kerja merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan arah gerak organisasi dengan membuat rancangan sebagai realisasi dari visi dan misi partai. PDI Perjuangan sebagai organisasi politik di Indonesia tentu memiliki beberapa program kerja dalam jangka waktu tertentu, dan program kerja yang dirancang oleh PDI Perjuangan tentu memiliki dampak yang cukup besar karena partai tersebut sedang menguasai pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

PDI Perjuangan dalam Kongres ke V di Bali menetapkan beberapa program perjuangan untuk periode 2019-2024. Program perjuangan PDI Perjuangan dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama yaitu Program Perjuangan Kebijakan, Politik Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan, dan yang kedua Program Perjuangan Tata Kelola Partai. Menindaklanjuti hasil dari kongres tersebut, Presiden Joko Widodo merevisi Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional⁹³ dengan 223

⁹² DPP PDI Perjuangan “*Visi dan Misi*” diakses dari <https://www.pdiperjuangan.id/detail-article/107/visi-dan-misi> pada tanggal 6 Mei 2023, pukul 1.19

⁹³ Indonesia, *Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018.

proyek dan 3 program menjadi 201 proyek dengan 10 program.

Peraturan terbaru dalam program strategis nasional yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN),⁹⁴ dengan nilai total Rp 4.809,7 triliun.

Pada bagian pertama program perjuangan PDI Perjuangan terdapat program internal dan eksternal. Program internal merupakan program yang ditujukan untuk internal partai dalam menentukan arah gerak kader dalam berpolitik, terdapat 2 sub bab dalam program internal yaitu berdaulat di bidang politik dan berdikari di bidang ekonomi. Beberapa program berdaulat di bidang politik yaitu menjalin Kerjasama antar Partai negara sahabat, melaksanakan internasionalisasi ajaran-ajaran Bung Karno, membina dialog secara intensif dengan partai-partai dunia yang memiliki kesamaan ideologi, karakter, dan garis politik regional dan internasional, membentuk badan legislasi partai untuk menyusun dan mengevaluasi peraturan perundangan dari nasional hingga daerah, dan yang terakhir mempersiapkan kader-kader ideologis, kompeten, dan kredibel untuk ditugaskan secara internal dan eksternal.⁹⁵

Sedangkan program eksternal PDI Perjuangan merupakan program yang ditujukan untuk eksternal partai seperti TNI, DPR RI, Polri dsb. Program eksternal PDI Perjuangan juga memiliki 2 sub bab yaitu berdaulat di bidang

⁹⁴ Indonesia, *Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

⁹⁵ DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2024, *Program Perjuangan PDI Perjuangan*, hlm 3-5.

politik dan berdikari di bidang ekonomi. Pada sub bab pertama tentang berdaulat di bidang politik memiliki beberapa program yang ditujukan kepada 4 instansi yaitu Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan Kementerian Luar Negeri.

Program PDI Perjuangan untuk Kementerian Pertahanan yaitu memerintahkan kepada DPR RI Fraksi PDI Perjuangan agar segera melakukan pembahasan RUU tentang keamanan nasional dan mendorong pengembangan produksi alutsista dalam negeri sehingga ke depan Indonesia mampu berdikari dalam pengadaan alutsista. Kedua, program untuk TNI yaitu meningkatkan profesionalisme TNI dalam menghadapi perang modern, perang gerilya, perang kota, dan perang *cyber*, dan membangun kekuatan TNI sebagai kekuatan maritim global yang disegani di Kawasan Asia Pasifik.⁹⁶

Program eksternal PDI Perjuangan untuk Polri yaitu mendorong reformasi dengan membuat kajian reposisi kepolisian dalam kewenangannya merumuskan dan membuat *policy* dalam penegakan hukum dan mendorong pemerintah memperkuat Kompolnas guna melakukan supervisi terhadap kinerja kepolisian. Lalu program eksternal PDI Perjuangan untuk Kemenlu yaitu memastikan pelaksanaan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, dengan memperkuat posisi poros maritim dunia, dan meratifikasi UU yang memiliki kepentingan Indonesia sebagai Negara poros maritim dunia.⁹⁷

⁹⁶ DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2024, 7-10.

⁹⁷ DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2014, 12-15.

Program terakhir adalah program eksternal berdikari di bidang ekonomi yaitu mewujudkan pelaksanaan sistem Perekonomian Nasional yang berlandaskan Ideologi Pancasila, yaitu Sistem Ekonomi Gotong Royong atau SEGR, mempercepat ketimpangan, membangun infrastruktur dan meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur, memperkuat struktur perekonomian untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi nasional, dan yang terakhir mempercepat penurunan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.⁹⁸

Pada bagian kedua tentang Program Perjuangan Tata Kelola Partai, program tersebut merupakan lanjutan dari konsep Revolusi Mental yang digagas oleh Sukarno yang meliputi tiga hal yaitu cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih baik. Program ini dibentuk dengan harapan agar semakin meluasnya penyebaran ideologi, teori pergerakan, dan taktik perjuangan partai, juga terlaksananya pola rekrutmen dan kaderisasi Partai untuk melahirkan kader-kader partai yang ideologis.

Sehingga PDI Perjuangan dalam Kongres kelima membuat beberapa program seperti membangun kekuatan politik, memperkokoh fondasi PDI Perjuangan sebagai partai pelopor, penguatan organisasi dan struktur partai, siklus manajemen partai, dan pengelolaan sumber daya keuangan partai. Hal tersebut tentu bertujuan untuk mempertahankan konsistensi dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila, karena PDI Perjuangan bertekad menjadi

⁹⁸ DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2024, 15-30.

partai pelopor dalam penggunaan ideologi tersebut.

Adapun, 10 program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo mencakup Program Pembangunan Infrastruktur Ketanagalistrikan, Program Pemerataan Ekonomi, Program Pengembangan Kawasan Perbatasan, Program Pengembangan Jalan Akses Exit Toll, Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), Program Pembangunan Smelter, Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate), Program Pengembangan Superhub, dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah.⁹⁹

Untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, pemerintah mengatur isi materi dan substansi dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Beberapa materi yang diatur terkait hal tersebut seperti perizinan PSN, pemberian stimulus kepada PSN (tarif 0% untuk BPHTB atas PSN), dan PSN harus mengutamakan penciptaan lapangan kerja.

4. Asas dan Prinsip DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita Nasional, PDI Perjuangan menganut prinsip demokrasi yang menempatkan Kepemimpinan Pusat Partai sebagai

⁹⁹ Jaffry Prabu Prakoso, “*Jokowi Tetapkan 10 Program Strategis Nasional, Apa Saja Ya?*” diakses dari <https://bit.ly/42zmV8C> , pada tanggal 8 Juni 2023, pukul 21.08

sentral gerakan; suatu kepemimpinan yang dipimpin ideologi Pancasila 1 Juni 1945; kepemimpinan yang mengandung manajemen satu arah dan satu tujuan yaitu masyarakat adil dan makmur; dan suatu kepemimpinan yang sesuai dengan kepribadian bangsa yaitu gotong royong.¹⁰⁰

5. Ideologi PDI Perjuangan

Ideologi merupakan aspek mendasar dalam menentukan arah dan tujuan partai politik dalam setiap aktivitas yang dijalannya, hal tersebut terlihat melalui produk kebijakan yang diterbitkan oleh partai baik di legislatif maupun di eksekutif. menjadi identitas dan landasan partai untuk bergerak, membantu masyarakat, dan berpolitik. Sedangkan menurut Dacholfany, partai politik memiliki menjalankan menafsirkan ideologi partai ke dalam agenda partai dengan memformulasikan dan mengaplikasikannya ke dalam realitas yang ada sehingga apa yang dijalankan oleh partai politik dalam berkegiatan adalah gambaran dari ideologi yang dianut oleh partai tersebut.

Ideologi partai politik dapat dilihat dari berbagai ranah seperti perilaku kader dalam keseharian, dokumen partai, dan bentuk kebijakan publik yang diambil. AD/ART merupakan komponen dasar untuk memetakan suatu ideologi partai, terlebih lagi jika partai politik tersebut ada di Indonesia maka hal yang dapat dipetakan untuk menelaah ideologi adalah seperti apa hubungan partai dengan agama, masyarakat, dan negara.¹⁰¹

¹⁰⁰ AD/ART PDI Perjuangan, diakses dari <https://bit.ly/3J9eVEw>, pada tanggal 6 Mei 2023, pukul 2.04

¹⁰¹ Yeby Ma'asan Mayrudin dan M Chairil Akbar, Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam: Studi tentang PAN, PKB dan PKS. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11, No. 2, 2019.

Seiring berjalannya waktu, partai politik dewasa ini makin bergeser dari ideologi sebagai arah gerak dan juang. Hal tersebut ditandai dengan menjadikan fungsi partai politik hanya sebagai kendaraan para politisi dalam pemilihan umum, dan yang harus mendapatkan validasi adalah per hari ini partai politik dikuasai oleh pemodal atau pengusaha yang memiliki banyak uang untuk meraih kekuasaan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebanyakan politisi di Indonesia per hari ini dihuni oleh pengusaha dengan modal materi yang tidak sedikit.

Ideologi lantas harus ditegaskan kembali sebagai landasan dalam berperilaku, sesuai dengan penjelasan Afrid sebagai berikut.

“Kita jadi lebih memandang orang jadi lebih rasional, ibaratnya dengan kita punya ilmu yang kita dapat pada proses kaderisasi itu tadi kita jadi punya rasa empati yang lebih dari sebelumnya. Dari sisi sosial kita jadi lebih tumbuh, ibaratnya yang sebelumnya kita yang bergerak mungkin hanya di sekitar kita atau apa nanti lebih luas lagi jadi nanti lebih berkembang cara pandanganya dan lebih bermanfaat untuk masyarakat luas.”¹⁰²

Hal tersebut yang menjadi dasar perilaku kader PDI Perjuangan agar selalu bermanfaat untuk masyarakat luas, sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan tidak ditelantarkan. Adapun ideologi di Indonesia menurut Iswandi dibagi

¹⁰² Wawancara dengan Afrid Fahrezi Salam, tanggal 1 Mei 2023 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

menjadi 3 kategori, yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Nasionalis-Religius.¹⁰³ Sedangkan menurut Yordan (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur) pada jurnal yang sama mengatakan bahwa ide-ide politik dan pola gerakan PDI Perjuangan merupakan implementasi dari pandangan Soekarno yaitu marhaenisme yang dalam narasinya juga terdapat nasionalisme untuk membangun sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁴

Hal tersebut sesuai dengan AD/ART DPP PDI Perjuangan pada pasal 80 ayat 1 tentang Pendidikan politik Partai dilaksanakan melalui kegiatan: a. penanaman dan penyebarluasan ajaran Bung Karno; b. pendalaman pemahaman terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰⁵ Dalam hasil wawancara dengan Althof juga menjelaskan demikian bahwa ideologi PDI Perjuangan yang pertama adalah pemikiran politik Bung Karno, dan yang kedua adalah nasionalisme seperti penjelasan berikut.

“Ideologi PDI Perjuangan merupakan marhaenisme karena berkiblat terhadap Bung Karno. Kan Bu Mega sebagai ketua umum juga anak dari Bung Karno maka beliau juga membawa pemikiran-pemikiran Bung Karno dalam PDI Perjuangan seperti setiap kegiatan yang bermakna juga beberapa mengandung pemikiran-pemikiran dari Bung Karno, dan sama dengan Indonesia mas kita juga

¹⁰³ Iswandi, Studi Gerakan Ideologi Partai Politik Pada Pemilu 2019. *Jurnal Politica*, Vol. 7, No.1, 2020, 12.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ AD/ART DPP PDI Perjuangan

menggunakan Pancasila sebagai landasan dalam berperilaku.”

Althof juga menjelaskan terkait nasionalisme sebagai berikut.

“Kita yakin bahwa nasionalisme tidak akan tergerus oleh zaman, kalau kita nasionalis dan cinta dengan bahasa sendiri, apapun bentuk bangsanya nanti sebagaimana kita negara berkembang dan nantinya ketika kita menjadi negara maju kalau nasionalis nanti ditanamkan terhadap setiap masyarakatnya ya tidak akan hilang siapapun presidennya, kalau masyarakat sudah cinta pada bangsanya kan akan tertanam sendiri tanpa perubahan zaman yang terjadi.”¹⁰⁶

Dengan adanya beberapa penjelasan tersebut, Marhaenisme, Pancasila dan Nasionalisme adalah ideologi dari PDI Perjuangan dalam berpolitik dan bernegara. Ideologi Marhaenisme adalah jati diri dari ide, narasi dan laku politik Soekarno. Konsep marhaenisme sebagai interpretasi terhadap personifikasi rakyat kecil yang memiliki sebidang tanah kemudian menggarap sendiri, alatnya punya dia sendiri dan hasilnya cukup untuk kebutuhan keluarganya.¹⁰⁷ Soekarno menjadikan Marxisme sebagai sistem analisa untuk permasalahan yang ada di Indonesia pada saat itu. Kata Marhaen digunakan oleh Partindo untuk memaknai kaum proletar, buruh tani, nelayan, dan kaum miskin lainnya di Indonesia pada saat itu, karena Partindo berkeyakinan bahwa di dalam perjuangan Marhaen terdapat peran besar kaum proletar tersebut.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Althof Luissani, pada tanggal 1 Mei 2023 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

¹⁰⁷ Hasnu dan Firdaus Syam, Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme PDIP dan Islam Moderat PKB. *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 3, No. 7, 2021.

Sedangkan Marhaenisme merupakan asas yang menghendaki masyarakat dan setiap struktur yang ada di dalam negeri untuk menyelamatkan Marhaen, jadi Marhaenisme merupakan cara perjuangan untuk menghendaki hilangnya sistem kapitalisme dan imperialisme.¹⁰⁸ Marhaenis juga memiliki metode perjuangan yang rasional dan modern. Sebab itulah mengapa Soekarno menjelaskan tentang kaum proletar memiliki peran yang besar, karena menurut Soekarno kaum proletar bersentuhan langsung dengan kapitalisme dan lebih mengerti modernisasi tentang sistem yang dijalankan oleh kapitalisme. Sedangkan kaum tani menurut Soekarno masih hidup di dalam angan dan tidak selaras dengan perubahan zaman, sehingga pemikiran kaum proletar dianggap lebih rasional dan selaras dengan zaman di abad ke-20.¹⁰⁹ Marhaenisme yang menjadi harapan Soekarno bukan sekedar janji politik, bukan pula kalimat untuk mengelabui masyarakat miskin. Tetapi lebih dari itu, Marhaenisme merupakan perjuangan untuk melepaskan masyarakat miskin dari cengkeraman kapitalisme.

Peran partai bukan hanya memberikan jaminan terhadap buruh, bukan hanya membantu buruh untuk mengabdikan segala tuntutannya, tetapi peran partai lebih dari itu yaitu membuat kebijakan yang mengarah terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan kepada keuntungan kapitalis-kapitalis modern.

¹⁰⁸ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1*, (Jakarta: Banana Books, 2016), 289.

¹⁰⁹ Ibid.

Ideologi Pancasila muncul ketika Soekarno diasingkan oleh Belanda di Ende karena lantangnya beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan. Selama masa pengasingan, beliau menghabiskan waktu untuk merenungkan masalah Bangsa Indonesia. Soekarno seringkali berdiskusi dengan pastor asal Belanda, muncul beberapa pertanyaan seperti dimana tempat mamamu yang beragama Hindu di dalam negara yang mayoritas Muslim? Dimana tempat orang Flores yang mayoritas Katolik ini di dalam negara mayoritas Muslim? Pertanyaan tersebut membuat Bung Karno menyadari bahwa Indonesia sangat luas dan beragam, kemudian beliau merumuskan lima sila dasar negara Indonesia dalam benaknya.¹¹⁰

Ia melihat perbedaan demi perbedaan masyarakat Indonesia yang membuatnya semakin yakin harus membuat tanah airnya bersatu dengan sifat nasionalisme di atas segala perbedaan yang ada. Di Ende pula Soekarno melihat kemelaratan rakyat secara langsung akibat penjajahan. Maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan penting dari perjuangannya.

Ideologi Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan hasil perenungan atau gagasan seseorang atau kelompok seperti ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur budaya dan nilai religius bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara, maka wajib dan harus diimplementasikan terhadap setiap bidang agar

¹¹⁰ Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, *Kisah Pancasila*, (Jakarta: Kemendikbud, 2017), 12.

masyarakat berdaulat dan sejahtera.¹¹¹ Sedangkan Nasionalisme merupakan kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara sehingga semangat serta rasa cinta terhadap bangsa baik dalam kebersamaan maupun dalam pengorbanan demi kepentingan bersama.

Sikap nasionalisme erat kaitannya dengan suatu kesadaran masyarakat terhadap bangsa dan negaranya, namun seiring berkembangnya zaman konteks bela negara juga menjadi ikut berkembang. Jika dahulu konteks bela negara adalah mengangkat senjata di medan perang, maka saat ini arti bela negara semakin luas tergantung sudut pandang masing-masing.¹¹² Hal tersebut terjadi karena seiring berkembangnya zaman, maka perjuangan juga melalui hal yang berbeda. Jika dahulu untuk meraih kemerdekaan melalui perang, maka hari ini untuk meraih kemerdekaan dengan menurunkan tingkat kemiskinan, kebodohan, dan kesengsaraan yang masih banyak dialami oleh masyarakat Indonesia.

Penjelasan dari berbagai sumber dan definisi dari beberapa ideologi tersebut penulis menyimpulkan bahwa ideologi yang digunakan oleh PDI Perjuangan adalah ideologi utama yang mana masing-masing memiliki keunggulan dan bidang tersendiri. Seperti halnya ideologi Marhaenisme sebagai cara PDI Perjuangan dalam mendekatkan diri kepada masyarakat, menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, dan mengupayakan

¹¹¹ Andi Azikin, Konsep dan Implementasi Ideologi Pancasila dalam Rumusan Kebijakan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, 2018, 81.

¹¹² T Heru Nurgiansah dan Fazli Rachman, Nasionalisme Warga Muda di Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 19, No. 1, 2022, 67.

kesejahteraan *wong cilik*. Sedangkan Pancasila ajaran Bung Karno menjadi ideologi yang menuntun gerak langkah dan menjadi nafas perjuangan partai, sehingga dalam hal ini PDI Perjuangan menjadikan Pancasila sebagai ideologi dengan beberapa konsekuensi. Seperti, Pancasila harus menjadi keyakinan dan harapan masa depan bersama, lalu Pancasila harus menjadi dasar bagi kebijakan dan tindakan politik partai. Dan Pancasila juga harus menjadi bingkai untuk mengatur perilaku kader partai.¹¹³ Sedangkan nasionalisme menjadi ideologi PDI Perjuangan dalam menentukan sikap bernegara seperti yang dilakukan oleh Bung Karno, benih nasionalisme muncul ke dalam diri Bung Karno ketika melihat kemiskinan, kebodohan, dan penindasan yang dialami oleh masyarakat ketika itu.

Hal tersebut yang menginspirasi Bung Karno untuk menerbitkan artikel tentang Nasionalisme yang bertujuan untuk melawan kapitalisme barat.¹¹⁴ Dewasa ini negara kita masih terjajah oleh kemiskinan dan kebodohan sehingga PDI Perjuangan terus mengupayakan perbaikan di seluruh sektor agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Ideologi nasionalisme dengan di dalamnya terdapat konsep Marhaenisme.

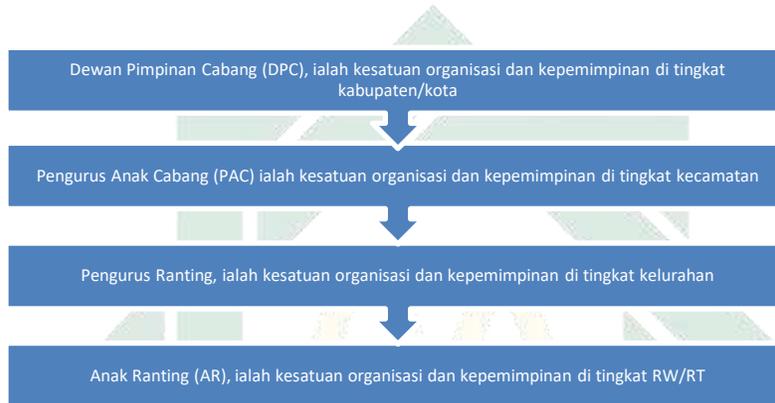
¹¹³ DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2014. *Sikap Politik PDI Perjuangan 2020*, hlm 3-4.

¹¹⁴ Ali Fahrudin, *Nasionalisme Soekarno dan Konsep Kebangsaan Mufassir Jawa*, (Jakarta: LITBANGDIKLAT Press, 2020), 49-56.

6. Struktur Organisasi PDI Perjuangan

Bagan 4.1

Struktur Organisasi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya



Sumber : AD/ART PDI Perjuangan

7. Komposisi Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

Tabel 4.1

Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya 2019-2024

STRUKTUR PENGURUS		
No.	Nama	Jabatan
1.	Dominikus Adi Sutarwijono	Ketua
2.	Drs. Sjukur Amaludin	Wakabid Kehormatan Partai
3.	Wimbo Ernanto, S.E	Wakabid Pemenangan Pemilu
4.	Hadrean Renanda	Wakabid Ideologi dan Kaderisasi
5.	Eusebius Purwadi	Wakabid Keanggotaan dan Organisasi
6.	Sukadar	Wakabid Politik
7.	Arjuna Rizki Dwi Krisnayana	Wakabid Hukum, HAM, dan Perundang-undangan

15.	HANURA	-	-	0	3	0
16.	PSI	-	-	-	-	4



Sumber : Website KPU dan DPRD Kota Surabaya

Namun PDI Perjuangan mungkin terbilang kurang mulus ketika menguasai lembaga legislatif di Kota Surabaya, karena ketika Armuji turun dari ketua DPRD pada 2003-2004 untuk menggantikan rekannya yang terkena kasus korupsi, berturut-turut PDI Perjuangan gagal mempertahankan posisi tersebut.¹¹⁶ Pada pemilu 2004 politisi PKB Musyafak Rouf terpilih menjadi Ketua DPRD Kota Surabaya menggantikan Armuji, tetapi PKB juga tidak bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada pemilu 2009 giliran Partai Demokrat yang menjadi pemenang dengan memperoleh 16 kursi dan menjadikan Wisnu Wardhana sebagai Ketua DPRD, namun Partai Demokrat mengalami penurunan drastis pada pemilu 2014 dengan memperoleh 6 kursi sedangkan PDI Perjuangan sebaliknya.

Pada pemilu 2009 PDI Perjuangan hanya memperoleh 8 kursi yang menjadikannya peringkat kedua di DPRD Kota Surabaya, namun mengalami peningkatan pada pemilu 2014 yang memperoleh hingga 15 kursi dan menjadikan Armuji sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2014-

¹¹⁶ Sholihin Nur, "Mengenal Lebih Dekat Pasangan Eri Cahyadi-Armuji, Paslon Nomor Urut 1 Pilwali Surabaya", diakses dari <https://bit.ly/3HjOnyx>, pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 1.02

2019.¹¹⁷ Hal tersebut juga terjadi pada pemilu 2019, PDI Perjuangan mengalami konsistensi dalam perolehan kursi dan menjadikannya menguasai lembaga legislatif di Kota Surabaya selama dua periode dan pada periode kedua diketuai oleh Adi Sutawidjono.¹¹⁸

Tabel 4.3

Data Perolehan Suara Pilkada Surabaya 2005-2020

Tahun	Koalisi	Paslon	Hasil Suara	Persentase
2005	PDIP	Bambang D.H.-Arif Afandi	429.999	51,34
	PKB	Alisyahbana-Wahyudin Hussein	199.057	20,73
	Demokrat-PAN	Erlangga Satriagung- Hermas Thony	179.255	18,67
	Golkar-PDS	Gatot Sudjito-Benyamin Hilli	88.929	9,26
	PDIP	Tri Rismaharini- Bambang D.H.	358.187	38,53
	Demokrat- Golkar	Arif Afandi-Adies Kadir	327.516	35,25
	PKS-PDS-PPP- PKNU	Fandi Utomo-Yulius Bustami	129.172	13,90

¹¹⁷ Mohammad Ridwan, "Ini dia 50 anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019", diakses dari <https://bit.ly/3wGy2iH>, pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 1.05

¹¹⁸ DPRD Kota Surabaya, "Pimpinan", diakses dari <https://dprd.surabaya.go.id/pimpinan>, pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 1.07

sebelum itu kader PDI Perjuangan yakni Bambang Dwi Hartono sudah menjadi Wali Kota Surabaya sejak 2002 menggantikan Soenarto yang mengalami gangguan kesehatan. Pada pemilihan Wali Kota Surabaya tahun 2005 Bambang Dwi Hartono sebagai kader PDI Perjuangan terpilih kembali hingga 2010.

Pada 2010 giliran era Tri Rismaharini yang terkenal sebagai *emak e arek suroboyo* terpilih dua periode berturut-turut, era kejayaan Surabaya ada pada periode Risma karena mengalami pembangunan yang masif.¹¹⁹ Dan pada pemilihan Wali Kota Surabaya terakhir PDI Perjuangan kembali memenangkan kontestasi dengan mengusung birokrat seperti Eri Cahyadi melawan koalisi dari berbagai partai yang mengusung purnawirawan jenderal polisi yakni Machfud Arifin.¹²⁰ Dengan kemenangan Eri Cahyadi, PDI Perjuangan kembali menjadikan Surabaya sebagai basis kadernya yang terkenal dengan solid dan militan.

Adanya tokoh-tokoh berkualitas di daerah membuat masyarakat memiliki preferensi dan kepentingannya dalam menentukan tokoh yang sesuai dengannya.¹²¹ Alasan tersebut bisa menjadi pondasi mengapa PDI Perjuangan sangat kuat di Kota Surabaya, apalagi banyak pos-pos ronda di sudut-sudut

¹¹⁹ Esti Widiyana, "Karier Risma: Dari Wali Kota Surabaya hingga Jadi Mensos", diakses dari <https://bit.ly/3HmcqNp>, pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 1.10

¹²⁰ Bobby Constantine Koloway, "Menang di Rekap KPU, Eri Cahyadi: Terimakasih Warga Surabaya, Mari Bekerjasama Bangun Kota Pahlawan!", diakses dari <https://bit.ly/3Y9xRYW>, pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 1.13

¹²¹ Nur Agustina, La Ode Monto Bauto, Ambo Upe, *Pengaruh Visi-Misi, Nilai Ideologi Partai, dan Figur Terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2017 (Studi di Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton)*, Jurnal Neo Societal, Vol. 3, No. 3, 2018 527.

kota yang dicat dengan warna merah dan logo banteng khas partai tersebut.

Adanya perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan sosial-politik adalah tuntutan dari reformasi yang mana menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dengan reformasi maka sistem juga diubah dari yang sebelumnya pemilihan tidak langsung menjadi demokrasi langsung. Seperti di tingkat lokal yakni pemilihan walikota maupun DPR Daerah dipilih langsung oleh rakyat, mekanisme tersebut diharapkan dapat mengembalikan kedaulatan rakyat.¹²²

Dinamika politik lokal di Kota Surabaya sendiri tergolong kondusif hanya ada beberapa konflik internal PDI Perjuangan seperti menolak Eri Cahyadi menjadi walikota karena bukan kader murni PDI Perjuangan, selebihnya tidak ada konflik politik identitas seperti di Jakarta pada tahun 2018.

B. Proses Ideologisasi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

Proses ideologisasi menjadi kunci suatu partai dalam menjalankan regenerasinya sehingga partai tidak kekurangan kader untuk menjalankan roda organisasi pada tahun-tahun yang akan mendatang. Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya tentu memiliki tugas khusus untuk menjalankan roda kaderisasi terlebih pasca covid semua hal bisa dipastikan banyak yang berubah baik dari strategi maupun pelaksanaan sistem kaderisasi.

1. Kaderisasi Formal DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

Kaderisasi formal yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya mengacu pada AD/ART yang digunakan oleh PDI Perjuangan di

¹²² Syah Firdaus, *Dinamika Politik Lokal Menjelang Pemilukada Kota Tasikmalaya*, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2012, 97-98.

seluruh Indonesia. DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya memiliki kewajiban untuk melaksanakan kaderisasi formal dalam hal ini Pelatihan Kader Pratama. Pelatihan yang paling mendasar tersebut dilaksanakan melalui kelas dengan pemberian materi, serta pendidikan berjenjang dengan tahapan dan proses yang berbeda disetiap jenjangnya. Materi dan Pemateri disesuaikan dengan kebutuhan DPC yang melaksanakan pendidikan kader.

Ideologi partai yang digunakan sebagai dasar dalam berpolitik digunakan dalam pemberian materi pendidikan kader tersebut. Pendidikan melalui kelas tersebut tidak hanya sampai ditingkat kabupaten, bahkan hingga tingkat padukuhan di desa. Tujuan adanya cabang ditingkat bawah adalah untuk mempercepat proses pengkaderan, sehingga akan menciptakan mesin partai yang sangat efisien.

Kaderisasi merupakan sistem yang mana berisi terkait pendidikan politik, sosialisasi politik, dsb yang terkait dengan pengetahuan mengenai politik. Menurut Eisendstandt sosialisasi politik merupakan komunikasi dengan manusia lainnya dan mempelajari dengan siapa individu tersebut secara bertahap memasuki jenis relasi umum. Namun Rush dan Althoff kontra dengan pendapat tersebut dan menjelaskan terkait pentingnya sosialisasi dalam politik, diantaranya sosialisasi merupakan proses dari suatu pengalaman, sosialisasi dapat mempelajari tingkah, nilai, maupun sikap seseorang dalam berpolitik, dan yang terakhir sosialisasi bisa diberikan kepada seluruh lapisan usia.¹²³

¹²³ A. A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) 77-78.

DPC PDI Perjuangan sendiri memiliki metode sosialisasi politik yang diberikan pada proses kaderisasi yang dimilikinya, menurut penjelasan dari Afrid Fahrezi sebagai Kader Pratama :

“Penanaman ideologi untuk saya yang lebih soft, jadi kita tidak dipaksa secara teoritis tetapi lebih dicontohkan bergerak secara langsung. Dari situ kita paham gimana kita harus memperlakukan orang lain dan gimana kita menyelesaikan *problem solving* suatu hal. Jadi teoritisnya kita hanya sampai tahap diskusi, tetapi kita banyaknya lebih langsung turun ke masyarakat dan gimana kita berperan di tengah-tengah masyarakat. Karena di PDI Perjuangan kan setiap kecamatan ada pengurus sendiri, kelurahan juga sampai ke RW, dari situ kita bisa berperan di masyarakat.”¹²⁴

Dengan demikian sosialisasi politik dapat diartikan sebagai proses pembentukan sikap dan orientasi politik bagi masyarakat maupun anggota partai sehingga dalam kaderisasi, sosialisasi politik menjadi kegiatan yang sangat mendasar untuk membentuk sikap kader dalam berpolitik. Pembentukan sikap kader tentu menjadi hal yang paling mendasar bagi suatu partai, karena kader partai harus terus berperilaku positif dan tidak merugikan partai agar mendapat pandangan yang baik dari masyarakat.

Terbentuknya kader yang berkualitas merupakan salah satu bentuk keberlanjutan organisasi, tidak adanya proses kaderisasi akan berdampak pada

¹²⁴ Wawancara dengan Afrid Fahrezi Salam, pada tanggal 1 Mei 2023 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

berjalannya fungsi partai menjadi kurang produktif. Kaderisasi memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan politik, keahlian, serta keterampilan dalam berpolitik, sehingga dengan adanya kaderisasi partai berharap kader mengerti kinerja partai dan budaya berpolitik di partai tersebut.

Menurut Haris et al., terdapat 3 prinsip dalam proses kaderisasi partai yang ideal dilaksanakan di Indonesia, yaitu terbuka, non diskriminatif, dan berjenjang.¹²⁵ Prinsip tersebut juga diterapkan oleh PDI Perjuangan dengan beberapa penjelasan berikut. PDI Perjuangan menganut prinsip terbuka dalam pelaksanaan kaderisasi yang mana setiap anggota partai berhak mewakili organisasi partai di bawah cabang untuk mengikuti proses kaderisasi dan ditetapkan sebagai kader partai. Bahkan PDI Perjuangan memperbolehkan masyarakat umum untuk mengikuti pendidikan kader, namun tentu melalui proses seleksi sesuai dengan mekanisme yang telah berlaku.

PDI Perjuangan menganut prinsip non-diskriminatif dengan artian memberikan akses yang sama dalam proses kaderisasi sehingga membuka ruang bagi seluruh anggota partai maupun masyarakat umum untuk mengikuti pendidikan politik yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan dan memberikan promosi terhadap karir politik melalui proses kaderisasi. PDI Perjuangan juga tidak memandang ras dan suku dalam merekrut kader sehingga aroma toleransi sangat kental karena memiliki kader dengan berbagai latar belakang.

PDI Perjuangan juga menganut prinsip kaderisasi berjenjang yang

¹²⁵ KPK “*Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*” diakses dari <https://bit.ly/3IjKTNV> , pada tanggal 18 Mei 2023, pukul 0.13

memiliki beberapa tahapan dalam proses kaderisasi seperti mengikuti kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut atau penyebutan lainnya yang akan dijelaskan oleh Althof Luissani selaku Anggota Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya sebagai berikut.

“Kalau kaderisasi sendiri kami menganut undang-undang partai maupun AD/ART jadi semua terpusat untuk proses kaderisasinya, dan pelaksanaan kaderisasi itu juga bertahap dalam artian instrukturnya harus dilatih oleh pusat di Jakarta baru boleh melatih di tingkat provinsi dan kota jadi untuk kaderisasi sudah terstruktur sesuai AD/ART partai. Karena DPC adalah tingkat kota maka yang bisa dilakukan oleh DPC dalam kaderisasi adalah menyelenggarakan kaderisasi tingkat dasar atau pratama.”¹²⁶

Merujuk pada Anggaran Rumah Tangga DPP PDI Perjuangan menerapkan prinsip kaderisasi berjenjang, hal tersebut tertuang pada pasal 81 tentang Kaderisasi Partai yang berisi sebagai berikut.

1. DPC Partai melaksanakan pendidikan Kader Pratama dan melaporkannya kepada DPD Partai.
2. DPD Partai melaksanakan pendidikan Kader Madya dan melaporkannya kepada DPP Partai.
3. DPP Partai melaksanakan pendidikan Kader Utama.
4. DPP Partai melakukan seleksi terhadap Kader Utama untuk

¹²⁶ Wawancara dengan Althof Luissani, pada tanggal 1 Mei 2023 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

ditunjuk menjadi Kader Pendidik sebagai pelaksana pendidikan kaderisasi di provinsi dan kabupaten/kota.¹²⁷

Prinsip kaderisasi berjenjang tersebut sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Haris et al., yang mana menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai kader yang masih eksis sampai saat ini, dan mampu meminimalisir kader-kader yang memiliki tujuan pragmatis dalam berpolitik. Jenjang kaderisasi juga memiliki dampak terhadap karir politik kader, seperti kader yang mengikuti pendidikan Kader Pratama karir politiknya hanya pada pengurus parpol maupun anggota legislatif di tingkat kabupaten/kota.

Adapun untuk calon kepala daerah memiliki kaderisasi yang berbeda, seperti halnya Eri Cahyadi yang mengikuti sekolah partai untuk calon kepala daerah yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan, karena menurut Eri sekolah partai sangat penting untuk membentuk calon kepala daerah yang kompeten, memiliki kapasitas, dan mampu adaptif dengan perubahan zaman namun tetap berpihak terhadap rakyat dan berideologi Pancasila. Eri juga memberikan pendapat terkait sekolah partai sebagai manajemen pengetahuan, juga sebagai proses sistematis untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat sehingga mampu mendorong kemajuan daerah yang akan dipimpin.¹²⁸

Menurut Althof, pendidikan Kader Pratama yang diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya tidak memiliki jadwal yang tetap

¹²⁷ AD/ART DPP PDI Perjuangan

¹²⁸ Abdul Hakim, *Mengubah Wajah Sejarah: Jalan Politik Eri Cahyadi, PDI Perjuangan, dan Pilkada Surabaya*, (Lamongan: Pagan Press, 2021), 110.

sebagaimana penjelasan berikut.

“DPC tidak memiliki waktu yang paten untuk menyelenggarakan kaderisasi, jadi ketika dirasa yang mengajukan database untuk menjadi kader sudah cukup banyak ya kita seleksi dan lakukan kaderisasi, yang awalnya masyarakat umum akan kita seleksi untuk mengikuti sekolah kader pratama. Dalam 1 tahun bisa 1 sampai 2 kali karena memiliki seleksi yang sangat panjang.”¹²⁹

Karena proses seleksi yang ketat dan sangat panjang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti spionase. Maka menurut penulis hal tersebut wajar dilakukan oleh PDI Perjuangan, karena menurut penulis partai berbeda dengan organisasi kaderisasi kemahasiswaan yang setiap tahun senior bisa demisioner dari kepengurusan, sedangkan di partai bahkan sampai tua pun masih ingin memiliki jabatan di politik.

Menurut Firmanzah, setiap partai politik memiliki program pendidikan untuk kader demi kemajuan partai. Adapun pendidikan politik untuk kader bertujuan untuk mencetak kader yang berkualitas.¹³⁰ Pendidikan politik bagi kader diinginkan banyak orang untuk mendapatkan predikat sebagai Kader Pratama maka tentu partai harus selektif terhadap calon kader seperti yang dijelaskan oleh Althof sebagai berikut.

“Karena kita di DPC ini tingkat yang paling dasar, karena menjadi

¹²⁹ Wawancara dengan Althof Luissani, pada tanggal 1 Mei 2023 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

¹³⁰ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015).

pintu masuk utama dari masyarakat umum menjadi kader PDI Perjuangan sehingga harus lebih berhati-hati untuk lebih detail mencari kader.“

Pelaksanaan pendidikan politik harus berorientasi pada upaya untuk mengembangkan pengetahuan (Kognitif), menumbuhkan nilai dan berkomunitas (Afeksi) dan mewujudkan kecakapan dalam berpolitik baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok (Psikomotorik).

Di dalam sistem kaderisasi yang terdapat pendidikan politik tentu memuat beberapa materi yang ditujukan untuk¹³¹ membentuk sikap dan menambah pengetahuan calon kader. Materi yang diberikan menurut pengalaman Agus yang juga menjabat sebagai Sekretaris PAC PDI Perjuangan Kecamatan Wonokromo ketika menjalani proses pendidikan Kader Pratama sebagai berikut.

“Waktu itu menginapnya di Asrama Haji Sukolilo, itu pendidikan kader yang dimulai dari pagi sampai sore mulai dari materi dan makan siang. Adapun materi yang diberikan terkait ideologi yang diajarkan oleh Bung Karno, ada juga tentang sistem organisasi karena saya dulu juga mengawali dari ranting dan sekarang di PAC, lalu ada juga teknik penggalangan yang membentuk kader untuk bisa menggalang aspirasi masyarakat, yang keempat ada materi analisa

¹³¹ Dihlis Zatul Kharismandari dan Agus Satmoko Adi. Peran Partai Politik dalam Menerapkan Pendidikan Politik Terhadap Pengurus dan Kader Partai (Studi Pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 3, 2015, 320.

penguatan basis untuk mempertahankan wilayah yang telah dikuasai, dan yang terakhir ada penugasan seperti distribusi kader.”¹³²

Agus dalam pengalamannya menjelaskan bahwa beliau juga menjadi saksi ketika PDI Perjuangan dengan sengaja dihancurkan dari dalam oleh Orde Baru pada saat itu. DPD PDI Perjuangan memiliki lokasi baru dalam melaksanakan proses kaderisasi yang biasa disebut dengan Balai Pendidikan dan Latihan PDI Perjuangan di Kota Batu, namun ketika pandemi sistem kaderisasi sedikit berubah seperti yang dijelaskan oleh Afrid sebagai berikut.

“Kalau proses kaderisasi proses pelaksanaan sebenarnya bukan dari DPC tetapi dari DPD, jadi kita kader-kader PDI Perjuangan se Jawa Timur dikumpulin dulu nanti mengikuti kader pratama melalui DPD. Biasanya kalau offline dilaksanakan di Batu, tetapi berhubung waktu itu saya proses kaderisasinya masa covid pada tahun 2021 melalui daring, full daring. Disitu kita diajarkan tentang ideologi nasionalisme, bagaimana cara kita berpolitik, bagaimana cara kita berperan di masyarakat, jadi sistem kaderisasinya cukup baik menurut saya.”

Dengan adanya materi tersebut tentu partai memiliki tujuan untuk membentuk perilaku kader baik dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku

¹³² Wawancara dengan Imam Agus Riyanto, tanggal 1 Mei 2023 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

sehari-hari, maupun perilaku berpolitik. Sehingga kader yang sudah diberikan pendidikan politik diharapkan mengetahui betul dan memilah mana yang merugikan partai dan sebisa mungkin untuk dihindari.

Menurut Reuven, distribusi kader merupakan fungsi akhir dari partai politik untuk berlomba-lomba menempatkan calon terbaiknya yang memenuhi syarat untuk memenangkan kontestasi.¹³³ Dalam hal tersebut distribusi kader memiliki peran yang cukup penting untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman kader terhadap tanggungjawab yang akan diemban, sehingga kader yang berkualitas akan menunjukkan potensinya. Adapun proses distribusi kader di DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya dijelaskan oleh Achmad Hidayat selaku Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya sebagai berikut.

“Jadi kita memiliki 5 dapil, dari dapil 1 hingga dapil 5 dimana terdiri dari masing-masing kecamatan. Lalu kita memiliki 31 pengurus PAC, lalu punya sekitar 154 pengurus ranting, dan sekitar 1300 pengurus anak ranting. Maka dari itu kami sedang melakukan stabilisasi maka disitu akan muncul mana kader yang potensial, sehingga muncul anggota dewan dan tahapan pemilu itu juga tahapan kaderisasi. Jadi semuanya itu proses kaderisasi endingnya adalah nanti pada saat pemilihan entah itu legislatif maupun pemilu kepala daerah dan lain sebagainya, itu tahapan proses kaderisasi

¹³³ Muryanto Amin, *Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik (Inspirasi Sumatra Utara)*, (Medan: USU Press, 2018) 102.

yang kita lakukan. Tidak hanya teori pemahaman ideologi, tidak hanya teori saja tetapi juga dilakukan praktek kerja kerakyatan, bagaimana seseorang itu mau berkorban, bagaimana seseorang itu mau memperjuangkan kepentingan masyarakat dan bagaimana seseorang tersebut mau memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara.”¹³⁴

Adapun kendala yang dialami oleh DPC PDI Perjuangan dalam proses distribusi kader juga dijelaskan oleh Achmad sebagai berikut.

“Kita harus kerja lebih ekstra sekarang karena ada lembaga-lembaga seperti generasi millenial yang melek politik sehingga metode kaderisasi juga tidak bisa sama seperti dulu, sehingga ada pembaruan-pembaruan.”

Proses distribusi kader yang diterapkan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya sesuai dengan penjelasan Reuven terkait fungsi akhir dari partai yaitu bagaimana mereka mampu menempatkan kader untuk menduduki jabatan-jabatan strategis baik di eksekutif maupun di legislatif.

Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa partai politik berperan dalam melakukan pendidikan politik terhadap pengurus dan kader.¹³⁵ Sehingga PDI Perjuangan dalam hal ini juga berperan

¹³⁴ Wawancara dengan Achmad Hidayat, tanggal 1 Mei 2023 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

¹³⁵ Indonesia, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, UU No. 2 tahun 2011.

penting terhadap pendidikan politik yang ditujukan kepada kader, PDI Perjuangan sendiri dalam pendidikan politik berharap agar kader memiliki jiwa militan dan kritis dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh bangsa ini.

Penulis memiliki temuan terkait penerapan metode pendidikan politik yang diterapkan oleh PDI Perjuangan dengan penyampaian materi. Selain penyampaian materi pendidikan politik, Badiklatpus PDIP juga menetapkan beberapa metode pendidikan politik. Salah satu metode pendidikan politik yang diterapkan oleh Badiklatpus PDI Perjuangan merupakan Metode Andragogi.

Metode Andragogi merupakan metode yang digunakan terhadap pendidikan politik masyarakat dewasa, definisi tersebut sejalan dengan pemikiran Knowles yang menyatakan bahwa: *andragogy as the art and science to helping adult a learner*. Membantu masyarakat dewasa dalam belajar menjadikan posisi guru dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, bukan menggurui, sehingga relasi antara guru dan peserta didik lebih bersifat *multicomunication*.¹³⁶

Hal yang paling mendasar dari metode andragogi merupakan karakteristik dari peserta dengan usia dewasa terletak pada tanggung jawabnya. Dengan pembelajaran andragogi tentu akan terjadi komunikasi dua arah dengan strategi pembelajaran diskusi, analisa studi kasus, dan pemecahan masalah. Sehingga materi-materi yang diberikan lebih mudah dipahami peserta dewasa yang tentu

¹³⁶ Hiryanto, Pedagogi, Andragogi, dan Heutagogi Serta Implikasinya dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, Vol. XXII, No. 01, 2017, 68.

berbeda dengan anak-anak, hal tersebut karena peserta dewasa memiliki konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, kebutuhan pengetahuan, dan motivasi.¹³⁷ Metode andragogi oleh PDI Perjuangan dibagi menjadi tiga yaitu kemampuan kader memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat, pembentukan organisasi sayap, dan pembentukan jaringan.

Partai menerapkan sistem ini dengan menyebar para anggota dan kader ke masyarakat guna melatih mereka untuk dapat peka terhadap kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya kaderisasi informal yang merupakan keberlanjutan dari kaderisasi formal, metode andragogi merupakan implementasi dari penyampaian materi di dalam kelas sehingga kader tidak hanya menerima materi saja namun juga pengalaman secara langsung di lapangan.¹³⁸ Penetapan metode tersebut digunakan untuk menyampaikan materi secara intensif untuk membentuk pemikiran dan perilaku kader.

Adapun upaya partai untuk mengkombinasi antara penyampaian materi dengan praktek secara langsung menjadi seimbang sehingga kader dapat mengamalkan apa yang telah mereka pelajari untuk kepentingan masyarakat. Pelatihan kader pratama pada umumnya dilaksanakan sekitar 3 hari pada akhir pekan, berikut merupakan daftar susunan acara pelatihan kader pratama.

¹³⁷ Hiryanto, 72.

¹³⁸ Desy Nur Fitriyah. Skripsi: *Pendidikan Politik Kader Partai di Indonesia (Studi Kasus Pendidikan Kader Pratama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya)*. (Malang: UB, 2018), 79.

Jum'at	19.00-20.00	Indonesia Menggugat Tahun 1930	Aula	Div. Acara dan Pemateri
	20.00-20.15	Post Test	Aula	Div. Acara
	20.15-21.15	Mencapai Indonesia Merdeka Tahun 1933	Aula	Div. Acara dan Pemateri
	21.15-21.30	Post Test	Aula	Div. Acara
	21.30-22.00	Pengkondisian Peserta	Ruang Istirahat	Div. Keamanan
	22.00-05.00	ISTIRAHAT		
	05.00-07.00	Olahraga dan Bersih Diri	Lapangan	Div. Keamanan
	07.00-08.00	Sarapan	Ruang Makan	Div. Konsumsi
	08.00-08.30	Pengkondisian Peserta	Aula	Div. Acara
	08.30-09.30	Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945	Aula	Div. Acara dan Pemateri
	09.30-09.45	Post Test	Aula	Div. Acara
	09.45-10.45	Membangun Dunia Kembali 1960	Aula	Div. Acara dan Pemateri
	10.45-11.00	Post Test	Aula	Div. Acara
	11.00-12.00	Nawaksara Tahun 1966	Aula	Div. Acara dan Pemateri
	12.00-12.15	Post Test	Aula	Div. Acara

Sabtu	12.15-13.15	ISHOMA		
	13.15-14.15	Pidato Ketua Umum pada Pembukaan Kongres III Tahun 2010 Bali dan Pidato-pidato Ketua Umum Lainnya.	Aula	Div. Acara dan Pemateri
	14.15-14.30	Post Test	Aula	Div. Acara dan Pemateri
	Materi Ideologi Pendukung			
	14.30-15.30	Kapitalisme Bangsa Sendiri 1932	Aula	Div. Acara dan Pemateri
	15.30-15.45	Post Test	Aula	Div. Acara
	15.45-16.45	Amanat Presiden Soekarno Tahun 1959	Aula	Div. Acara dan Pemateri
	16.45-17.00	Post Test	Aula	Div. Acara
	17.00-19.00	ISHOMA		
	19.00-20.00	Amanat Presiden Soekarno Tahun 1960	Aula	Div. Acara dan Pemateri
	20.00-20.15	Post Test	Aula	Div. Acara
	20.15-21.15	Deklarasi Ekonomi Tahun 1963	Aula	Div. Acara dan Pemateri
	21.15-21.30	Post Test	Aula	Div. Acara
	21.30-22.30	Marhaenisme adalah Teori Perjuangan Tahun 1965	Aula	Div. Acara dan Pemateri
	22.30-22.45	Post Test	Aula	Div. Acara
	22.45-23.45	Dinamika Kelompok (Diskusi dan Presentasi)	Aula	Div. Acara

	23.45-00.00	Pengkondisian Peserta	Ruang Istirahat	Div. Keamanan
Minggu	00.00-05.00	ISTIRAHAT		
	05.00-07.00	Olahraga dan Bersih Diri	Lapangan	Div. Keamanan
	07.00-08.00	Sarapan	Ruang Makan	Div. Konsumsi
	08.00-08.30	Pengkondisian Peserta	Aula	Div. Acara
	08.30-09.30	Materi Sistem Organisasi dan Kepartaian	Aula	Div. Acara dan Pemateri
	09.30-09.45	Post Test	Aula	Div. Acara
	09.45-10.00	Dinamika Kelompok (Diskusi dan Presentasi)	Aula	Div. Acara
	10.00-11.00	Materi Teknik Penggalangan	Aula	Div. Acara dan Pemateri
	11.00-11.15	Post Test	Aula	Div. Acara
	11.15-11.30	Dinamika Kelompok (Diskusi dan Presentasi)	Aula	Div. Acara
	11.30-12.30	Materi Analisa <i>Stakeholder</i> dan Penguatan Basis	Aula	Div. Acara dan Pemateri
	12.30-12.45	Post Test	Aula	Div. Acara
	12.45-13.00	Dinamika Kelompok (Diskusi dan Presentasi)	Aula	Div. Acara
	13.00-14.00	ISHOMA		
	14.00-15.00	Materi Penugasan (Pasca Diklat)	Aula	Div. Acara dan Pemateri
	15.00-15.15	Post Test	Aula	Div. Acara
	15.15-15.30	Dinamika Kelompok (Diskusi dan Presentasi)	Aula	Div. Acara

“Kalau menurut saya kaderisasi itu untuk mendidik ideologi terhadap pengurus kepartaian. Dan waktu itu dua hari itu menginapnya di Asrama Haji Sukolilo, itu pendidikan kader yang dimulai dari pagi sampai sore mulai dari materi, makan siang, dan jalan di atas api. Saya mengikuti kaderisasi dua kali, dan memang kalau dibutuhkan mengenai pertanyaan terkait ideologi Bung Karno dan fanatisme simpatisan PDI Perjuangan. Dulu saya kan berawal dari anak ranting ke ranting, dan sekarang di PAC.”

Kesan ketika menjalani kegiatan kaderisasi tersebut terasa lebih bermakna lagi ketika sedang mengimplementasikan ideologi yang telah dipelajari dengan membantu masyarakat sekitar, Agus menjelaskan mengenai makna yang paling mendalam sehingga dapat menjadi pedoman dalam berpolitik sebagai berikut:

“Hal yang paling bermakna dalam mengimplementasikan ideologi adalah kita waktu seperti gempa bumi di Pacitan itu saja saya ditugaskan satu minggu disana oleh DPC, itu pun tanpa gaji apapun. Itu makna yang paling saya ingat ketika kita membantu orang susah dari arus bawah itu gimana kita baru merasakan memang yang disebut gotong royong itu seperti ini dan nantinya akan dijadikan terhadap perilaku berpolitik.”¹³⁹

Tentu hal tersebut menjadi kesan yang paling bermakna dalam benak Agus, karena beliau juga menjadi saksi terhadap peristiwa dinamika partai

¹³⁹ Wawancara dengan Imam Agus Riyanto, tanggal 1 Mei 2023 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

yang terjadi di Sukolilo sehingga beliau memahami betul terkait dinamika partai dari tingkat lokal sampai ke tingkat nasional. Berbeda dengan Agus, penulis memiliki narasumber yang juga terlahir dari generasi millennial yang bahkan menjalani kaderisasi dalam era pandemi.

Afrid Fahrezi Salam Kader Pratama DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya memiliki kesan tersendiri terhadap sistem kaderisasi yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan yang mana kaderisasi kader pratama ketika itu tidak diselenggarakan oleh DPC tetapi dihimpun secara langsung dan dilaksanakan oleh DPD karena masih pada era pandemi sehingga semuanya pun dilaksanakan secara online sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau proses kaderisasi di zaman saya ketika menjalani kaderisasi proses pelaksanaan sebenarnya bukan dari DPC tetapi dari DPD, jadi kita kader-kader PDI Perjuangan se-Jawa Timur dikumpulin dulu nanti mengikuti kader pratama melalui DPD. Biasanya kalau offline dilaksanakan di Batu, tetapi berhubung waktu itu saya proses kaderisasinya masa covid pada tahun 2021 melalui daring, full daring. Disitu kita diajarkan tentang ideologi nasionalisme, bagaimana cara kita berpolitik, bagaimana cara kita berperan di masyarakat, jadi sistem kaderisasinya cukup baik menurut saya.”

Kita tentu memahami banyak kekurangan terkait pembelajaran online sehingga terkadang kader belum memahami betul apa yang menjadi pembelajaran pada sistem kaderisasi, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan sehingga Afrid tetap memberikan kontribusi terbaik terhadap

kepentingan masyarakat. Afrid menjelaskan terkait makna yang paling diingat dalam implementasi kaderisasi formal tersebut seperti:

“Bagaimana cara kita membantu orang yang di bawah kita, ibaratnya membantu masyarakat. Kebanyakan kan orang yang dibantu orang yang tidak mampu dan tergolong orang yang ekonominya rendah, kita disana berperan membantu permasalahannya seperti penanganan saat dia sakit, butuh bantuan bagaimana mengurus berkas-berkas keluarganya seperti di RT/RW atau kesulitan di kelurahan kita bantu mediasi secara langsung juga bagaimana dengan proses itu tadi.”¹⁴⁰

Sehingga apa yang telah dipelajari dalam proses kaderisasi selayaknya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadikan kader sebagai poros yang bermanfaat baik terhadap masyarakat sekitar lalu bermanfaat terhadap masyarakat luas.

2. Kaderisasi Informal DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

Kaderisasi informal DPC PDI Perjuangan Surabaya dilaksanakan melalui terjun langsung ke masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerjunkan anggota, kader dan anggota fraksi PDI Perjuangan langsung di tengah masyarakat. Kaderisasi informal merupakan lanjutan dari kaderisasi formal. Proses ideologisasi memang tidak berhenti melalui pemberian materi, karena hanya dengan pemberian materi secara formal memang menghasilkan

¹⁴⁰ Wawancara dengan Afrid Fahrezi Salam, tanggal 1 Mei 2023 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

pemikiran baru untuk kader. Namun hal tersebut belum dapat merubah perilaku kader dalam kehidupan sehari-hari karena pengaruh dari diri sendiri terhadap penanaman ideologi sering bertentangan. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, kader dilibatkan untuk lebih aktif dalam mengikuti kegiatan partai yang mana hal tersebut termasuk dalam kategori kaderisasi informal.

Kaderisasi informal merupakan kelanjutan dari kaderisasi formal yang berbentuk implementasi atau praktek langsung dari kaderisasi formal juga dibenarkan oleh Althof dengan penjelasan sebagai berikut.

“Kalau kaderisasi informal di lingkup DPC PDI Perjuangan adalah bagaimana kader maupun kepengurusan untuk terjun langsung ke masyarakat dan menemui struktur paling bawah untuk memberikan arahan dan tugas-tugas dalam membantu masyarakat.”¹⁴¹

Ketika menjalani pendidikan kader tentu ada perbedaan yang harus dijadikan peluang oleh partai untuk mematangkan idealism dari kader. Perbedaan tersebut menjadikan kader lebih matang terhadap ideologi yang dianut sehingga mampu membentengi kader-kadernya dari kecenderungan penyimpangan-penyimpangan di masa mendatang. Dengan kata lain penerapan strategi pendidikan kader yang dijalani oleh PDI Perjuangan khususnya di Kota Surabaya telah sesuai dengan visi dan tujuan partai PDI Perjuangan itu sendiri dan telah berhasil dengan baik.

¹⁴¹ Wawancara dengan Althof Luissani, tanggal 29 Mei 2023 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

Kaderisasi Informal merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas kader serta menjadi sarana untuk memberikan pelajaran kepada kader dalam mempersiapkan kontestasi politik yang akan segera terjadi. Dengan PDI Perjuangan selalu menguasai kontes politik di Surabaya maka kaderisasi informal dianggap telah berjalan dengan baik. Proses tersebut seringkali dipakai untuk membentuk citra tokoh dan partai yang mampu menarik simpati masyarakat dengan cara terjun langsung menyapa dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kedekatan tersebut akan mengedukasi masyarakat untuk lebih mudah dalam berhubungan dengan pemerintah terkait.

Perlu ditekankan kembali bahwa dalam menjalankan kegiatan kepartaian PDI Perjuangan tidak mengandalkan satu atau beberapa tokoh partai dalam mengembangkan partai namun semua keberhasilan partai merupakan hasil kerja keras para kader PDI Perjuangan, hal tersebut juga bisa dibuktikan dengan banyaknya banner secara sukarela dari kader partai dengan ditambahkan foto Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sehingga dari hasil tersebut dapat dinilai bahwa upaya partai dalam mendorong kadernya untuk turun dan aktif dalam masyarakat telah berhasil baik dalam proses pendidikan kadernya secara formal maupun diluar pendidikan kader melalui serangkaian kegiatan dan program yang digunakan oleh PDI Perjuangan Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah dihimpun, penulis membagi kaderisasi informal menjadi tiga, yaitu penugasan kader dalam setiap

kegiatan partai di wilayah Surabaya (kepanitiaan atau peserta), kedua penugasan kader dalam struktur kepengurusan partai, dan yang terakhir penugasan kader sebagai pengambil kebijakan (anggota dewan, walikota, dsb).

Klasifikasi yang diberikan penulis sesuai dengan penjelasan Mangkubumi dalam Qodir dan Sarbiran, yang menjelaskan mengenai unsur seleksi merupakan aspek pemberian pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kader. Penempatan yang dilakukan oleh kader berupa penugasan kader seperti melibatkan kader dalam kegiatan organisasi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan secara langsung.

Dan unsur yang terakhir adalah kewajiban partai untuk mengarahkan karir kader dengan memberikan tanggung jawab seperti menjadikan kader sebagai calon kepala daerah maupun calon legislatif, bisa juga mendistribusikan kader terhadap posisi-posisi strategis di pemerintahan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh kader.¹⁴²

Pelaksana dari kaderisasi informal sendiri merupakan para kader yang telah mengikuti Pelatihan Kader Pratama dengan harapan untuk mengaplikasikan ideologi yang telah dipelajari untuk kepentingan masyarakat luas. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap partai dengan menghadirkan orang-orang yang telah terpilih untuk membantu serta mengangkat permasalahan ditingkat bawah ke tingkat yang

¹⁴² Titi Fitrianita dan Zulia Antan Ambarsari, Menakar Kaderisasi KAMMI Komisariat Universitas Brawijaya Malang. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 3, No. 1, 2018, 19.

lebih tinggi. Sehingga masyarakat tidak merasa hanya dijadikan sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan, namun lebih dari itu juga difasilitasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Pertama, penugasan kader dalam setiap kegiatan partai di wilayah Surabaya merupakan hal mendasar yang dilakukan oleh kader pasca diklat. Hal tersebut untuk memberikan pengalaman lebih terhadap kader dan melihat sejauh mana partisipasi kader terhadap setiap kegiatan yang dijalankan oleh partai. Partisipasi kader terhadap kegiatan sangat penting karena setiap partai memiliki kegiatan rutin yang wajib diikuti dalam menjalankan roda organisasi partai. Terlebih partai besar seperti PDI Perjuangan tentu memiliki kegiatan yang jauh lebih intens dibanding partai lainnya, sehingga menjadi keharusan dari partai untuk melibatkan kader dalam setiap kegiatannya.

Penempatan kader dalam setiap kegiatan partai merupakan kaderisasi informal yang terus berlanjut pasca diklat, seperti yang diketahui penulis bahwa Afrid merupakan kader yang telah mengikuti Pelatihan Kader Pratama dan aktif dalam setiap kegiatan partai. Terlebih lagi jika hal tersebut berhubungan dengan masyarakat, tentu menjadi lebih menarik karena sesuai dengan penjelasan dari kaderisasi informal yang merupakan implementasi dari setiap materi yang telah dipelajari pada kaderisasi formal. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Afrid di sub bab tentang kaderisasi formal bahwa secara praktek memang tugas kader adalah membantu masyarakat dalam setiap kegiatan yang digagas oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

Kedua, penugasan kader dalam struktur kepengurusan partai merupakan proses selanjutnya yang dijalankan oleh kader. Sementara itu, penempatan kader menjadi pengurus partai tentu berjenjang dan melalui proses yang panjang. Agus yang merupakan Sekretaris PAC PDI Perjuangan Kecamatan Wonokromo juga memulai kepengurusan dari bawah sesuai dengan penjelasan beliau berikut.

“Dulu saya kan berawal dari anak ranting ke ranting, dan sekarang di PAC dan pengurusnya kan mulai dari anak ranting atau tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan lalu ke Kota. Jadi struktur dan tahapannya itu jelas dalam berproses.”¹⁴³

Dengan kesempatan menjadi pengurus partai tentu menjadi sarana pembelajaran oleh kader dari sistem kaderisasi informal yang terjadi di PDI Perjuangan. Sehingga kader memiliki pengalaman dengan mengurus organisasi partai, meskipun dimulai dari struktur yang paling bawah tentu memiliki dinamika yang berbeda dalam setiap jenjangnya. Proses kepengurusan yang panjang tersebut tentu menjadikan kader lebih bersemangat dalam mencari pengalaman, sehingga kader akan siap untuk naik dalam setiap jenjang dengan dinamika yang tentu berbeda.

Ketiga, promosi atau penugasan kader sebagai pengambil kebijakan merupakan kaderisasi informal yang terakhir dan paling penting karena hal tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan bermasyarakat. Untuk

¹⁴³ Wawancara dengan Imam Agus Riyanto, tanggal 1 Mei 2023 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

mencapai hal tersebut kader harus melalui proses yang cukup panjang dalam menjalankan roda organisasi partai, meskipun masih sering terlihat jalan cepat yang dicapai oleh artis, namun tetap mereka juga tidak dengan instan untuk menaikkan popularitas.

Setelah ditunjuk oleh partai sebagai pejabat publik, kader yang ditunjuk harus mengikuti kaderisasi sekolah politik calon pejabat publik untuk memahami ideologi dan peran pejabat publik terhadap masyarakat luas. Karena Bagi PDI Perjuangan, memahami dan menyebarkan pemikiran Bung Karno sebagai teori perjuangan merupakan tujuan dari perjuangan politik yang dijalani oleh PDI Perjuangan.

Pemahaman terkait pemikiran Bung Karno sebagai dasar setiap kader dan anggota, dimana masing-masing dari mereka menyadari bahwa nilai Marhaenisme merupakan acuan partai menentukan langkah gerak dalam usaha pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dalam program perjuangan PDI Perjuangan. Kader PDI Perjuangan dalam setiap perilakunya diharapkan dapat mengimplementasikan ideologi yang telah dipelajari sehingga menjadikan perilaku kader tidak menyimpang terhadap ideologi tersebut.

Bahkan ketika kader sudah menjadi pejabat publik, PDI Perjuangan juga berharap kader mampu mengimplementasikan ideologi yang telah dipahami untuk dijadikan landasan berpikir dalam setiap kebijakan publik yang diambil. Dalam hal ini, penulis memiliki beberapa penemuan terkait peran ideologi terhadap kebijakan publik yang diambil oleh kader DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Menurut Anggara, kebijakan publik merupakan apapun yang

dilakukan oleh pemerintah dan tidak dilakukan.¹⁴⁴

Konsep tersebut memiliki makna yang cukup luas karena mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah ketika menghadapi suatu masalah, adapun maksud dari konsep tersebut yaitu kebijakan publik hanya dihasilkan oleh pemerintah, bukan organisasi swasta.

Kader PDI Perjuangan menjadi pimpinan di DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya sekaligus sejak 2014, dengan Armuji sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya dan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya. Sehingga analisa tentang peran ideologi terhadap kebijakan publik akan fokus kepada beberapa kebijakan publik yang dikeluarkan oleh kedua instansi tersebut.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada tahun 2017 menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia tersebut ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, data peningkatan tersebut akan dijelaskan oleh tabel berikut.

Tabel 4.5

Indeks Pembangunan Manusia 2010-2020

Kota	IPM Metode Baru	
Surabaya	2010	77,20
	2011	77,62

¹⁴⁴ Muhammad Akbar Tri Asyafin Putra dan Agus Widiyarta. Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya). *Jurnal Academia Praja*, Vol. 5, No. 2, 2022, 134.

kepada masyarakat kecil, karena fasilitas-fasilitas publik tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang sulit dimiliki oleh masyarakat kecil dan hal tersebut dapat terpenuhi ketika Risma menjadi pimpinan Pemkot Surabaya.

Firmanzah menjelaskan bahwa hubungan antara ideologi politik dengan kekuasaan sangat erat. Ideologi politik bisa menjadi alat untuk mencapai kekuasaan. dalam dunia politik memainkan peranan penting untuk meningkatkan posisi tawar-menawar. Seperti halnya PDI Perjuangan di Kota Surabaya, memiliki basis pendukung yang kuat sehingga memiliki legitimasi atas kemenangan tersebut dan mengatasmakan kepentingan bersama dalam mengambil setiap kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan data yang telah dihimpun, kaderisasi informal DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Veithzal dalam Santosa, Rahmat bahwa kaderisasi informal merupakan proses kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia di lingkungan masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat terhadap lingkungan ketika masa kecil, remaja, bahkan hingga dewasa sebagai proses membentuk sifat dan sikap yang ada di dalam diri sehingga memiliki kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kaderisasi informal pada dasarnya adalah lanjutan dari kaderisasi formal yang mana hal tersebut adalah implementasi dari apa yang didapat pada kaderisasi formal dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kaderisasi informal menjadikan masyarakat awam sebagai objek karena pengetahuan politiknya yang masih rendah sehingga kader yang sudah terdidik pada tahap

kaderisasi formal diwajibkan untuk meneruskan ideologi partai hingga sampai kepada masyarakat.

Hasil wawancara dari Althof terkait penjelasan kaderisasi informal yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya sesuai dengan penjelasan Veithzal sebagai berikut:

“Kalau kaderisasi informal di lingkup DPC PDI Perjuangan adalah bagaimana kader maupun kepengurusan untuk terjun langsung ke masyarakat dan menemui struktur paling bawah untuk memberikan arahan dan tugas-tugas dalam membantu masyarakat.”

Hal tersebut menjadikan kaderisasi informal sebagai tindak lanjut dari kaderisasi formal yang mana untuk membentuk kepribadian kader agar lebih peka terhadap situasi di masyarakat, sehingga kader memiliki rasa empati yang tinggi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Kaderisasi informal sendiri adalah aktualisasi dari teori-teori yang dipelajari pada kegiatan kaderisasi formal sehingga kader mengimplementasikan secara langsung apa yang ia telah pelajari.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Proses Ideologisasi

1. Faktor Pendukung

Kaderisasi memang tidak selalu berjalan tanpa hambatan, PDI Perjuangan sebagai partai yang memiliki banyak kader berkualitas tentu memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat selama proses kaderisasi berlangsung. Adanya faktor-faktor tersebut tentu menjadikan PDI Perjuangan harus lebih improve dalam menyesuaikan perkembangan zaman sehingga tidak larut

dalam sistem kaderisasi yang sudah kuno dan tak terpakai.

Faktor pertama dalam menghasilkan kader yang berkualitas adalah membentuk motivasi dari calon kader agar mereka lebih dari niat dalam mempelajari setiap materi yang diberikan serta memaksimalkan peran dari calon kader yang masih muda. Pernyataan tersebut, sesuai dengan apa yang telah dikatakan Afrid selaku kader pratama di DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya sebagai berikut:

“Menurut saya untuk proses kaderisasi PDI Perjuangan sejauh ini untuk menggaet khususnya anak muda itu sangat baik, kita punya organisasi sayap partai. Kita juga menggerakkan pemuda itu menurut saya suatu jalan yang sangat baik buat ke depannya untuk melalui kaderisasi dari pemuda itu bisa menjadi penerus-penerus pemimpin yang sekarang. Jadi tidak hanya stagnan pada pemimpin yang sekarang dan tidak penerusnya, jadi kita betul-betul memanfaatkan organisasi sayap pemuda yang dimiliki oleh partai seperti Taruna Merah Putih, Relawan Perjuangan Demokrasi, dan Banteng Muda Indonesia yang dipimpin Mas Fuad yang baru dilantik itu, ada juga yang ranahnya ke agama seperti Baitul Muslimin Indonesia.”¹⁴⁵

Dengan adanya generasi baru tersebut masa depan PDI Perjuangan memiliki rasa aman karena seringkali dicap sebagai partai pemuda dengan

¹⁴⁵ Wawancara dengan Afrid Fahrezi Salam, tanggal 1 Mei 2023 di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya

segala aktivitas yang dimiliki oleh beberapa sayap partai dalam menjalankan beberapa program kerja yang dimiliki oleh partai.

Niat dan motivasi calon kader PDI Perjuangan menjadi faktor terpenting dalam mengembangkan diri selama mengikuti proses kaderisasi. Motivasi tentu mempengaruhi kader dalam menjalankan setiap kegiatan yang diberikan oleh partai, terlebih jika kader memiliki motivasi yang tinggi tentu berpengaruh juga terhadap metode pembelajaran yang dijalani. Kader dengan motivasi tinggi cenderung lebih aktif dalam setiap kegiatan, hal tersebut seperti kader pada umumnya yang lebih banyak porsi belajar untuk diri sendiri sehingga lebih unggul daripada kader yang lain. Terlebih ketika proses kaderisasi terdapat sistem penilaian terhadap sikap dan perilaku ketika proses kaderisasi, hal tersebut juga sesuai dengan penjelasan dari Agus bahwa ideologi juga memiliki peran terhadap perilaku kader sebagai berikut:

“Ideologi berperan mas terhadap perilaku kader, perilaku saya sendiri sehari-hari ya kita tetap mengayomi masyarakat, kalau masyarakat butuh saya ya saya layani itupun 24 jam. Karena PAC tidak memiliki mobil operasional maka ketika ada yang membutuhkan pertolongan semisal ada orang sakit kita langsung hubungi DPC kalau tidak ya kita langsung ke Dinas Sosial kalau memang urgent.”

Faktor kedua, peran deputi Badiklatpus dalam membentuk sistem kaderisasi serta melakukan pengawasan terhadap proses kaderisasi tersebut. Terdapat 3 deputi dengan peran yang berbeda dalam menjalankan proses

kaderisasi dijelaskan sebagai berikut.

Deputi 1 memiliki peran untuk merancang setiap program selama berlangsungnya proses ideologisasi kepada kader berdasarkan metode pendidikan yang telah dibuat oleh Badiklatpus DPP PDI Perjuangan.

Deputi 2 memiliki peran untuk memberikan tugas sebagai pendalaman terhadap setiap materi yang diberikan, seperti presentasi dan mereview setiap materi yang diberikan.

Deputi 3 memiliki peran untuk mengawasi calon kader selama proses ideologisasi berlangsung. Deputi ini memiliki peran yang sangat penting karena harus mengawasi calon kader sejak awal menjalani proses ideologisasi, karena sikap dan perilaku calon kader selama proses tersebut akan dicatat dan digunakan sebagai dasar penilaian apakah calon kader tersebut layak atau tidak untuk diluluskan sebagai kader PDI Perjuangan.

Faktor ketiga, pemilihan pemateri dalam mengisi materi pendidikan kader berpengaruh terhadap penanaman ideologi terhadap kader. Pemilihan pemateri dengan dasar tingginya intelektual dan cara menyampaikan ilmu yang lugas secara tidak langsung juga mempengaruhi kualitas calon kader selama proses ideologisasi. PDI Perjuangan dalam memilih pemateri tidak hanya berdasarkan seseorang tersebut merupakan senior dari partai itu sendiri namun juga harus terlatih oleh pengurus pusat dalam menyampaikan materi.

Selain itu, seseorang tersebut juga harus memahami ilmu yang akan disampaikan. Sehingga dengan penjelasan tersebut, PDI Perjuangan dalam proses ideologisasi seringkali menjadikan dosen dengan pendidikan minimal

S3 sebagai pemateri pada kegiatan pendidikan tersebut.

PDI Perjuangan memiliki kualifikasi tersendiri dalam menentukan pemateri yang di tunjuk sebagai mentor pendidikan. Althof selaku anggota Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya mengungkapkan bahwa terdapat kualifikasi dalam menentukan pemateri sebagai berikut:

“Pelaksanaan kaderisasi itu juga bertahap dalam artian instruktornya harus dilatih oleh pusat di Jakarta baru boleh melatih di tingkat provinsi dan kota jadi untuk kaderisasi sudah terstruktur sesuai AD/ART partai.”

Pendapat tersebut sesuai dengan Dearma (2023) bahwa, untuk menentukan fasilitator tentu harus melihat beberapa aspek seperti fasilitator yang profesional atau berkompeten di bidangnya dan narasumber yang memiliki daya tawar seperti kader terbaik PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan akademisi Rocky Gerung. Pemilihan pemateri dengan berdasarkan aspek tertentu tentu berperan penting terhadap kualitas pendidikan partai, sehingga akan berimbas juga terhadap kualitas calon kader dalam menanamkan ideologi terhadap diri masing-masing calon kader.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa PDI Perjuangan mempunyai faktor internal dan eksternal yang mendukung berjalannya proses ideologisasi tersebut. Faktor internal PDI Perjuangan dalam menjalankan proses ideologisasi tentu motivasi diri dari calon kader untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman dari setiap materi yang diberikan, faktor

internal lain merupakan peran dari deputi Badiklatpus dalam merancang dan mengawasi calon kader selama proses ideologisasi berjalan. Sedangkan faktor eksternal yang mendukung berjalannya proses ideologisasi yaitu pemilihan pemateri yang kompeten dalam bidangnya seperti akademisi dan kader PDI Perjuangan sendiri namun dengan catatan sudah dilatih oleh pengurus pusat.

2. Faktor Penghambat

Pendidikan kader partai tidak selalu berjalan dengan mudah dan lancar. Terdapat beberapa faktor penghambat, yang sering kali menghambat kinerja partai dalam melakukan proses pendidikan kader. Faktor pertama adalah kemampuan daya tangkap calon kader yang beragam, membuat PDI Perjuangan mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman materi pendidikan kader partai. Karena tidak semua kader memiliki jenjang pendidikan yang tinggi dalam sisi akademis.

Selain itu dalam faktor kedua, yang menghambat PDI Perjuangan dalam menghasilkan kader yang berkualitas adalah seleksi yang begitu ketat, karena menurut Althof pendidikan kader jenjang pertama menjadi pintu masuk masyarakat umum menjadi kader partai sehingga harus dilakukan seleksi yang begitu ketat sebagaimana penjelasan berikut:

“Kendala dalam proses kaderisasi menurut saya karena kita di DPC ini tingkat yang paling dasar, karena menjadi pintu masuk utama dari masyarakat umum menjadi kader PDI Perjuangan sehingga harus lebih berhati-hati untuk lebih detail mencari kader.”

Hal tersebut menjadi salah satu yang paling urgent karena jika partai asal menerima orang yang tidak jelas asal usulnya maka strategi maupun kegiatan politik yang dilaksanakan bisa dipakai oleh partai lain dalam hal ini PDI Perjuangan meminimalisir adanya spionase.

Faktor ketiga adalah era pandemi yang menyebabkan beberapa proses kaderisasi sedikit terhenti, berjalan pun tidak memaksakan untuk melaksanakan secara offline karena menurut Afrid yang juga kader pratama menjelaskan terkait pengalaman kaderisasi online yang dia ikuti memang dari segi penyampaian materi sedikit kurang memahami karena tentu kita memahami kelemahan dari sistem pembelajaran online tersebut.

Faktor keempat adalah penggunaan bahasa daerah ketika menyampaikan pendapat, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami sesuatu. Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat pendidikan calon kader juga akan mempengaruhi proses calon kader dalam memahami setiap materi yang diberikan selama proses pendidikan kader partai sehingga partai mengupayakan untuk tetap memberikan fasilitas yang terbaik terhadap kader. Pemberian wadah terhadap kader yang berkualitas, seperti ditugaskan menjadi mentor selama berlangsungnya pendidikan kader sehingga akan berperan aktif sebagai kader yang kurang memahami akan mendapatkan fasilitas untuk menanyakan apa yang belum dipahami kepada mentor yang telah diberikan tugas tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa PDI Perjuangan mempunyai faktor internal dan eksternal yang menghambat

berjalannya proses ideologisasi tersebut. Faktor internal yang menghambat proses ideologisasi yaitu daya tangkap calon kader yang beragam dan penggunaan bahasa daerah. Hal tersebut tentu mempengaruhi kader yang lain dalam memahami apa yang dibicarakan, di sisi lain daya tangkap yang beragam terjadi karena latar belakang pendidikan yang berbeda juga mempengaruhi hal tersebut.

Sedangkan faktor eksternal yang menghambat yaitu proses seleksi yang cukup ketat untuk mencegah adanya penyusup yang memanfaatkan segala informasi untuk mengetahui strategi yang digunakan PDI Perjuangan dalam setiap kegiatan politiknya, lalu adanya pandemi juga menjadi hambatan pada proses ideologisasi karena ketika pandemi segala aktivitas dihentikan sehingga berpengaruh terhadap proses ideologisasi PDI Perjuangan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui analisa dan temuan peneliti dalam penelitian tentang Proses Ideologisasi Kader Partai (Studi Kasus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya) penulis memiliki 2 fokus yang dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu proses ideologisasi kader partai dengan sistem formal dan informal, faktor-faktor pendukung dan penghambat proses kaderisasi.

Sesuai dengan AD/ART DPP PDI Perjuangan, DPC PDI Perjuangan memiliki kewajiban untuk melaksanakan Pelatihan Kader Pratama, adapun Pelatihan Kader Pratama merupakan jenjang kaderisasi pertama yang ada dalam struktural PDI Perjuangan. Pelatihan Kader Pratama yang diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan bertempat di Wisma Perjuangan yang berada di Kota Batu, dalam setahun terdapat 2-4 kali proses kaderisasi formal yang diselenggarakan. Beberapa materi yang dimuat dalam proses kaderisasi yaitu, Materi Ideologi, Materi Organisasi, Materi Penggalangan Massa, Materi Analisa Penguatan Basis, dan Materi Penugasan (Pasca Diklat), dengan metode pendidikan andragogi.

Sedangkan kaderisasi informal merupakan kelanjutan dari kaderisasi formal, dalam penelitian ini terdapat 3 klasifikasi terhadap proses kaderisasi informal yaitu penugasan kader dalam setiap kegiatan partai di wilayah Surabaya (kepanitiaan atau peserta), kedua penugasan kader dalam struktur kepengurusan partai, dan yang terakhir penugasan kader sebagai pejabat publik.

Terdapat faktor internal dan eksternal dalam mendukung terselenggaranya

proses kaderisasi sehingga membentuk kader yang berkualitas. Faktor internal tentu motivasi diri dari kader itu sendiri dalam mengikuti kegiatan, hal tersebut juga sesuai dengan metode pendidikan andragogi yang menyebutkan bahwa masyarakat dewasa tentu memiliki motivasi tersendiri dalam mengikuti setiap kegiatan, lalu peran Badiklat sebagai perancang dan pengawas dalam berlangsungnya proses kaderisasi tersebut. Faktor eksternal dalam menunjang terselenggaranya proses kaderisasi adalah pemilihan pemateri yang berkualitas untuk menjadi fasilitator dalam membentuk perilaku kader tersebut.

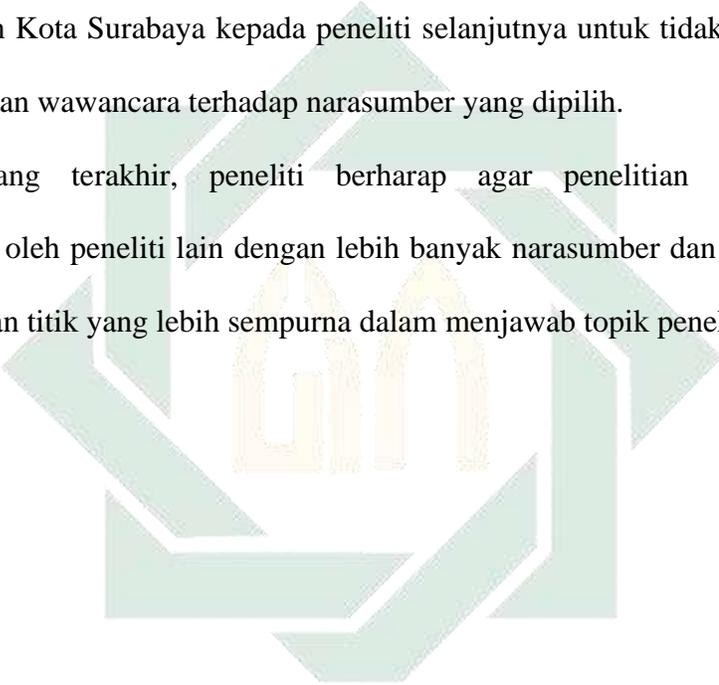
Proses kaderisasi memiliki beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya yang terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu daya tangkap kader dalam menerima materi sangat beragam karena memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda sehingga memiliki penyesuaian dalam penyampaian materi dan penggunaan bahasa daerah ketika menyampaikan pendapat tentu menimbulkan dalam penafsiran pendapat tersebut. Sedangkan faktor eksternal yang paling utama merupakan proses seleksi yang begitu ketat untuk menghindari spionase karena Pelatihan Kader Pratama merupakan proses kaderisasi jenjang pertama dan menjadi pintu menjadi kader PDI Perjuangan.

B. Saran

Setelah melewati beberapa dinamika dalam menjalankan penelitian serta adanya hasil temuan yang diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran untuk Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, yang pertama tentu mengaktifkan kembali website DPC PDI Perjuangan Surabaya untuk memberikan informasi

kepada masyarakat terhadap setiap kegiatan yang telah dijalankan. Saran kedua tentu Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya harus lebih terbuka dan transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Saran ketiga, DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya kepada peneliti selanjutnya untuk tidak dipersulit dalam permintaan wawancara terhadap narasumber yang dipilih.

Dan yang terakhir, peneliti berharap agar penelitian ini dapat disempurnakan oleh peneliti lain dengan lebih banyak narasumber dan perspektif agar menemukan titik yang lebih sempurna dalam menjawab topik penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Muryanto. *Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik (Inspirasi Sumatra Utara)*, (Medan: USU Press, 2018) 102.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 415.
- DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2024, *Piagam Perjuangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan*. (Denpasar: Kongres V, 2020).
- DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2024, *Program Perjuangan PDI Perjuangan*. (Denpasar: Kongres V, 2020), 3-15.
- DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2024. *Sikap Politik PDI Perjuangan 2020*. (Denpasar: Kongres V, 2020), 3-4.
- Fahrudin, Ali. *Nasionalisme Soekarno dan Konsep Kebangsaan Mufassir Jawa*, (Jakarta: LITBANGDIKLAT Press, 2020), 49-56.
- Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Obor Indonesia, 2007), 98.
- Hakim, Abdul. *Mengubah Wajah Sejarah: Jalan Politik Eri Cahyadi, PDI Perjuangan, dan Pilkada Surabaya*, (Lamongan: Pagan Press, 2021), 110.
- Labolo, Muhadam dan Ilham, Teguh. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 26.
- Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, *Kisah Pancasila*, (Jakarta: Kemendikbud, 2017), 12.
- Said A. A. Gatara dan Dzulkiah, Moh. Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) 77-78.
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1*, (Jakarta: Banana Books, 2016), 289.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 114.
- Usman, Husaini dan Setiady, Purnomo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*,

(Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cetakan Keempat, 81-90.

Jurnal

- Ahmad, Fandi Sintani., Tuanaya, Wahab., dan Wance, Marno. Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif Pada Partai Politik (Studi DPD Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 19, No. 1, 2020, 76-88.
- Agustina, Nur., Ode, La Monto Bauto dan Upe, Ambo. Pengaruh Visi-Misi, Nilai Ideologi Partai, dan Figur Terhadap Perilaku Memilih dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2017 (Studi di Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton). *Jurnal Neo Societal*, Vol. 3, No. 3, 2018 527.
- Akbar, Muhammad Tri Asyafin Putra dan Widiyarta, Agus. Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya). *Jurnal Academia Praja*, Vol. 5, No. 2, 2022, 134.
- Andhika, Doni Kusuma dan Supriyanto. Pengaruh Ideologi Partai Politik Dan Nilai-Nilai Kepribadian Anggota Terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pendidikan Di DPRD Kota Surabaya. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, 2020, 1-5.
- Andi, Afri dan Sukri, Al. Strategi Komunikasi Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu Legislatif 2019 di Pekanbaru. *Journal Of Politican Communication and Media*, Vol. 1 No. 1, 2022, 38.
- Argenti, Gili. Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 5, No. 1, 2020, 43-55.
- Aulia, Dian. Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, No. 1, 2016, 115.
- Azikin, Andi. Konsep dan Implementasi Ideologi Pancasila dalam Rumusan Kebijakan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, 2018, 81.

- Heru, T Nurgiansah dan Fazli Rachman, Nasionalisme Warga Muda di Era Globalisasi: Pendidikan Kewarganegaraan di Perbatasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 19, No. 1, 2022, 67.
- Hiryanto, Pedagogi, Andragogi, dan Heutagogi Serta Implikasinya dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, Vol. XXII, No. 01, 2017, 68.
- Ismail, Hasan dan Murti, Indah. Implementasi Kaderisasi DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 2, 2018, 1064.
- Iswandi. Studi Gerakan Ideologi Partai Politik Pada Pemilu 2019. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 7, No. 1, 2020, 4-19.
- Jaenuri. Analisis Loyalitas dan Volatilitas Pemilih Partai di Kota Malang. *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 2, 2011.
- Kadek, I Dede Junaedy dan Nyoman, I Wiratmaja. Peran Kaderisasi DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Bangli. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 1, 2019, 8-11.
- Kaligis, Retor. Nasionalisme dan Kelas Sosial: Ideologi dan Praktik Partai Nasionalis di Indonesia. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 27, No. 2, 2014, 81-83.
- Kholid, Laila Alfirdaus. Dari Identitas Ke Ideologi: Penguatan Arah Kebijakan Programatik Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2018, 100.
- Khosiah, Hajrah, dan Syafril. Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, 2017, 143.
- Kurniasih, Wiwin dan Turtiantoro. Studi Orientasi Ideologi Marhaenisme Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 8, No. 1, 2019.

- Maluku Tengah Pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 19, No. 1, 2015, 19.
- Prayogi, Andri., Anwar, Saeful dan Fakhruroji, Moch. Peran Kepemimpinan Yayasan Pembina Masjid dalam Proses Kaderisasi Mahasiswa, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1 No. 3, 2016, 287.
- Prihastha, Rendy. Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Mewujudkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2019-2024. *Indonesian Journal of Social and Political Science*, Vol. 1 No. 1, 2020, 17.
- Raeinady, Vhiasyah dan Aditya, Jagad Dewantara. Pemikiran Soekarno dalam Ajaran Marhaenisme, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2, 2021, 457.
- Rundengan, Steydy., Reinhart, Max Rembang dan Egeten, Maxi. Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. V No. 086, 2019, 61.
- Saiful M. Haq Al Faruqy., Sarbini, Ahmad dan Iwan, Asep Setiawan. Model Kaderisasi Anggota Partai Politik Islam dalam Membentuk Pemimpin Islami, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 2, No. 2, 2017, 105.
- Salie dan Winurti, Dwi. Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. VIII, No. 2, 2020, 141-151.
- Sanur, Debora. Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014. *Jurnal Politica*, Vol. 4, No. 2, 2013, 296.
- Sirajuddin, Eksistensi Partai Politik dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV, No. 1, 2016, 78.
- Suhaimi, Else. Pola Rekrutmen Politik Berdasarkan Ideologi Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 1, 2018, 114-117.
- Sutisna, Agus. Perspektif Marketing Politik: Kegagalan PDIP dan Partai Demokrat Dalam Mempertahankan Posisi Sebagai Partai Pemenang Pemilu 1999 dan Pemilu 2009. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1, 2016, 113.

- Syahrudin, Eki dan Marjuki, Akhmad. Kaderisasi Partai Islam dan Pemilihan Kepala Daerah: Studi DPD PAN Serang Banten, *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 9, No. 1, 2018.
- Syaukani, Ghiffary Asy dan Fitriyah. Pragmatisme Kaderisasi Internal DPP Partai Golkar Era Reformasi (Studi Kasus di DPP Partai Golkar). *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 9, No. 3, 2020.
- Syofian, Ridho. Strategi Komunikasi Politik Partai Golongan Karya (GOLKAR) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kuantan Singingi, *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, Vol. 7, Edisi I, 2020, 6.
- Tawaang, Felix dan Ali, Hasyim Imran. Ideologi dan Wacana Media (Studi Ideologi Media Pemilik Akun Medsos). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 21, No. 1, 2017, 60-61.
- Ulfa, Sholihat dan Warsono. Strategi Calon Walikota Surabaya 2020 Eri Cahyadi dan Armuji dalam Memenangkan Pilwali Di Surabaya. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 3, 2022, 493.
- Wicaksono, Itok. Peran Partai Politik dalam Partisipasi dan Aspirasi Politik di Tingkat Pemerintahan Desa, *Jurnal Politico*, Vol. 17, No. 2, 2017, 317.
- Wikandaru, Reno dan Cathrin, Shely. Ideologi Sebagai Ramalan Masa Depan: Hakikat Ideologi Menurut Karl Mannheim, *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 7, No. 2, 2021, 283.
- Yusra, Zhahara., Zulkarnain, Ruffran dan Sofino. Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, Vol. 4, No. 1, 2021,
- Zatul, Dihlis Kharismandari dan Satmoko, Agus Adi. Peran Partai Politik dalam Menerapkan Pendidikan Politik Terhadap Pengurus dan Kader Partai (Studi Pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 3, 2015, 320.

Skripsi

- Hestiane, Cherlinda Cahyani, Skripsi: *Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik: Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota*

- Depok Tahun 2018*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 18.
- Januar, Alissa Ramadanty, Skripsi: *Partai Politik dan Sosialisasi Politik (Strategi Politik Rian Ernest pada Pemilu Legislatif 2019 di Daerah Pemilihan Jakarta Timur)*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 27-29.
- Lukita, Eka Sari, Skripsi: *Perempuan dan Politik Elektoral (Strategi Kampanye Calon Legislatif Petahana PKB Terpilih Di Daerah Pemilihan Jawa Timur II Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur 2019)*. (Surabaya: UINSA, 2019), 49.
- Nur, Desy Fitriyah. Skripsi: *Pendidikan Politik Kader Partai di Indonesia (Studi Kasus Pendidikan Kader Pratama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya)*. (Malang: UB, 2018), 79.
- Santosa, Rahmat. Skripsi: *Pola Kaderisasi dalam Rangka Peningkatan Daya Saing PDI Perjuangan di DPC PDI Perjuangan Sleman*. (Yogyakarta: UNY, 2017), 70.

Undang-undang

- Indonesia, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 2 tahun 2011.
- Indonesia, Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018.
- Indonesia, Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.
- Undang-Undang Partai Politik No. 2 tahun 2011 pada Pasal 29 Ayat (2) Bab XI tentang Rekrutmen Politik, diakses dari <https://bit.ly/3Hyh7nh> , pada tanggal 5 Februari 2023, pukul 2.56

Website

- Akuntono, Indra. “*Fanatisme Versus Rasionalitas Pemilih PDIP*” diakses dari <https://bit.ly/3HQJz5B> , pada tanggal 22 Desember 2022, pukul 1.26.
- Arimbi, Maria Haryas Prabawanti “*Menyusuri Jejak Sejarah PDIP dari Era Orde*

- Baru hingga Kini*”, diakses dari <https://bit.ly/3AZLHDG> pada tanggal 6 Mei 2023, pukul 4.50
- BAPPENAS, “*Politik Lokal Terhadap Efektivitas Pemerintahan Daerah*” diakses dari <https://bit.ly/3ZnhY2r> , pada 10 Januari 2023, pukul 21.25.
- Constantine, Bobby Koloway. “*Menang di Rekap KPU, Eri Cahyadi: Terimakasih Warga Surabaya, Mari Bekerjasama Bangun Kota Pahlawan!*”, diakses dari <https://bit.ly/3Y9xRYW> , pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 1.13
- Dandy Bayu Bramasta “*Sejarah PDI-P yang Hari Ini Berusia 50 Tahun*”, diakses dari <https://bit.ly/3nsr2oF> pada tanggal 6 Mei 2023, pukul 4.47
- DPD PDIP Jawa Timur, “*Jalankan Tugas Akhir Kaderisasi Pratama, Husen Bantu Warga Isoman, Panti Asuhan hingga Pedagang Nasi Boran*”, diakses dari <https://bit.ly/3Hu5Og6> , pada tanggal 3 Februari 2023, pukul 0.41.
- DPD PDIP Jawa Timur, “*Sambung Roso, Cara Anas Karno Serap Aspirasi Wong Cilik*“, diakses dari <https://bit.ly/319rPsM> , pada tanggal 3 Februari 2023, pukul 0.35.
- DPD PDI Perjuangan Lampung “*Sejarah PDI Perjuangan*” diakses dari <https://pdiperjuanganlampung.id/sejarahpdiperjuangan/> pada tanggal 6 Mei 2023, pukul 4.37
- DPP PDI Perjuangan “*Visi dan Misi*” diakses dari <https://www.pdiperjuangan.id/detail-article/107/visi-dan-misi> pada tanggal 6 Mei 2023, pukul 1.19
- DPRD Kota Surabaya. “*Pimpinan*”, diakses dari <https://dprd.surabaya.go.id/pimpinan> , pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 1.07
- Firdaus, Febriana. “*Hanya PKS dan PDIP yang Murni Partai Kader*”, diakses dari <https://bit.ly/3IOEwPZ> , pada tanggal 6 Februari 2023, pukul 4.48
- KPK “*Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*” diakses dari <https://bit.ly/3IjKTNV> , pada tanggal 18 Mei 2023, pukul 0.13
- KPU, “*Hasil Pemilu Legislatif Kota Surabaya*”, diakses dari <https://bit.ly/3WXnTto> pada tanggal 9 Januari 2023, pukul 23.11.

- Lentera, “*DPD PDI Perjuangan Gelar Kaderisasi Partai Secara Online*”, diakses dari <https://bit.ly/3HmWNoM> , pada tanggal 3 Februari 2023, pukul 0.39.
- Nur, Sholihin “*Mengenal Lebih Dekat Pasangan Eri Cahyadi-Armuji, Paslon Nomor Urut 1 Pilwali Surabaya*”, diakses dari <https://bit.ly/3HjOnyx> , pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 1.02
- PDIP, “*Sejarah PDI Perjuangan*” diakses dari <https://bit.ly/3Vp40Kk> , pada 22 Desember 2022, pukul 2.04.
- Prabu, Jaffry Prakoso, “*Jokowi Tetapkan 10 Program Strategis Nasional, Apa Saja Ya?*” diakses dari <https://bit.ly/42zmV8C> , pada tanggal 8 Juni 2023, pukul 21.08
- Puspa, Haryanti Sari. “*Fahri Hamzah Sebut Banyak Kader PKS Pindah ke Partai Gelora*”, diakses dari <https://bit.ly/3Ht8xq0> , pada tanggal 6 Februari 2023, pukul 5.25
- Rakhmatulloh, “*Prabowo-Sandi 'Gerilya' di Jateng, PDIP: Pendukung Jokowi Makin Solid*” diakses dari <https://bit.ly/3G8a0mc> , pada tanggal 22 Desember 2022, pukul 1.09.
- Ridwan, Mohammad “*Ini dia 50 anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019*” diakses dari <https://bit.ly/3wGy2iH> , pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 1.05
- Trisetiawan, Agil Putra. “*Disanksi Peringatan Keras dan Terakhir, FX Rudy Bisa Dipecat PDIP?*”, diakses dari <https://bit.ly/3JNBGiB> , pada tanggal 6 Februari 2023, pukul 5.20
- Utami, Sri. “*PDIP Partai Kader Atau Partai Massa?*”, diakses dari <https://bit.ly/3Rz0lsN> , pada tanggal 6 Februari, pukul 4.30
- Widiyana, Esti “*Karier Risma: Dari Wali Kota Surabaya hingga Jadi Mensos*” diakses dari <https://bit.ly/3HmcqNp> , pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 1.10